

**PERANAN PENGUATAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK) DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DAN HUBUNGAN
FAKTOR SOSIAL EKONOMI DENGAN KOLEKTIBILITAS PINJAMAN
UPK GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN
(GERDU-TASKIN) DI KABUPATEN BLITAR**

SKRIPSI

OLEH :

AGNES DYAN PARAMITA

0310440002-44



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
MALANG
2008**

**PERANAN PENGUATAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK) DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DAN HUBUNGAN
FAKTOR SOSIAL EKONOMI DENGAN KOLEKTIBILITAS PINJAMAN
UPK GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN
(GERDU-TASKIN) DI KABUPATEN BLITAR**

**OLEH :
AGNES DYAN PARAMITA**

0310440002-44

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Pertanian
Strata Satu (S-1)**

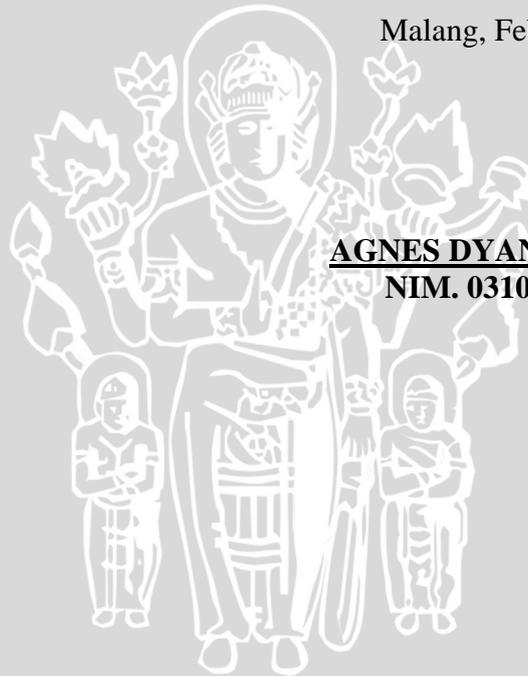
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
MALANG
2008**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, Februari 2007

AGNES DYAN PARAMITA
NIM. 0310440002-44



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : Peranan Penguatan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga dan Hubungan Faktor Sosial Ekonomi dengan Kolektibilitas Pinjaman UPK Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU-TASKIN) di Kabupaten Blitar

Nama Mahasiswa : Agnes Dyan Paramita

NIM : 0310440002-44

Program Studi : Agribisnis

Jurusan : Sosial Ekonomi Pertanian

Menyetujui : Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Ir. H. Budi Setiawan, MS.
NIP. 130 935 081

Rahman Hartono, SP. MP.
NIP. 132 157 732

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Ir. Djoko Koestiono, MS.
NIP. 130 936 227

Tanggal Persetujuan :

LEMBAR PENGESAHAN

Mengesahkan

MAJELIS PENGUJI

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Ir. Syafrial, MS.
NIP. 131 281 625

Ir. Ratya Anindita, MS. Ph.D.
NIP. 131 574 870

Penguji III,

Penguji IV,

Dr. Ir. H. Budi Setiawan, MS
NIP. 130 935 081

Rahman Hartono, SP. MP.
NIP. 132 157 732

Tanggal Lulus :

Bukankah telah Kami lapangkan dadamu untuk? Dan Kami lepaskan beban darimu, yang membebankan punggungmu. Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (namamu). Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (urusan dunia), bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.

(Al-Insyirah:1-8)



Kupersembahkan karya kecil ini untuk

Ayah Bundaku tercinta.....

*Adek2 chayank yang slalu memberi
senyuman tulus*

*temen-temen seperjuangan atas
untaian motivasi buatku....*

& yang slalu ada untukku.....

RINGKASAN

Agnes Dyan Paramita. 0310440002-44. Peranan Penguatan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga dan Hubungan Faktor Sosial Ekonomi dengan Kolektibilitas Pinjaman UPK Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU-TASKIN) di Kabupaten Blitar. Dibawah bimbingan Dr.Ir. Budi Setiawan, MS dan Rahman Hartono, SP.MP

Program Gerdu-Taskin dirancang khusus sebagai manifestasi sikap tanggap pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam rangka mengurangi kemiskinan. Program Gerdu-Taskin berhasil memfasilitasi pembentukan institusi usaha yang bergerak dalam bidang/sektor jasa/pelayanan keuangan mikro yang berupa Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan Program Gerdu-Taskin yang bersifat ekonomi produktif sebagai dana bergulir bagi pengembangan ekonomi masyarakat miskin. Untuk memacu kinerja UPK, diperlukan langkah strategis berupa penguatan UPK. Melalui penguatan UPK diharapkan semakin memantapkan pelaksanaan Gerdu-Taskin dari aspek kelembagaan dan usaha UPK dan meningkatkan produktivitas sehingga pendapatan masyarakat meningkat. Keberlanjutan UPK tergantung dari dana yang tersedia pada UPK itu sendiri. Ketersediaan dana di UPK sangat dipengaruhi oleh tingkat kolektibilitas pinjaman.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada perbedaan pendapatan rumah tangga di UPK penguatan dan di UPK non penguatan ? (2) Apakah ada hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan kolektibilitas pinjaman ? Tujuan dari penelitian adalah (1) Menganalisis perbedaan pendapatan rumah tangga di UPK penguatan dan UPK non penguatan (2) Menganalisis hubungan faktor sosial ekonomi dengan kolektibilitas pinjaman UPK Gerdu-Taskin.

Hipotesis yang diajukan adalah (1) Diduga bahwa pendapatan rumah tangga di UPK penguatan lebih tinggi dibandingkan dengan UPK non penguatan (2) Diduga bahwa ada hubungan antara faktor umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga, tanggungan keluarga, pendapatan dan jenis usaha dengan kolektibilitas pinjaman.

Lokasi penelitian dilakukan secara sengaja di Kabupaten Blitar dengan bahwa kabupaten Blitar adalah penerima program Gerdu-Taskin dengan kolektibilitas pinjaman rendah. Metode penentuan sampel menggunakan *Multistage Stratified Random Sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata dan korelasi rank spearman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pendapatan rumah tangga di UPK penguatan dan UPK non penguatan. Pendapatan rata-rata rumah tangga di UPK penguatan sebesar Rp 785.522,00 sedangkan pendapatan rata-rata rumah tangga di UPK non penguatan sebesar Rp 432.203,00. Jadi rata-rata pendapatan rumah tangga di UPK penguatan lebih besar daripada di UPK non penguatan. Faktor sosial ekonomi yang berhubungan dengan kolektibilitas pinjaman adalah pendidikan, pendapatan dan jenis usaha. Sedangkan

faktor umur, jumlah anggota keluarga dan tanggungan keluarga tidak berhubungan dengan kolektibilitas pinjaman UPK Gerdu-Taskin di Kabupaten Blitar.

Saran yang dapat dikemukakan adalah (1) Bagi pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) harus lebih selektif dalam memberikan pinjaman dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan melakukan analisis usaha peminjam untuk menentukan besarnya pinjaman serta harus tegas dalam menangani pinjaman bermasalah sehingga kolektibilitas pinjaman akan lancar. (2) Bagi instansi terkait dengan Program Gerdu-Taskin ini diharapkan selalu melakukan monitoring yang intensif dan memberikan program penguatan bagi UPK yang belum mendapatkan penguatan karena dengan adanya penguatan UPK berpengaruh pada tingkat pendapatan rumah tangga penduduk miskin. (3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menggali informasi lebih dalam tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi kolektibilitas pinjaman dilihat dari lingkungan masyarakat dan karakter masyarakat dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang kondisi UPK sebelum dan sesudah mendapat program penguatan serta kondisi UPK dengan dan tanpa program penguatan.



SUMMARY

Agnes Dyan Paramita. 0310440002-44. The Role of Unit Pengelola Keuangan (UPK) Reinforcement in Improvement of Household Income and Corellation between Social Economy Factors with UPK Gerdu-Taskin Loan Collectibility in Blitar Regency. Supervised by Dr.Ir. Budi Setiawan, MS and Rahman Hartono, SP.MP

Gerdu-Taskin Program is designed special as manifestation of East Java Government due to decrease poverty. Gerdu-Taskin program has facilitated to build working institution that the activity is on micro finance services that is Unit Pengelola Keuangan (UPK).UPK is expected to capable manage and develop Gerdu-Taskin Program which has the character of productive economics as revolving fund to improve the poor society economics. To encourage UPK performance needs strategic step in form of UPK reinforcement. Through UPK reinforcement is expected to more straighten out the implementation of Gerdu-Taskin Program from foundation aspect or from UPK real sector and also to increase society productivity with the result that can improve the society income. UPK continuity depends on the funds that available. The availability of the funds depends on loan collectibility.

The problems of this research are: (1) is there different between household incomes on UPK reinforcement with household income on UPK non-reinforcement. (2) Is there correlation between social economy factors with UPK Gerdu-Taskin loan collectibility. The objectives of this research are: (1) To analyze the different between household income on UPK reinforcement with household income on UPK non-reinforcement. (2) To analyze the correlation between social economy factor with UPK Gerdu-Taskin loan collectibility

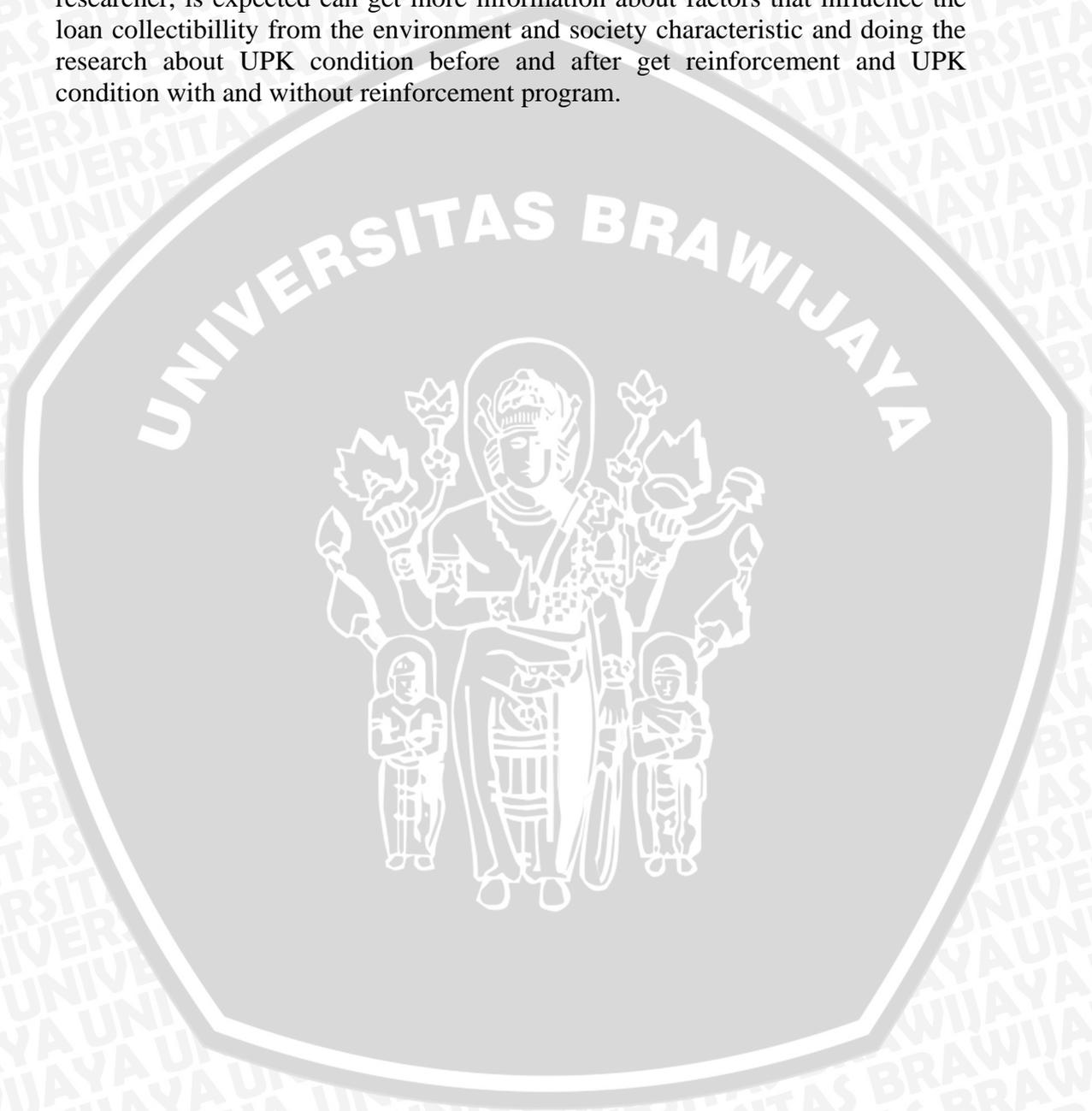
The hypotheses of this research are: (1) it's predicted that household income in UPK reinforcement is higher than UPK non reinforcement. (2) It's predicted than there is correlation between age, education level, number of family members, income, family burden and kind of work with loan collectibility.

Location research is taken purposely in Blitar regency with the reason that Blitar regency is one of regency that accepts Gerdu-Taskin Program with low collectibility. Sample determination method use multistage stratified random sampling and data analysis method use t-test and rank spearman correlation.

The result of this research showed that there is difference between household income on UPK reinforcement and UPK non-reinforcement. Average household income on UPK reinforcement is Rp 785.522,00 and on UPK non-reinforcement is Rp 432.203,00. So that, the household income on UPK reinforcement is higher than on UPK non-reinforcement. Social economy factors which have correlation with loan collectibility are education level, income and kind of work. While the age, number of family member and family burden haven't correlation with UPK Gerdu-Taskin loan collectibility in Blitar Regency.

The suggestions from this research are: (1) For UPK's management must selective in give the loan to the poor society in consider about social economy factors and make work analysis for decides how much loan must be given and

also resolute to have high loan collectibility. (2) For the related institution in role making in Gerdu-Taskin Program is expected to make intensive monitoring and hold reinforcement program to UPK that nnot get reinforcement yet. Because reinforcement UPK influent household income for the poor. (3) For other researcher, is expected can get more information about factors that influence the loan collectibility from the environment and society characteristic and doing the research about UPK condition before and after get reinforcement and UPK condition with and without reinforcement program.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman.

Penulisan laporan skripsi yang berjudul **“Peranan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga dan Hubungan Faktor Sosial Ekonomi dengan Kolektibilitas Pinjaman UPK Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU-TASKIN) di Kabupaten Blitar”** disusun sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. H. Budi Setiawan, MS dan Rahman Hartono, SP. MP selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini.
2. Dr. Ir. Syafril, MS dan Ir. Ratya Anindita, MS. Ph.D selaku penguji skripsi yang juga telah memberikan banyak saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
3. Dr. Ir. Djoko Koestiono, MS selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
4. Pengurus UPK Kabupaten Blitar atas informasi dan kerjasamanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam penulisan laporan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kemajuan penulis dikemudian hari.

Semoga laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi penulis maupun pembaca.

Malang, Februari 2008

Penulis



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Magetan, pada tanggal 17 Oktober 1984 dan merupakan putri pertama dari Ayahanda Sudjiman dan Ibunda Wita Arie Suhartatik. Penulis memulai pendidikan dengan menjalani pendidikan dasar di SDN Karangrejo I Kendal Ngawi (1991-1997), dan melanjutkan ke SLTP Negeri I Magetan (1997-2000), kemudian melanjutkan ke SMU Negeri I Magetan (2000-2003). Penulis menjadi mahasiswi Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Program Studi Agribisnis pada tahun 2003 melalui jalur SPMB.

Selama kuliah penulis aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa antara lain :

1. Staff Magang Biro Kewirausahaan Perhimpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi (PERMASETA) periode 2003-2004.
2. Staff Magang Departemen Keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian periode 2003-2004.
3. Staff Departemen Keuangan dan Investasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian periode 2004-2005.
4. Staff Departemen Komunikasi dan Da'wah Forum Studi Islam Insan Kamil (Forsika) Fakultas Pertanian periode 2005-2006.

Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai kepanitian yang diselenggarakan di tingkat fakultas maupun universitas. Pada kegiatan akademis penulis pernah menjadi asisten praktikum mata kuliah Ilmu Usahatani jurusan Sosial Ekonomi Pertanian.

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR DIAGRAM	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Telaah Penelitian Terdahulu.....	6
2.2. Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	9
2.3. Tinjauan Umum Tentang Kolektibilitas Kredit.....	16
2.4. Tinjauan Umum Tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin).....	23
2.5. Tinjauan Umum Tentang Unit Pengelola Keuangan (UPK) .	35
2.6. Tinjauan Tentang Penguatan UPK.....	39
2.7. Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	47
III. KERANGKA KONSEP PENELITIAN	50
1.1. Kerangka Pemikiran.....	50
1.2. Hipotesis	53
1.3. Batasan Masalah	53
1.4. Definisi Operasional.....	54
IV. METODOLOGI PENELITIAN.....	55
4.1. Metode Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian.....	55
4.2. Metode Penentuan Sampel.....	55
4.3. Metode Pengambilan Data.....	56
4.4. Metode Analisis Data.....	56



V. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN	60
5.1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar	60
5.2. Gambaran Umum Unit Pengelola Keuangan (UPK)	65
VI. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	71
6.1. Karakteristik Responden	71
6.2. Perbandingan Pendapatan Rumah Tangga di UPK Penguatan dan UPK non Penguatan	79
6.3. Hubungan Faktor Sosial Ekonomi dengan Kolektibilitas Pinjaman	84
6.4. Alasan Responden Menunggak.....	104
6.5. Implikasi Hasil Penelitian	105
VII. KESIMPULAN DAN SARAN	106
7.1. Kesimpulan.....	106
7.2. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	111



DAFTAR TABEL

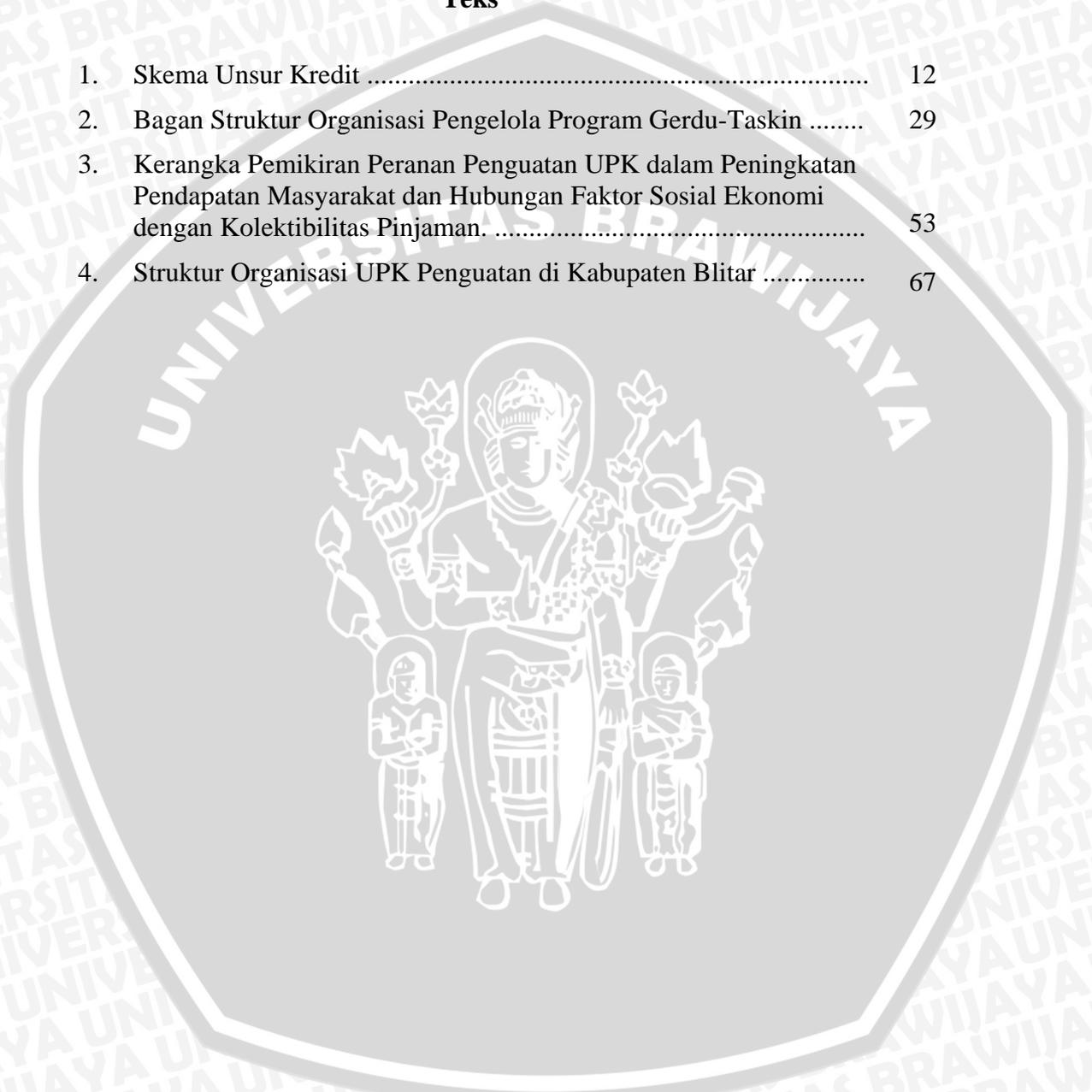
No.	Teks	Halaman
1.	Kriteria Kolektibilitas Kredit Berdasarkan Edaran BI No 26/4/BPPP tahun 1993	18
2.	Keunggulan dan Kelemahan UPK Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	39
3.	Kategori Kesehatan UPK	46
4.	Tahap Penentuan Sampel	55
5.	Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar tahun 2006	61
6.	Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Penduduk Miskin Kabupaten Blitar	62
7.	Jumlah Industri Kecil dan Rumah Tangga dirinci Menurut Industri di Kabupaten Blitar tahun 2006	64
8.	Kondisi UPK Penguatan dan UPK non Penguatan Di Kabupaten Blitar	66
9.	Jumlah Responden Menurut Umur	71
10.	Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Formal	72
11.	Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendapatan	73
12.	Jumlah Responden Menurut Jumlah Anggota Keluarga	74
13.	Jumlah Responden Menurut Tanggungan Keluarga	75
14.	Jumlah Responden Menurut Jenis Usaha	76
15.	Jumlah Responden Menurut Kolektibilitas Pinjaman	77
16.	Jumlah Responden Menurut Besar Pinjaman	77
17.	Alokasi Penggunaan Pinjaman di UPK Penguatan dan di UPK non Penguatan	78
18.	Jenis Usaha Rumah Tangga di UPK Penguatan dan di UPK non Penguatan	79
19.	Rata-Rata Pendapatan dari Masing-Masing Jenis Usaha Di UPK Penguatan dan di UPK non Penguatan	80
20.	Kolektibilitas Pinjaman Berdasar Kelompok Umur	85
21.	Persentase Responden dengan Kolektibilitas Pinjaman di atas 50% Menurut Umur dan Status UPK.....	86
22.	Kolektibilitas Pinjaman Berdasarkan Tingkat Pendidikan	88

23.	Persentase Responden dengan Kolektibilitas Pinjaman di atas 50 persen Menurut Tingkat Pendidikan dan Status UPK.....	89
24.	Kolektibilitas Pinjaman Berdasarkan Pendapatan	92
25.	Persentase Responden dengan Kolektibilitas Pinjaman di atas 50 persen Menurut Pendapatan dan Status UPK	92
26.	Kolektibilitas Pinjaman Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga	94
27.	Persentase Responden dengan Kolektibilitas Pinjaman di atas 50 persen Menurut Jumlah Anggota Keluarga dan Status UPK	95
28.	Kolektibilitas Pinjaman Berdasarkan Tanggungan Keluarga	97
29.	Persentase Responden dengan Kolektibilitas Pinjaman di atas 50 persen Menurut Tanggungan Keluarga dan Status UPK	98
30.	Kolektibilitas Pinjaman Berdasarkan Jenis Usaha	101
31.	Persentase Responden dengan Kolektibilitas Pinjaman di atas 50 persen Menurut Jenis Usaha dan Status UPK	101
32.	Hubungan Faktor Sosial Ekonomi dengan Kolektibilitas Pinjaman	103



DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Skema Unsur Kredit	12
2.	Bagan Struktur Organisasi Pengelola Program Gerdu-Taskin	29
3.	Kerangka Pemikiran Peranan Penguatan UPK dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Hubungan Faktor Sosial Ekonomi dengan Kolektibilitas Pinjaman.	53
4.	Struktur Organisasi UPK Penguatan di Kabupaten Blitar	67



DAFTAR DIAGRAM

No.	Teks	Halaman
1.	Persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen berdasarkan interaksi status UPK dengan umur	87
2.	Persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen berdasarkan interaksi status UPK dengan tingkat pendidikan	90
3.	Persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen berdasarkan interaksi status UPK dengan tingkat pendapatan	93
4.	Persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen berdasarkan interaksi status UPK dengan jumlah anggota keluarga	96
5.	Persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen berdasarkan interaksi status UPK dengan tanggungan keluarga	99
6.	Persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen berdasarkan interaksi status UPK dengan jenis usaha	102



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Tahap Penentuan Sampel	111
2.	Daftar UPK Penguatan dan UPK non Penguatan di Kabupaten Blitar.....	112
3.	Daftar Nama Sampel	113
4.	Hubungan Umur dengan Kolektibilitas Pinjaman	116
5.	Hubungan Pendidikan dengan Kolektibilitas Pinjaman	120
6.	Hubungan Pendapatan dengan Kolektibilitas Pinjaman	124
7.	Hubungan Jumlah Anggota Keluarga dengan Kolektibilitas Pinjaman	128
8.	Hubungan Tanggungan Keluarga dengan Kolektibilitas Pinjaman	132
9.	Hubungan Jenis Usaha dengan Kolektibilitas Pinjaman	136
10.	Perhitungan Analisis Uji Dua Beda Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga pada UPK Penguatan dan UPK non Penguatan	137
11.	Perhitungan Analisis Uji Dua Beda Rata-Rata Pendapatan Pedagang Pracangan di UPK Penguatan dan UPK non Penguatan	138
12.	Perhitungan Analisis Uji Dua Beda Rata-Rata Pendapatan Pedagang mlijo di UPK Penguatan dan UPK non Penguatan	139
13.	Perhitungan Analisis Uji Dua Beda Rata-Rata Pendapatan petani di UPK Penguatan dan UPK non Penguatan	140
14.	Perhitungan Analisis Uji Dua Beda Rata-Rata Pendapatan Peternak ayam di UPK Penguatan dan UPK non Penguatan	141
15.	Perhitungan Analisis Uji Dua Beda Rata-Rata Pendapatan dari Jenis Usaha Lain di UPK Penguatan dan UPK non Penguatan	142
16.	Peta Kabupaten Blitar	143



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Gerdu-Taskin dirancang khusus sebagai manifestasi sikap tanggap Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam rangka mengurangi kemiskinan di Jawa Timur melalui pendekatan TRIDAYA meliputi Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Usaha dan Pemberdayaan Lingkungan. Sejak dimulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 Program Gerdu-Taskin telah berhasil memfasilitasi pembentukan sebuah institusi usaha yang bergerak dalam bidang/sector jasa/pelayanan keuangan mikro kecil yang berupa Unit Pengelola Keuangan (UPK).

UPK diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan Program Gerdu-Taskin yang bersifat ekonomi produktif sebagai dana bergulir (*revolving fund*) bagi pengembangan ekonomi masyarakat miskin di desa/Kelurahan tersebut. Lebih jauh diharapkan UPK mampu berperan mensinergikan pengelolaan program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat ekonomi produktif yang masuk ke Desa/Kelurahan, sehingga kedepan UPK bisa tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan mengelola dan mengembangkan aset-aset perekonomian yang ada di Desa/Kelurahan (PTO,2006).

Dalam rangka memacu kinerja UPK sebagai lembaga pengelola kegiatan ekonomi masyarakat dan mendorong terbentuknya BUMDes, perlu dilakukan langkah-langkah strategis berupa pembinaan dan fasilitasi penguatan usaha UPK. Kegiatan Penguatan UPK Program Gerdu-Taskin meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan UPK, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan usaha UPK, pengembangan usaha RTM, pengembangan sarana prasarana UPK dan pengembangan sistem keterjaminan sosial melalui UPK.

Melalui kegiatan ini diharapkan semakin memantapkan pelaksanaan Gerdu-Taskin dari aspek kelembagaan dan usaha UPK, dan mengoptimalkan pengembangan potensi Pokmas UEP serta dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga pendapatan meningkat. Adanya peningkatan pendapatan

merupakan tolak ukur keberhasilan program penguatan sehingga akan menurunkan angka kemiskinan (PTO,2006). Jika setelah ada program penguatan terdapat peningkatan pendapatan maka program tersebut dapat dikatakan efektif. Kegiatan penguatan juga dapat mewujudkan profesionalitas dan keberlanjutan pengelolaan program Gerdu-Taskin.

Keberlanjutan UPK sendiri tergantung dari dana yang tersedia pada UPK. Ketersediaan dana di UPK sangat dipengaruhi oleh tingkat kolektibilitas pinjamannya. Ada empat kriteria tingkat kolektibilitas pinjaman yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Kolektibilitas pinjaman dapat digunakan oleh suatu lembaga keuangan untuk memantau kondisi pinjaman yang disalurkan oleh lembaga keuangan tersebut. Dengan diketahuinya kondisi kelancaran suatu pinjaman oleh lembaga keuangan akan memudahkan dalam hal melakukan suatu rencana penyaluran pinjaman. Semakin besar pinjaman lancar yang dimiliki suatu lembaga keuangan maka lembaga tersebut akan dapat semakin banyak menyalurkan pinjaman kepada masyarakat.

Di Kabupaten Blitar, kondisi kolektibilitas pinjaman UPK tergolong rendah. Dari 38 UPK yang ada di Kabupaten Blitar 9 UPK mempunyai kolektibilitas 0%, sedangkan hanya 5 UPK yang mempunyai kolektibilitas 100%, dan 24 UPK lainnya mempunyai kolektibilitas pinjaman 6,65%-99,34%. Apabila kondisi demikian berjalan terus akan berimplikasi pada kelancaran penyaluran pinjaman pada masyarakat, akibatnya perputaran dana akan berhenti. Untuk itu diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas pinjaman UPK Gerdu-Taskin. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil tindakan untuk mengatasi terjadinya tunggakan di UPK, sehingga keberlanjutan UPK dapat dipertahankan.

1.2. Perumusan Masalah

Sebagai suatu Lembaga Keuangan Mikro, Unit Pengelola Keuangan (UPK) memberikan kemudahan akses bagi pengusaha kecil dan masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan modal usaha. Karena UPK berada hampir setiap desa, sehingga masyarakat mudah untuk mengaksesnya. Peran dari UPK ini sangatlah berguna bagi pengusaha kecil dan masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya, sehingga keberadaan UPK harus dipertahankan keberlanjutannya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja UPK sehingga keberlanjutan tercapai, dilaksanakan program penguatan UPK. Program penguatan diberikan kepada UPK yang telah mendapatkan program awal. Kegiatan yang dilakukan dalam program penguatan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan UPK, penanganan aset bermasalah, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pengembangan usaha UPK dan Rumah Tangga Miskin (RTM). Dengan adanya program penguatan diharapkan kinerja UPK semakin meningkat dan produktivitas masyarakat juga tinggi sehingga pendapatan meningkat.

Peningkatan pendapatan di UPK penguatan dikarenakan rumah tangga miskin dapat memperoleh pinjaman lebih besar sehingga dapat meningkatkan skala usahanya. Sebagian besar rumah tangga miskin di UPK penguatan mempunyai skala usaha yang lebih besar daripada skala usaha rumah tangga di UPK non penguatan. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan pendapatan antara rumah tangga di UPK penguatan dengan rumah tangga di UPK non penguatan.

Untuk mempertahankan keberlanjutan UPK juga dipengaruhi oleh tingkat kolektibilitas pinjaman UPK. Permasalahan yang terjadi pada UPK di Kabupaten Blitar adalah masih banyaknya pinjaman dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet atau pinjaman bermasalah. Kriteria kolektibilitas pinjaman kategori kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran lebih dari satu bulan dan kurang dari dua bulan, jika jadwal angsurannya kurang dari satu bulan, terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 bulan dan kurang dari 6 bulan, jika jadwal angsurannya bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, tunggakan angsuran melampaui 6

bulan dan kurang dari 12 bulan, jika jadwal angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih, jika pembayarannya tanpa angsuran. Pembiayaan tersebut dikatakan kurang lancar jika : terdapat tunggakan margin antara 3-6 bulan, jika pembiayaan belum jatuh tempo, pembiayaan telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan. Kriteria kolektibilitas pinjaman kategori diragukan apabila pembiayaan tersebut tidak masuk kriteria kurang lancar, pembiayaan masih dapat diselamatkan dan jaminannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang, pembiayaan tidak dapat diselamatkan, tetapi jaminannya bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang, sedangkan kriteria kolektibilitas pinjaman macet adalah pembiayaan tersebut tidak memenuhi kriteria lancar dan diragukan, memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan biaya.

Untuk mengatasi pinjaman bermasalah tersebut diperlukan langkah-langkah penanganan antara lain: memanggil Pokmas/pemanafaat yang memiliki pinjaman bermasalah untuk membuat kesepakatan ulang tentang cara pengembalian pinjaman. Kesepakatan cara pengembalian pinjaman dapat dilakukan dengan cara penjadwalan ulang (*rescheduling*) dan penyitaan aset/jaminan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kolektibilitas pinjaman salah satunya adalah faktor sosial ekonomi nasabah. Kondisi sosial ekonomi yang berbeda akan memperlihatkan respon yang berbeda. Pada suatu masyarakat tertentu kesadaran untuk mengembalikan pinjaman sangat tinggi, tetapi pada masyarakat atau sistem sosial yang lain dapat terjadi hal yang sebaliknya. Kondisi sosial ekonomi yang ada pada masyarakat miskin seperti pendidikan yang rendah, produktivitas rendah, tingkat teknologi yang digunakan masih sederhana dan keterbatasan modal mempengaruhi kesadaran akan kewajibannya mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Dengan demikian, faktor sosial ekonomi perlu diperhatikan untuk mengurangi terjadinya penunggakan.

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan pertanyaan pokok penelitian sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan pendapatan rumah tangga di UPK penguatan dan UPK non penguatan?
2. Apakah ada hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan kolektibilitas pinjaman?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perbedaan pendapatan rumah tangga di UPK penguatan dan UPK non penguatan.
2. Menganalisis hubungan faktor sosial ekonomi dengan kolektibilitas pinjaman UPK Gerdu-Taskin.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai informasi dan pertimbangan bagi pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) dalam upaya peningkatan kinerja dan pengembangan UPK menuju kemandirian.
2. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi instansi terkait dalam pembuatan kebijakan dalam upaya pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.
3. Memberikan bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Peninjauan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang diambil diharapkan dapat membantu penulis dalam mengarahkan penelitian yang akan dilakukannya. Dalam penelitian ini penulis mengambil tema tentang dampak suatu program terhadap peningkatan pendapatan dan faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pengembalian pinjaman. Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang dijadikan referensi tentang dampak suatu program terhadap peningkatan pendapatan masyarakat adalah penelitian yang dilakukan Hasyim (1992), Wilopo (1996) dan Syamsulbahri (1992). Sedangkan tinjauan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian pinjaman adalah penelitian dari Simatupang (2005), Susanti (2006), Makmur (1998) dan Yusuf (1984).

Menurut hasil penelitian Hasyim (1992) menunjukkan bahwa pemberian Kredit Usaha Tani (KUT) dari BRI kepada petani di desa Pandanrejo, Batu berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan. Dengan menggunakan analisis uji beda rata-rata diketahui bahwa terdapat perbedaan nyata antara pendapatan petani KUT dan non KUT. Pendapatan petani KUT lebih tinggi dibanding dengan pendapatan petani non KUT.

Dengan metode penelitian eksploratif dengan wawancara secara mendalam, telaah data dan pengamatan lapang Wilopo (1996) menyimpulkan bahwa pemberian bantuan IDT dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga cukup menutupi kebutuhan minimum konsumsi dan biaya sekolah. Peningkatan pendapatan tersebut diperoleh dari suntikan dana yang digunakan sebagai pengembangan usaha.

Hasil penelitian Syamsulbahri (1992) menjelaskan bahwa pendapatan masyarakat dan taraf hidup masyarakat di RPH Kedungrejo, BKPH Pujon, KPH Malang meningkat setelah adanya program Perhutanan Sosial. Dengan melakukan wawancara kepada responden diketahui setelah adanya program Perhutanan Sosial tercipta kesadaran masyarakat disekitar hutan terhadap pentingnya hutan

dan manfaatnya sehingga dapat memberikan keuntungan finansial relatif lebih besar dari nilai upah lainnya.

Menurut hasil penelitian Simatupang (2005) dalam penelitiannya mengenai analisis usahatani sayuran dan faktor-faktor sosial ekonomi yang menyebabkan terjadinya tunggakan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) di Kecamatan Bumiaji Kota Batu menyatakan bahwa terjadinya tunggakan kredit Kupedes disebabkan oleh faktor sosial ekonomi petani. Adapun faktor sosial ekonomi meliputi pendidikan, *Dependency ratio*, luas lahan, penghasilan, biaya usahatani, *assesbility* dan pekerjaan sampingan. Terjadinya tunggakan kredit akan sangat merugikan petani karena jumlah hutang yang harus dibayar kepada pihak bank bertambah besar dan petani tidak dapat lagi mengajukan permohonan kredit lagi sebelum melunasi kreditnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Susanti (2006) mengenai faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi terjadinya tunggakan kredit Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K) fase III-RIGP di PT. BRI Persero cabang Magetan studi kasus di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan menyatakan bahwa penilaian 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*) mempengaruhi mekanisme pengajuan dan pengembalian kredit P4K. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa faktor ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap penunggakan kredit P4K adalah pendapatan RT, frekuensi keikutsertaan pertemuan kelompok dan pinjaman modal usaha lain. Sedangkan faktor yang tidak berpengaruh nyata terhadap penunggakan kredit adalah jumlah anggota keluarga, *Dependency Ratio*, penyalahgunaan kredit. Prinsip tanggung renteng dan macam usaha. Faktor sosial ekonomi yang memberikan pengaruh positif terhadap penunggakan kredit P4K adalah pinjaman modal usaha lain sedangkan variabel yang berpengaruh negative adalah pendapatan RT, jumlah anggota keluarga, *Dependency Ratio*, frekuensi keikutsertaan pertemuan kelompok, penyalahgunaan kredit, dan prinsip tanggung renteng.

Menurut hasil penelitian Makmur (1988) menunjukkan bahwa terjadinya tunggakan kredit ternyata disebabkan oleh tidak taatnya pelaksanaan dari kelima

syarat kredit. Untuk variabel Character pihak pemberi kredit tidak dapat menetapkan ukuran yang pasti sehingga pada sikap bahwa semua nelayan memiliki karakter baik. Keempat variabel yang lain yaitu *Capital*, *Condition of Economic*, *Capacity* dan *Collateral* mempunyai pengaruh yang kuat terhadap terjadinya tunggakan kredit, sekalipun dengan kekuatan yang berbeda-beda. Faktor *capital* merupakan faktor yang dominan mempengaruhi terjadinya tunggakan (0,532), sedang faktor yang paling kurang berpengaruh adalah *collateral* yang menunjukkan hubungan dengan tingkat rendah (0,231).

Sedangkan penelitian yang dilakukan Yusuf (1984) menyimpulkan bahwa faktor yang paling mendasar dari terjadinya penunggakan pada kredit Panca Usaha Ternak Potong (PUTP) adalah berasal dari petani peternak sendiri (62,96%) dengan kata lain peternak belum siap mental dan sikap dalam menerima program kredit yang berasal dari pemerintah. Mereka belum mengerti akan tujuan dan maksud pemberian kredit tersebut, sehingga tidak timbul rasa memiliki yang selanjutnya akan menimbulkan perasaan tanggung jawab terhadap pemeliharaan ternak dan pengembalian kredit. Faktor kedua adalah dari pihak lain yang semestinya ikut menyukseskan program pemerintah yaitu para pamong desa (25,93%). Para pamong desa mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap para warganya, dimana pengaruh sebagai *informal leader* jauh lebih besar dari pada pengaruh formal leader. Begitu besarnya pengaruh ini sehingga para peternak tidak bisa berbuat apa-apa bila sapi kreditannya diminta/dipinjam oleh para pamong desa ini walau mereka menyadari bahwa yang akan mananggung akibatnya adalah mereka sendiri. Faktor ketiga adalah kurang ketatnya di dalam menyeleksi para calon penerima kredit dan adanya kredit secara berpasangan.

Dari tinjauan penelitian terdahulu tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa peranan Penguatan UPK adalah adanya perbedaan pendapatan rumah tangga di UPK penguatan dengan UPK non penguatan dan juga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan faktor sosial ekonomi dengan kolektibilitas pinjaman.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberi kredit (kreditur) percaya penerima kredit (debitur) pada waktu yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu dan merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dan kontra prestasi (Suyatno,1990). Pengertian tersebut diperkuat oleh (Sinungan,1989) bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh pihak satu kepada pihak lain dan prestasi ini akan dikembalikan lagi pada suatu kontra prestasi berupa bunga.

Kredit menurut Undang-Undang No.14/tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang disamakan dengan itu, berdasarkan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, dalam hal ini pihak peminjam berkewajiban untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang yang telah ditentukan. (Sinungan,1983)

2.2.2 Tujuan Kredit

Dalam kehidupan perekonomian Bank memegang peranan yang sangat penting selaku lembaga keuangan yang membentuk pemerintah untuk mencapai kemakmuran, yang salah satu keinginannya adalah memberikan kredit atau membantu permodalan agar usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan lancar dan meraih kemampuan sehingga lembaga pemberi kredit Bank mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan dari pemungutan bunga yang diperoleh dari tabungan masyarakat. (Sinungan, 1983).

Tujuan kredit yang lain menurut Suyatno (2003) adalah :

1. Turut menyukseskan program pemerintah dibidanh ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar keberlangsungan hidup perusahaan dapat tercukupi.

2.2.3 Manfaat Kredit

Adapun manfaat pemberian kredit dapat dibedakan :

1. Manfaat kredit ditinjau dari sudut kepentingan kreditur
 - a. Relatif mudah diperoleh jika usahanya benar-benar fleksibel
 - b. Biaya untuk memperoleh kredit dapat diperkirakan dengan tepat. Sehingga memudahkan para pengusaha dalam menyusun rencana kerjanya untuk masa depan.
 - c. Rahasia keuangan debitur akan terjamin dan lebih terlindungi dengan adanya Undang-Undang Pokok Perbankan.
 - d. Dengan kredit yang fleksibel memungkinkan para debitur untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.
 - e. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi perusahaan debitur.
2. Manfaat kredit ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat luas

Masyarakat luas sebenarnya tidak mempunyai kepentingan langsung atas kegiatan perkreditan yang diberikan oleh perbankan, namun ada kepentingan yang tidak langsung yang diharapkan dapat dinikmati masyarakat dari perkreditan yang dilakukan oleh perbankan, antara lain :

 - a. Dengan adanya kelancaran dari proses perkreditan diharapkan akan diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga memberi lapangan pekerjaan baru sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan seminimal mungkin.
 - b. Masyarakat penguasaha akan sangat berkepentingan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dengan cara atau prosedur yang mudah, cepat dan biaya relatif murah.
 - c. Bagi para pengelola pasar modal, kebijakan terutama tentang suku bunga kredit akan sangat bermanfaat dalam penyusunan perencanaan kegiatan.
 - d. Dengan semakin banyak proyek dan perusahaan yang dibuka karena memperoleh fasilitas kredit, maka semakin menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

3. Manfaat kredit ditinjau dari sudut pandang pemerintah

Apabila kredit ini diarahkan, semestinya akan merupakan alat yang bermanfaat untuk mengatur suatu sistem perekonomian guna mencapai berbagai tujuan ekonomi yang diinginkan pemerintah. Kepentingan pemerintah dari perkreditan antara lain :

a. Perkreditan dapat digunakan sebagai alat untuk memacu terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum maupun pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu.

b. Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter sehingga pemberian kredit yang berlebihan dari suatu sistem perbankan akan bersifat inflator.

c. Kredit sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha

Dengan tersedianya faktor-faktor produksi yang lengkap akan memberikan peluang kesempatan kegiatan bisnis bagi pihak yang mempunyai faktor-faktor produksi tersebut, sehingga dengan adanya kegiatan usaha yang baru akan menyerap tenaga kerja.

d. Pemberian kredit sebagai alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

e. Perkreditan sebagai sumber pendapatan negara

Dalam hal pembagian laba baik dari pembayaran pajak pendapatan maupun dari pembagian laba setelah pembayaran pajak tersebut, pemerintah mempunyai hak yang paling besar proporsinya , sehingga pemberian kredit dari bank pemerintah merupakan sumber pendapatan bagi negara.

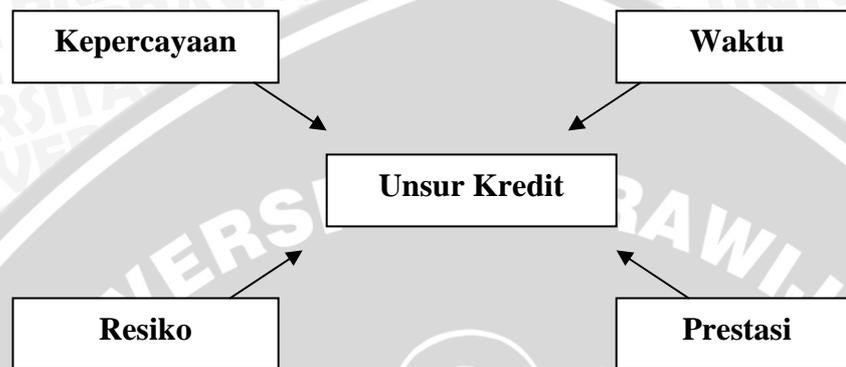
f. Penciptaan pasar

Perkreditan memperbesar volume produksi serta memperluas pola konsumsinya. Hal ini akan memberikan pengaruh terciptanya kegiatan pasar, sehingga akan meningkatkan volume perdagangan di suatu kelompok masyarakat. (Simatupang, 2004)

2.2.4 Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit

kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. (Suyatno, 1991)



Gambar 1. Skema Unsur Kredit
Sumber : Suyatno,1991.Dasar-Dasar Perkreditan

Menurut Sinungan (1983), unsur-unsur kredit adalah :

1. Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi (uang, jasa atau barang) yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali di masa tertentu yang akan datang.
2. Waktu
Bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu masa / waktu tertentu.
3. Degree of risk
Bahwa pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat resiko. Resiko timbul bagi pemberi karena uang/jasa/ barang yang berupa prestasi telah lepas kepada orang lain.
4. Prestasi
Yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di masa modern yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

2.2.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit

Pada dasarnya prinsip yang dipakai dalam penilaian atau menganalisis calon debitur kredit merupakan prinsip pemberian kredit yang sudah umum dikenal dengan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, condition, collateral* (BRI,1995) sebagai berikut :

1. *Character*

Sifat pribadi dan perilaku peminta kredit perlu diteliti oleh pemberi kredit. Riwayat pemohon diselidiki dengan seksama mengenai kejujuran dalam melaksanakan kewajibannya di masa lalu, kecenderungannya untuk bertindak merugikan orang lain, keluarga, kebiasaan dan sifat dalam pergaulan adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi ketersediaannya untuk membayar kembali kredit yang akan diperolehnya. Resiko yang diperkirakan dari faktor ini dinamakan “resiko moral” pada dasarnya sukar dinilai. Calon peminjam harus memberikan kesempatan kepada pemberi untuk memperoleh bahan penelitian terhadap resiko moral tersebut.

2. *Capacity*

Tidak cukup bagi kreditur untuk mengetahui kejujuran calon debiturnya saja. Seorang debitur harus mempunyai kemampuan membayar. Hal ini tergantung pada tingkat penghasilan yang dimilikinya. Hal-hal yang menentukan kemampuan tersebut antara lain keahlian, keterangan umur, dan kesehatan badan.

3. *Capital*

Modal yang ada pada debitur pada hakekatnya akan mengurangi resiko kreditur. Syarat bahwa calon peminjam harus telah menyediakan modal sendiri mendorong calon peminjam untuk berusaha dengan sebaik-baiknya. Sejauh mungkin biaya investasi dipenuhi oleh peminjam dan kreditur, sedapat mungkin membantu dalam modal lancar.

4. *Condition of economic*

Pemberian kredit tergantung dari sebagian lingkungan ekonomi yang telah bersifat eksternal dapat merupakan hambatan. Sebagai contoh apabila terjadi peningkatan harga karena inflasi, kapital akan dihamburkan tetapi karakter

pun menunjukkan kecenderungan memburuk. Iklim politik, kemajuan administratif ekonomi, perubahan undang-undang dan peraturan administratif dan putusan-putusan perkreditan dapat mempengaruhi tingkat resiko kredit.

5. *Collateral*

Istilah ini berarti jaminan tambahan karena pada hakekatnya jaminan utama bagi keselamatan kredit adalah pribadi yang dinilai baik di atas. Collateral merupakan benteng terakhirnya bagi keselamatan kredit. Antara pemberian kredit dan pembayaran kembali terdapat penundaan waktu, maka dalam jangka waktu itu dapat terjadi sesuai yang tidak diharapkan sehingga akhirnya kredit tidak terbayar tepat menurut perjanjian. Masalah jaminan merupakan masalah yang penting untuk diperhatikan agar kredit yang diberikan aman dalam arti pada waktunya pasti dibayar lunas.

2.2.6 Macam-macam Kredit

Menurut Sinungan (1983) kredit dibedakan menjadi beberapa macam :

1. Macam kredit menurut sifat penggunaannya

a. Kredit Konsumtif

Kredit ini dipergunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Kredit Produktif

Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Tegasnya kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produktif, perdagangan maupun investasi.

2. Macam kredit menurut keperluannya

a. Kredit Produksi /eksploitasi

Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kualitas/mutu hasil produksi.

b. Kredit Perdagangan

Kredit ini diperlukan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

c. Kredit Investasi

Adalah kredit yang diberikan Bank untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitas, perluasan usaha ataupun mendirikan suatu proyek baru.

3. Macam kredit menurut jangka waktu

Perbedaan menurut jangka waktu kredit di Indonesia, disesuaikan dengan pengertian menurut peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu selama-lamanya satu tahun. Jadi pemakaian tidak boleh lebih dari satu tahun.

b. Kredit jangka menengah

Yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai dengan tiga tahun.

c. Kredit jangka panjang

Adalah kredit yang jangka waktunya melebihi satu tahun.

4. Macam kredit menurut cara pemakaiannya

a. Kredit Rekening Koran Bebas

Debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan *blanko cheque* dan rekening koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang diberikan . debitur atau nasabah bebas melakukan penarikan-penarikan ke dalam rekening bersangkutan selama kredit berjalan.

b. Kredit Koran Terbatas

Dalam sistem ini terdapat suatu pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan-penarikan uang via rekeningnya. Nasabah dilarang untuk melakukan penarikan uang sekaligus tetapi secara teratur serta disesuaikan dengan kebutuhannya.

c. Kredit Rekening Koran Aflopend

Penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah.

d. Revolving Credit

Sistem penarikan kredit sama dengan cara Rekening Koran bebas dengan masa penggunaannya satu tahun. Tetapi cara pemakaiannya berbeda.

e. Term Loan

Term loan hampir sama dengan Rekening Koran bebas tetapi penggunaan dan pemakaiannya sangat fleksibel artinya nasabah bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja.

5. Macam kredit menurut jaminannya

a. *Unsecured Loans*

Yaitu kredit yang diberikn tanpa adanya jaminan . yang dimaksud jaminan adalah jaminan fisik. Tetapi dalam kredit ini jaminan atas kredit dimaksud adalah bonafiditas dan prospek usaha.

b. *Secured Loans*

Yaitu kredit yang penilaiannya lengkap dalam arti segala aspek penilaian turut dipertimbangkan termasuk *Collateral* (jaminan).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kolektibilitas Kredit

2.3.1. Pengertian Kolektibilitas Kredit

Menurut Suyatno (2003) kolektibiliras kredit adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali kredit yang disalurkan. Semakin tinggi presentase kolektibilitas kredit lancar dari suatu bank maka semakin besar pula kemampuan bank tersebut untuk menjalankan fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Menurut Sinungan (1995) kolektibilitas kredit sangat berguna bagi perbankan dalam usaha penggolongan kredit. Dimana kredit yang disalurkan oleh bank digolongkan dalam kolektibilitasnya sesuai dalam kriteria-kriteria penggolongannya. Pengelompokan kredit berdasarkan keadaan dan kelancarannya sangat perlu dilakukan demi kelancaran tugas-tugas pengamanan fasilitas yang telah diberikan kepada para nasabah.

2.3.2. Kriteria Penilaian Kolektibilitas Kredit

Penentuan suatu kolektibilitas kredit didasarkan pada hal-hal berikut :

1. Faktor Kuantitatif, yaitu keadaan pemban pembayaran kredit oleh debitur yang terlihat pada catatan pembukuan suatu bank atau lembaga keuangan, yaitu ketepatan pembayaran pokok dan bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya. Penggunaan kriteria ini bersifat reaktif (berdasarkan data yang telah lalu) dan *facility oriented* (bukan *customer oriented*).
2. Faktor Kualitatif, yaitu pertimbangan atas kesehatan usaha debitur. Dalam hal ini yang dinilai adalah kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman dari hasil usahanya (sebagai *first way out*) sesuai dengan perjanjian. Penilaian terhadap usaha nasabah tidak hanya didasarkan pada kinerja usaha sekarang tetapi juga atas prospek usahanya dimasa yang akan datang. Dengan demikian penggunaan kriteria ini bersifat proaktif dan *customer oriented*.

Karena adanya dua kriteria penilaian yang berbeda tersebut diatas, maka kolektibilitas kredit dibedakan menjadi kolektibilitas rekening dan kolektibilitas debitur.

1. Kolektibilitas Rekening (*Account*)

Diperoleh dengan menilai keadaan pembayaran pokok, angsuran pokok maupun bunga dan kewajiban lainnya dari masing-masing rekening (pinjaman) yang diberikan kepada seorang nasabah. Berdasarkan hasil penilaian terhadap masing-masing rekening fasilitas kredit dapat ditentukan kolektibilitas kredit yaitu

- a. Lancar
- b. Kurang Lancar
- c. Diragukan
- d. Macet

Dengan demikian, bisa terjadi adanya berbagai macam kolektibilitas untuk masing-masing fasilitas kredit yang diterima oleh seorang debitur. Kolektibilitas rekening dipergunakan sebagai dasar untuk :

- a. Laporan ke Bank Indonesia atau pihak ketiga lainnya.
- b. Menentukan Cadangan Aktiva Produktif (CAP) yang harus dibentuk.

2. Kolektibilitas Debitur

Kolektibilitas debitur ditentukan berdasarkan penilaian atas usaha nasabah (kinerja sekarang dan prospeknya dimasa yang akan datang). Penilaian kolektibilitas kredit berdasarkan debitur ini digunakan untuk :

- a. Memenuhi tuntutan tata cara penilaian kolektibilitas dari BI
 - b. Menentukan kualitas kredit debitur secara keseluruhan.
 - c. Menentukan wewenang putusan kredit berdasarkan tingkat kolektibilitasnya.
- (BRI, 1995)

2.3.3. Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Tingkat kesehatan bank merupakan hal terpenting yang harus diusahakan oleh menejemen bank, selanjutnya pengelola bank diharuskan memantau keadaan kualitas aktiva produktif yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatannya. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tingkat kolektibilitasnya. Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan. Ukuran utamanya adalah ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan.

Di Indonesia berdasarkan edaran Bank Indonesia No 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 kolektibilitas kredit digolongkan menjadi 4 golongan yaitu :

- Golongan I : Pinjaman (kredit) lancar
- Golongan II : Pinjaman (kredit) kurang lancar
- Golongan III : Pinjaman (kredit) diragukan
- Golongan IV : Pinjaman (kredit) macet.

Kriteria masing-masing golongan kredit secara ringkas sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Kolektibilitas Kredit Berdasarkan Edaran BI No 26/4/BPPP tahun 1993

Kolektibilitas (Golongan)	Kredit dengan Angsuran	Kredit tanpa Angsuran
Golongan I (Lancar)	1. Tidak ada tunggakan angsuran pokok, bunga dan cerukan karena penarikan 2. Ada tunggakan pokok tetapi belum melampaui: a. Satu bulan untuk kredit	1. Kredit belum jatuh tempo dan tidak ada tunggakan bunga. 2. Kredit belum jatuh tempo dan ada tunggakan bunga tetapi belum melampaui

	<p>dengan masa angsuran bulanan, 2 bulanan atau 3 bulanan</p> <p>b. Tiga bulan untuk kredit dengan masa angsuran bulanan, 2 bulanan atau 3 bulanan.</p> <p>c. Enam bulan untuk kredit dengan masa angsuran 4 bulan atau lebih.</p> <p>3. Ada tunggakan bunga tetapi belum melampaui :</p> <p>a. Satu bulan untuk kredit dengan masa angsuran kurang dari satu bulan.</p> <p>b. Tiga bulan untuk kredit dengan masa angsuran lebih dari 1 bulan.</p> <p>c. Ada cerukan rekening giro tetapi belum melampaui 15 hari kerja.</p>	<p>3 bulan.</p> <p>3. Kredit telah jatuh tempo dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang.</p> <p>4. Ada cerukan karena penarikan tetapi belum melampaui 15 hari kerja.</p>
<p>Golongan II (Kurang Lancar)</p>	<p>1. Ada tunggakan angsuran pokok</p> <p>a. Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 3 bulan untuk kredit angsuran.</p> <p>b. Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan untuk kredit dengan angsuran 2 atau 3 bulan.</p> <p>c. Melampaui 6 bulan dan belum melampaui 12 bulan untuk kredit yang masa angsurannya 4 bulan atau lebih.</p> <p>2. Ada cerukan karena penarikan yang jangka waktunya melampaui 15 hari tetapi belum melampaui 30 hari kerja.</p> <p>3. Ada tunggakan bunga :</p> <p>a. Melampaui 1 bulan dan belum 3 bulan untuk kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan.</p> <p>b. Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan</p>	<p>1. Kredit belum jatuh tempo dan :</p> <p>a. Ada tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan.</p> <p>b. Ada penambahan plafon.</p> <p>2. Kredit telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan.</p> <p>3. Ada cerukan karena penarikan yang telah melampaui 30 hari kerja.</p>

	untuk kredit dengan masa angsuran lebih dari 1 bulan.	
Golongan III (Diragukan)	Tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian tepat disimpulkan : a. Kredit masih dapat diselamatkan dan agunan bernilai minimal 75% dari hutang debitur. b. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi nilai agunan minimal 100% dari hutang debitur.	Kriteria sama dengan kredit dengan angsuran.
Golongan IV (Macet)	1. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan. 2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan untuk usaha penyelamatan kredit. 3. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang negara atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi.	Kriteria sama dengan kredit dengan angsuran.

Sumber : Sabil, 2004

2.3.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kolektibilitas Kredit

1. Faktor Finansial

- a. Pendapatan bersih menurun
- b. Hutang meningkat
- c. Setiap adanya pelanggaran perjanjian kredit
- d. Sering terlambat mengangsur
- e. Pos-pos dalam laporan keuangan meningkat sangat tajam
- f. Laba kotor berkurang
- g. Struktur biaya yang tidak bersaing

- h. Penyimpangan dari pola pinjaman yang normal
 - i. Penarikan kas (dividen/prive) yang berlebihan
 - j. Penarikan kas yang tidak terpenuhi
 - k. Kesulitan menambah/meningkatkan hutang/pinjaman
 - l. Sering mengajukan permohonan untuk pembiayaan kembali atau penundaan angsuran yang jatuh tempo
 - m. Penolakan kredit oleh kreditur lain
2. Faktor-Faktor Manajemen
- a. Perubahan pimpinan dan/atau para kreditur
 - b. Manajemen penerus/pengganti lemah
 - c. Manajemen puncak didominasi oleh orang-orang yang kurang cakap
 - d. Leverage operasional yang tinggi, yaitu biaya tetap yang tinggi
 - e. Tidak adanya pemisahan yang jelas antara urusan-urusan, rekening pribadi dan bisnis
 - f. Gaya hidup mewah baik pribadi maupun perusahaan (terutama perusahaan baru).
 - g. Lemah dalam perencanaan sukar berkembang dan menyesuaikan diri jika pasar berubah
 - h. Rendahnya semangat dalam berusaha, kurang pemeliharaan, penurunan mutu produk dan jasa, dsb
 - i. Sering terjadinya pergantian staff, kekurangan staf atau staf yang berkualitas rendah
 - j. Lebih terlihat kecongkakan dari pada kerjasama
3. Faktor Ekstern
- a. Peraturan/perundangan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan, operasi atau manajemen peminjam
 - b. Kenaikan yang tajam dalam harga BBM dan biaya energi lainnya.
 - c. Kenaikan tingkat inflasi yang tajam
 - d. Resesi, berdampak menurunnya daya beli konsumen dan penurunan investasi
 - e. Perubahan teknologi yang cepat dalam industri yang ditekuni nasabah
 - f. Persaingan yang meningkat

g. Devaluasi

(BRI, 1995)

Sebab-sebab menunggak menurut nasabah :

1. Pemasaran sulit

Maksudnya adalah kesulitan dalam memasarkan barang-barang produksi atau dagangan dapat pula akibat dari nasabah tidak mengetahui bagaimana cara memasarkan barang-barang tersebut.

2. Kalah bersaing

Yang dimaksudkan adalah karena kesulitan dalam menjual barang, hal tersebut dapat terjadi karena: nasabah menjual dengan harga terlalu mahal dibandingkan pesaing, kualitas barang jelek, adanya barang pengganti dengan mutu lebih baik lebih menarik, mungkin juga karena nasabah dalam menjual barangnya service kurang baik.

3. Kesulitan memperoleh bahan baku

Maksudnya adalah terutama bagi usaha industri, tetapi dapat pula terjadi pada sektor lain yang mengalami kesulitan memperoleh bahan dasar untuk kelancaran industri dan usaha lain. Misalnya kesulitan memperoleh kulit, untuk industri sepatu, atau kuningan bagi usaha pengecoran, bagi usaha tambak kesulitan memperoleh nener dsb.

4. Pengaruh musim

Maksudnya adalah akibat pengaruh alam, angin, kekeringan, banjir, kegagalan akibat serangan hama dll.

5. Kesulitan penagihan

Maksudnya akibat adanya piutang yang sulit ditagih, pada pihak ke III atau langganan/orang lain. Sebutkan jumlahnya berapa, kapan terjadinya dan pada siapa.

6. Hutang diluar Bank

Maksudnya adalah nasabah terjerat hutang kepada pihak ke III diluar bank, mungkin karena pinjam uang dari rentenir dengan bunga tinggi, karena hutang arisan yang banyak jumlahnya.

7. Ditipu.

8. Adanya investasi baru

Yang dimaksudkan adalah kemacetan usaha nasabah akibat adanya investasi baru misalnya untuk membangun rumah, membangun gudang yang terlalu besar sehingga modal usaha nasabah banyak terserap oleh investasi tersebut. Dapat pula adanya pengembangan usaha baru namun mengalami kegagalan.

(BRI, 1988)

2.4. Tinjauan Umum Tentang Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin)

Pemerintah Jawa Timur menempatkan program penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu dari 7 prioritas pembangunan Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2008. Arah Kebijakan program ini difokuskan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi RTM, pengurangan beban dan perbaikan mutu hidup kelompok miskin rentan dan penguatan kapasitas kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan.

Prioritas program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) diarahkan untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang terjadi dengan fokus kegiatan TRIDAYA meliputi : (i) pemberdayaan manusia, (ii) pemberdayaan usaha, dan (iii) pemberdayaan lingkungan. Program Gerdu-Taskin lebih diarahkan kepada pola pengembangan dan pengelolaan program yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Keterpaduan diwujudkan melalui pengembangan pola penanganan program yang dimulai dari Tahap Awal yang dilanjutkan dengan Tahap Penguatan dan Tahap Pemandirian, yang dilakukan secara selektif pada Desa/Kelurahan lokasi.

Adapun tujuan dari Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) adalah :

1. Tujuan Umum

Program Gerdu Taskin bertujuan mewujudkan kemandirian masyarakat, melalui pendekatan Tridaya dengan fokus utama penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan peran serta aktif RTM dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab.
- b. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi RTM Berpotensi.
- c. Mengembangkan berbagai pola perluasan lapangan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kualitas rumah tinggal dalam rangka mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup bagi RTM Rentan.
- e. Mengoptimalkan fungsi fasilitas umum Desa/ Kelurahan sebagai investasi yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan.
- f. Menguatkan kapasitas kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal sebagai pengelola program penanggulangan kemiskinan maupun pengelolaan pembangunan desa / kelurahan pada umumnya.
- g. Mengoptimalkan kemitraan antar-Stakeholders dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan secara partisipatif.

Secara umum ruang lingkup Program Gerdu Taskin meliputi :

1. Tahap Awal

Tahap Awal Gerdu-Taskin dialokasikan pada lokasi baru pada Desa/Kelurahan miskin. Program ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan Tridaya, meliputi :

a. Pemberdayaan Manusia

Tujuan utama pemberdayaan manusia adalah pelayanan kebutuhan dasar dengan orientasi pada peningkatan mutu kehidupan, pengurangan beban hidup dan peningkatan kesejahteraan RTM-R. Kegiatan pemberdayaan manusia meliputi:

- Penyediaan seragam sekolah, alat tulis, dan buku penunjang bagi anak keluarga RTM-R.
- Bantuan sarana pendidikan bagi lembaga yang tidak memperoleh bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS), seperti bangku, alat peraga pendidikan, buku, alat olahraga, dan tidak diperbolehkan untuk bangunan fisik atau rehab besar.
- Perbaikan gizi keluarga RTM-R, seperti pemberian makanan tambahan untuk anak Balita/Lansia dan dapat diberikan melalui Posyandu Balita/Lansia.
- Pemberian makanan tambahan tidak boleh dalam bentuk beras karena sudah ada Raskin (beras untuk orang miskin).
- Lain-lain kegiatan untuk meringankan beban hidup RTM-R, tapi tidak boleh dalam bentuk pemberian ternak, fasilitas dan perlengkapan rumah tinggal.

b. Pemberdayaan Usaha

Tujuan utama pemberdayaan usaha adalah pengembangan usaha ekonomi produktif dan peningkatan pendapatan kelompok miskin serta penciptaan kesempatan kerja terutama bagi RTM Berpotensi. Bentuk usaha ekonomi produktif yang dikembangkan meliputi usaha simpan pinjam (USR) dan usaha sektor riil (USR). Kegiatan pemberdayaan usaha meliputi:

- Pengembangan Usaha Simpan Pinjam
- Pengembangan Usaha Sektor Riil dapat berupa usaha yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, produksi barang, kegiatan pertanian, peternakan dan lain-lain kegiatan usaha dengan terlebih dahulu dilakukan analisis kelayakan usaha untuk memastikan prospek yang menguntungkan.

c. Pemberdayaan Lingkungan

Tujuan utama pemberdayaan lingkungan adalah penyediaan atau perbaikan prasarana rumah tinggal RTM-R dan lingkungannya, peningkatan fasilitas umum serta pengembangan prasarana/sarana ekonomi desa sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan pemberdayaan lingkungan diprioritaskan untuk:

- Prioritas 1 : Penyediaan prasarana rumah tinggal RTM-R seperti rehab/perbaikan rumah, penyediaan jamban keluarga, pengadaan air bersih dan lain-lain.
- Prioritas 2 : Pengembangan sarana/ prasarana desa, seperti pasar desa, tempat pelelangan ikan, tambatan perahu, saluran irigasi dan lain-lain.
- Prioritas 3 : Penyediaan dan peningkatan fasilitas umum seperti : jalan, jembatan, gorong-gorong, MCK, dan sanitasi lingkungan.
- Dipilih kegiatan padat karya yang benar-benar memberikan dampak optimal bagi pengurangan jumlah pengangguran desa.
- Pilih kegiatan yang mampu menyerap tenaga kerja pada saat konstruksi maupun pasca konstruksi.
- Pengembangan swadaya teruama kalangan non-RTM

2. Tahap Penguatan,

Tahap Penguatan dialokasikan pada sejumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan Program Gerdu-Taskin sebelumnya. Tahap Penguatan antara lain meliputi :

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan UPK

Peningkatan kapasitas kelembagaan UPK di arahkan pada kegiatan fasilitas yang bertujuan untuk pembenahan: (i) struktur dan personalia pengurus, (ii) penyempurnaan AD/ART, (iii) peningkatan kapasitas manajemen organisasi, (iv) peningkatan legalitas lembaga sebagai BUMDes, (v) jaringan kerjasama antar UPK.

b. Peningkatan Kapasitas SDM

Tujuan utama dalam peningkatan Kapasitas SDM adalah menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan pengurus UPK, pokmas dan RTM.

c. Pengembangan Usaha UPK

Pengembangan usaha UPK merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja usaha UPK dalam rangka mempersiapkan UPK sebagai BUMDes. Pengembangan usaha UPK meliputi : (i) usaha simpan pinjam, (ii) usaha sektor riil, dan (iii) usaha ekonomi produktif pokmas.

d. Pengembangan Usaha RTM

Sasaran pengembangan usaha RTM meliputi : (i) individu, (ii) pokmas, (iii) kelompok usaha bersama (KUBe). Kegiatan pengembangan usaha RTM meliputi : (i) penguatan kelompok, (ii) permodalan, (iii) pembinaan produksi, (iv) pemasaran, (v) teknologi dan (vi) jaingan kemitraan.

e. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha UPK

Pengembangan sarana prasarana UPK dilakukan untuk meningkatkan kelengkapan fisik organisasi yang menjadi prioritas kebutuhan dalam mendukung operasionalisasi kegiatan usaha dan kinerja UPK.

f. Pengembangan Sistem Keterjaminan Sosial melalui UPK

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan UPK dalam membangun sistem keterjaminan sosial secara mandiri dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan melalui penyisihan SHU maupun pendayagunaan potensi masyarakat Desa/Kelurahan lokasi program seperti zakat, infaq, sodaqoh maupun bantuan sosial lainnya.

3. Tahap Pemandirian,

Tahap Pemandirian dialokasikan pada Desa/Kelurahan lokasi Tahap Penguatan dan memiliki UPK berkategori SEHAT. Pengelolaan tahap ini dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan berbagai bentuk kegiatan pembinaan sesuai dengan karakteristik masalah dan kebutuhan masing-masing. Beberapa kegiatan dalam tahap pemandirian antara lain meliputi : (i) pembentukan UPK menjadi BUMDes, (ii) pengembangan akses permodalan, manajemen, teknologi, pemasaran, dan (iii) bantuan teknis (*technical assistance*). Sedangkan Pemerintah Propinsi berperan memberikan fasilitasi, monitoring dan evaluasi.

4. Manajemen Program

Manajemen Program dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya prinsip dan mekanisme yang telah ditetapkan serta menjaga mutu pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berhasil secara optimal. Kegiatan manajemen program meliputi : koordinasi, orientasi, sosialisasi, pelaporan, pengawasan, pengaduan dan penanganan masalah, pemantauan, evaluasi serta bantuan teknis.

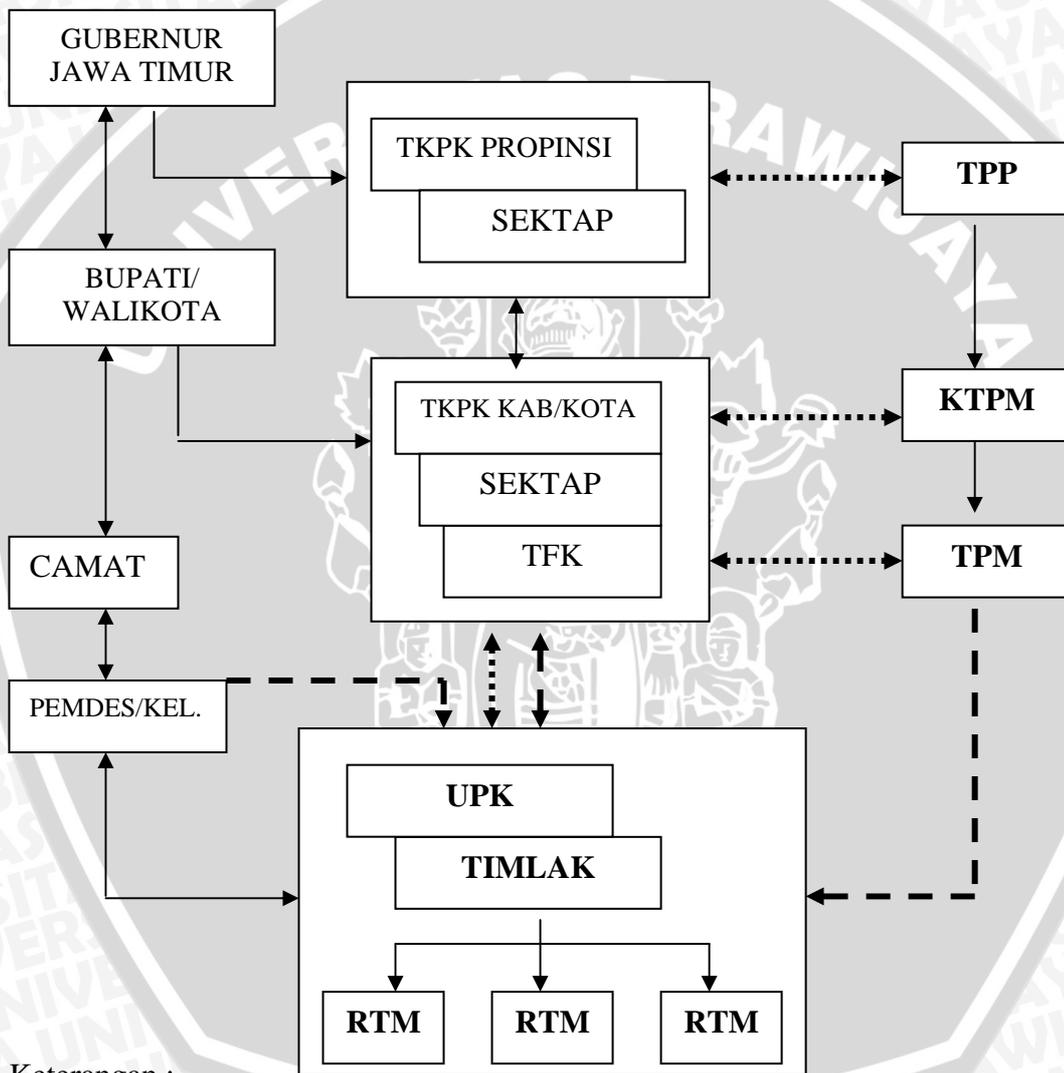
6. Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilaksanakan guna memfasilitasi program sehingga dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme kegiatan, baik untuk Tahap Awal, Tahap Penguatan maupun Tahap Pemandirian. Sasaran pendampingan meliputi pengelola program Gerdu-Taskin mulai dari Propinsi, Kabupaten/Kota sampai pada tingkat Desa/Kelurahan. (Pedoman Umum Program Gerdu Taskin ,2007).

Dalam penetapan alokasi Program Gerdu-Taskin menggunakan acuan hasil PKBI BPS Jawa Timur Tahun 2001 yang dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan landasan gerak operasional yang digunakan dalam Program Gerdu-Taskin berlandaskan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : partisipasi, keswadayaan, transparan dan akuntabel, keterpaduan, otonomi dan desentralisasi, peningkatan peran dan kapasitas kaum perempuan, dan keberlanjutan. (Pedoman Umum Program Gerdu-Taskin,2006 :6,12).

Dalam pengelolaan Gerdu-Taskin secara langsung dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK). Hal ini sekaligus untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsi KPK Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mengembangkan berbagai kebijakan dan penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Di tingkat propinsi organisasi pengelolanya terdiri dari : (1) Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Propinsi, (2) Sekretariat Tetap (Sektap) Propinsi, dan (3) Tim Pendamping Propinsi (TPP). Organisasi pengelola di tingkat Kabupaten/ Kota terdiri atas : (1) Komite Penangglangan Kemiskinan (KPK) Kabupaten/Kota, (2) Sekretariat Tetap (Sektap) Kabupaten/Kota, (3)

Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM), (4) Tim Fasilitasi Kecamatan (TFK), dan (5) Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Dan organisasi pengelola pada tingkat desa/ kelurahan antara lain : (1) Unit Pengelola Keuangan (UPK), (2) Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan (3) Tim Pelaksana (Timlak). Hubungan fungsional dan struktural antar organisasi pengelola program Gerdu-Taskin diatas dapat diskemakan sebagaimana Gambar 2 di bawah ini.



Keterangan :



Garis hubungan struktural



Garis hubungan konsultasi dan koordinasi



Garis hubungan fasilitasi dan pendampingan

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Pengelola Program Gerdu-Taskin

Untuk mekanisme kegiatan tahap awal Program Gerdu Taskin, meliputi tahap-tahap : sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelestarian. (Pedoman Umum Program Gerdu-Taskin,2007).

1. Sosialisasi, pada dasarnya dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan, baik formal maupun informal. Sosialisasi dilaksanakan mulai dari tingkat propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan dengan menggunakan berbagai media sesuai dengan karakteristik lokal. Tujuan dari adanya sosialisasi adalah memberikan penjelasan tentang Program Gerdu-Taskin.
2. Perencanaan, dilakukan melalui rangkaian kegiatan yang meliputi : klarifikasi rumah tangga miskin, klasifikasi rumah tangga miskin, identifikasi kebutuhan, musdes perencanaan, penulisan usulan desa/kelurahan, verifikasi usulan.
3. Pelaksanaan, dalam pelaksanaan ini terbagi dalam 4 tahapan diantaranya : pencairan dana, persiapan pelaksanaan, lokakarya pra pelaksanaan kabupaten/kota, dan pelaksanaan yaitu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan manusia, pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam, pelaksanaan kegiatan usaha sektor riil, dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lingkungan.
4. Pertanggungjawaban, Program Gerdu Taskin dipertanggungjawabkan dalam bentuk pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban publik. Adapun forum pertanggungjawaban pelaksanaan program Gerdu-Taskin, terdiri dari: musdes pertanggungjawaban, publikasi, dan rakor evaluasi kabupaten/kota.
5. Pelestarian, hasil-hasil kegiatan program Gerdu-Taskin merupakan aset desa/kelurahan yang dikelola secara lestari dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat terutama RTM.

Sedangkan mekanisme kegiatan tahap penguatan program Gerdu-Taskin, meliputi: sosialisasi, musyawarah pengembangan UPK (musbang UPK), pemetaan UPK, konsolidasi UPK, perencanaan, dan pertanggungjawaban dan pelestarian.

1. Sosialisasi, bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kegiatan penguatan UPK dan membangun komitmen dari berbagai pihak. Sosialisasi secara formal dilaksanakan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Musyawarah Pengembangan UPK (Musbang UPK), bertujuan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan tahap penguatan, membangun komitmen untuk bersama-sama meningkatkan kinerja UPK, membahas kinerja UPK dan pembentukan tim pemetaan UPK.
3. Pemetaan UPK, terdiri dari: pemutakhiran hasil pemetaan UPK yang telah dilakukan sebelumnya, penelusuran aset, dan evaluasi kinerja pengurus UPK.
4. Konsolidasi UPK, merupakan kegiatan untuk memantapkan kelembagaan UPK, khususnya revitalisasi pengurus UPK yang berbentuk: mempertahankan pengurus lama, penggantian sebagian pengurus atau pembentukan pengurus baru.
5. Perencanaan, bertujuan untuk melakukan kajian mendalam terhadap kondisi UPK dan menyusun usulan kegiatan pengembangan potensi UPK dan penanganan masalah. Rangkaian kegiatannya meliputi: rapat kerja pengurus, musyawarah perencanaan, penulisan rencana kegiatan UPK dan verifikasi daftar usulan kegiatan.
6. Pelaksanaan, kegiatan pada tahap perencanaan meliputi: peningkatan kapasitas kelembagaan UPK, penanganan aset bermasalah, pencairan dana, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan usaha UPK dan RTM, pengembangan sarana dan prasarana dan pengembangan sistem keterjaminan sosial.
7. Pertanggungjawaban dan Pelestarian
 - a. Pertanggungjawaban dilakukan baik secara administratif maupun secara publik, agar prinsip-prinsip program dapat terlaksana secara optimal.
 - b. Pelestarian, hasil-hasil kegiatan program Gerdu-Taskin merupakan aset desa/kelurahan yang dikelola secara lestari dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat terutama RTM.

Untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan proses, mekanisme, tahapan dan target yang diharapkan, diperlukan manajemen pengendalian program. Adapun instrumen yang digunakan dalam manajemen pengendalian Program Gerdu-Taskin terdiri atas : pelaporan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pendampingan. (Pedoman Umum Program Gerdu-Taskin, 2007).

Prosedur pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Manusia (PM), Pemberdayaan Usaha (PU) dan Pemberdayaan Lingkungan (PL) adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Manusia (PM)

a. Penyaluran dana PM dari UPK ke Tim Pelaksana (Timlak) untuk merealisasikan kegiatan diatur dengan prosedur berikut.

- Setelah Persiapan Pelaksanaan, Timlak terlebih dahulu mengajukan rencana penggunaan dana kegiatan yang akan dilaksanakan kepada UPK untuk disetujui.
- Penyaluran dana PM dari UPK ke Timlak diatur secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan tahapan pelaksanaan.
- Timlak mengajukan permintaan penyaluran dana dengan melampirkan : (i) Rencana Penggunaan Dana PM sesuai dengan kebutuhan, (ii) Laporan Penggunaan Dana PM, (iii) Jadwal kegiatan.
- Setiap penyaluran dana yang dilakukan oleh UPK kepada Timlak harus ada bukti kuitansi penyaluran dana sebagai bahan pelaporan keuangan UPK.

b. Dalam pelaksanaan kegiatan PM, Timlak bersama dengan UPK melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi sektoral Kabupaten/Kota untuk mengkonsultasikan fasilitas dan bantuan teknis yang bisa diberikan selama pelaksanaan kegiatan.

c. Setelah pelaksanaan kegiatan PM selesai, Timlak melaporkan hasil kegiatan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan PM kepada UPK.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Usaha (PU)

Pelayanan realisasi pinjaman modal usaha oleh UPK kepada Pokmas UEP dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif dan peningkatan pendapatan kelompok Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B) dengan prosedur:

- a. Setelah Lokakarya Prapelaksanaan, UPK mempersiapkan realisasi pinjaman modal usaha kepada Pokmas UEP berupa :
 - Kwitansi pembayaran
 - Perjanjian Pinjaman
 - Kartu Pinjaman Pokmas UEP kepada UPK
 - Uang Cash yang sudah dicairkan dari Bank
 - Materai secukupnya, dll.
 - Untuk efisiensi dan efektifitas maka Surat Perjanjian Pinjaman bisa dijadikan sebagai Bukti Tanda Terima Uang dengan mencantumkan pada salah satu pasal/kla usul.
- b. UPK mengundang pengurus Pokmas UEP yang memenuhi kelayakan usaha dan peminjam untuk memperoleh penjelasan hak, kewajiban, tanggung renteng, serta penjelasan ketentuan perjanjian pinjaman dan konsekuensinya.
- c. Setelah memperoleh penjelasan, dilaksanakan penandatanganan Perjanjian pinjaman antara UPK dengan Pokmas UEP.
- d. Dengan disaksikan oleh semua yang hadir, dilakukan pembayaran pinjaman UPK kepada Pokmas UEP yang dibuktikan dengan kuitansi pembayaran pinjaman di atas materai secukupnya.
- e. Segera setelah Pokmas UEP yang menerima dana pinjaman dari UPK, paling lama 2 hari Ketua Pokmas harus sudah menyelurkan pinjaman kepada anggota.
- f. Proses pembayaran angsuran dan jasa pinjaman Pokmas UEP kepada UPK sesuai waktu dan jumlah yang ada di dalam perjanjian pinjaman.

Realisasi kerjasama pengembangan usaha sektor riilnUPK harus prospektif antara UPK dengan pihak lain sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Prosedurnya:

- a. Setelah dilakukan Musdes Pra Pelaksanaan, UPK mempersiapkan realisasi kerjasama pengembangan usaha sektor riil dengan pihak lain berupa:
 - Kwitansi pembayaran
 - Surat Perjanjian Kerjasama disetujui Kepala Desa/Lurah dan Ketua BPD.
 - Uang Cash yang sudah dicairkan dari Bank.
 - Materai secukupnya, dll.
 - b. UPK mengundang calon manajer unit usaha sektor riil atau pihak lain diajak kemitraan usaha sektor riil dengan diketahui oleh pemerintah desa, BPD, LPMD atau sebutan lain dan juga perwalikan dari masyarakat.
 - c. Penandatanganan perjanjian pinjaman antara UPK dengan manajer usaha atau Pihak yang diajak kerjasama.
 - d. Dengan disaksikan oleh semua yang hadir, dilakukan pembayaran pinjaman UPK kepada manajer Usaha atau pihak yang diajak kerjasama yang dibuktikan dengan kuitansi pembayaran pinjaman atau dana pengembangan usaha sektor riil di atas materai secukupnya.
 - e. Proses pelaksanaan perjanjian kerjasama dilaksanakan dilaksanakan secara mengikat dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.
3. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lingkungan (PL)
- a. Kegiatan PL harus dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pelaksanaan Desa/Kelurahan, dan tidak boleh dilaksanakan dengan pola rekanan.
 - b. Guna menghimpun potensi swadaya dan mendayagunakan sumber daya lokal yang ada, penyediaan bahan dan tenaga kerja seoptimal mungkin memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di Desa/Kelurahan bersangkutan dengan pola padat karya.

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan PL

- a. Setelah Persiapan Pelaksanaan, Timlak menyusun rencana penggunaan dana dan gambar teknis (Detail Engineering Design) yang dibutuhkan.
- b. Timlak mengajukan permintaan dana kepada UPK dengan menyertakan Rencana Penggunaan Dana sesuai dengan kebutuhan dan mengajukan permintaan dana lagi dengan menyertakan Laporan Penggunaan Dana.

- c. Timlak melakukan survei harga dan peralatan yang akan dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PL.
- d. Timlak melakukan rekrutmen tenaga kerja yang memprioritaskan tenaga kerja lokal dari kalangan RTM.
- e. Timlak melakukan mobilisasi partisipasi dan swakarya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PL secara swakelola.
- f. UPK melakukan pengawasan secara kontinyu terhadap pelaksanaan kegiatan PL.

2.5. Tinjauan Umum Tentang Unit Pengelola Keuangan (UPK)

UPK adalah pengelola program Gerdu-Taskin di Desa/Kelurahan. UPK dibentuk melalui musyawarah Desa/Kelurahan, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa (PerDes) sedangkan untuk kelurahan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kelurahan. Apabila di Desa/Kelurahan. Apabila di Desa/Kelurahan lokasi sudah terdapat lembaga ekonomi milik pemerintah Desa/Kelurahan sejenis UPK, maka sepanjang lembaga tersebut fungsional, tidak bermasalah dan disepakati dalam musyawarah, maka dapat difungsikan sebagai UPK Program Gerdu-Taskin.

Dalam lembaga UPK bisa dibentuk unit-unit usaha yang dikelola secara profesional, misal Unit USP maupun Unit Sektor Riil lainnya yang prospektif dan menguntungkan. UPK mengoperasikan usahanya secara **otonom dan independen**.

Modal UPK dapat berasal dari :

1. **Modal Sendiri**, terdiri dari simpanan anggota, modal cadangan, modal tabungan.
2. **Modal Bantuan**, dapat berasal dari dana Gerdu-Taskin dan desa (berupa aset desa yang dipisahkan pembukuannya), serta bantuan-bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
3. **Modal Pinjaman**, dapat diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.
4. **Modal Penyertaan** dari pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Unit Pengelola Keuangan (UPK) mempunyai peran strategis dalam pengelolaan program Gerdu-Taskin. Agar UPK dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan maka perlu didukung oleh pengurus yang mempunyai kemampuan yang memadai sesuai dengan kriteria yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan penjaringan awal calon pengurus UPK yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) bersama-sama dengan Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD) atau sebutan lain. Dari sejumlah lamaran yang masuk dengan menilai kualifikasi administratif dan data pribadi meliputi karakter, pengalaman, pendidikan, usia dan lainnya yang diperlukan kemudian ditetapkan 6 (enam) orang calon pengurus UPK untuk selanjutnya dipilih melalui Musdes Sosialisasi. Struktur organisasi UPK terdiri dari Unsur Pengurus dan Unsur Pengawas. Unsur pengurus terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. Sedangkan unsur pengwas terdiri dari Kepala Desa/Kelurahan, Ketua BPD dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat yang dipilih musyawarah Desa/Kelurahan. Unsur Pengurus UPK dipilih berdasarkan kriteria :

1. Warga Desa/Kelurahan setempat yang dikenal jujur, kreatif dan bertanggung jawab.
2. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun.
3. Pendidikan minimal SLTP sederajat, dan khusus untuk yang menangani pembukuan sedapat mungkin minimal SLTA.
4. Mempunyai kemampuan dalam pengelolaan keuangan.
5. Bukan aparat pemerintah Desa/Kelurahan maupun unsur BPD.
6. Bukan anak dan atau isteri Kepala Desa/Kelurahan.
7. Dapat berasal dari Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).

Adapun teknis/langkah-langkah pembentukan UPK adalah sebagai berikut:

1. Penjaringan
 - a. TPM menjelaskan kepada Kepala Desa/Kelurahan, BPD dan LPMD tentang tugas pengurus UPK, kemampuan yang diharapkan dan tata-cara pembentukan UPK. Bila diperlukan keterlibatan tokoh masyarakat, ulama

dan sebagainya bisa dilakukan dalam proses penjurangan calon pengurus UPK.

- b. Kepala Desa/Kelurahan, BPD dan LPMD melakukan penjurangan calon pengurus UPK dengan menyebarluaskan informasi kepada warga desa melalui berbagai media dan cara.
 - c. Pengajuan lamaran dilakukan oleh warga masyarakat dengan mengisi daftar lamaran sederhana yang telah tersedia dilampiri fotocopy KTP.
 - d. Batas waktu pengajuan lamaran ditetapkan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan sosialisasi Desa/Kelurahan.
2. Seleksi dan Penetapan Calon
- a. TPM bersama-sama dengan Kepala Desa/Kelurahan, BPD dan LPMD melakukan seleksi secara sederhana dengan menilai kualifikasi administratif dan data pribadi meliputi karakter, pengalaman, pendidikan, usia dan lainnya yang diperlukan sesuai dengan kriteria yang telah ada. Dari hasil seleksi dipilih 6 orang calon pengurus UPK (dua kali dari umlah kebutuha minimal pengurus UPK).
 - b. Hasil seleksi dituangkan ke dalam Daftar Calon Pengurus UPK yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan BPD.
3. Pemilihan dan Penetapan Pengurus UPK
- a. Calon pengurus UPK terseleksi kemudian dipilih melalui proses pemilihan UPK dalam Sosialisasi Desa/Kelurahan.
 - b. Pengurus UPK dipilih berdasarkan pemungutan suara terbanyak.
 - c. Pengurus UPK terpilih selanjutnya ditetapkan dengan SK Kepala Desa/Kelurahan.

Masa kerja kepengurusan UPK 3-5 tahun, dan setelahnya bisa dipilih kembali. Pengurus dapat diberhentikan sebelum masa kerjanya apabila melakukan penyelewengan dan hal lain yang dapat merugikan UPK melalui Musyawarah Anggota. Pengelola diangkat oleh Pengurus dengan masa kerja sesuai kesepakatan dan bisa diberhentikan oleh Pengurus apabila tidak berprestasi atau melakukan pelanggaran.

Tugas dan tanggung jawab pengurus UPK, meliputi:

1. Melakukan klarifikasi dan klasifikasi RTM.
2. Memfasilitasi identifikasi usulan kegiatan pemberdayaan manusia, usaha dan lingkungan.
3. Mengajukan usulan kegiatan Desa/Kelurahan kepada Sektap Kabupaten/Kota.
4. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa/Kelurahan.
5. Melaksanakan pelayanan usaha simpan pinjam dan pengembangan usaha sektor riil.
6. Melakukan analisis kelayakan usaha dan kelayakan peminjam serta menetapkan persetujuan dana pinjaman.
7. Menyusun dan menetapkan berbagai aturan yang diperlukan, terutama berkaitan dengan kegiatan simpan pinjam dan pengelolaan kegiatan lainnya.
8. Melakukan perjanjian pinjaman maupun dengan pihak lain dalam bentuk akad.
9. Membuka rekening atas nama UPK dengan specimen 2 pengurus UPK.
10. Mengelola usaha UPK secara sehat dan profesional.
11. Mempertanggungjawabkan pengelolaan program secara administratif maupun publik serta pelestariannya.
12. Membukukan secara teratur, tertib dan rapi semua transaksi UPK sesuai kaidah pencatatan yang diterima umum.
13. Memberikan dukungan pengembangan usaha RTM.
14. Mendokumentasikan kegiatan TRIDAYA.
15. Melaporkan proses pelaksanaan, hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana maupun perkembangan usaha kepada Sektap Kabupaten/Kota secara berkala.
16. Melakukan koordinasi dengan Tenaga Pendamping maupun pengelola program Gerdu-Taskin.

Adapun keunggulan dan kelemahan dari pilihan legalitas kelembagaan BUMDes sebagai Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Keunggulan dan Kelemahan UPK Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan

UPK SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PERDESAAN	
KEUNGGULAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisasi dan Pengelolaan Sederhana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum diakui sebagai Lembaga dengan Badan Hukum Formal
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan layanan Pinjaman Modal secara mudah dan murah kepada RTM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sukar mengakses modal pinjaman oleh karena kelembagaannya belum memiliki status legal
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensial memperoleh fasilitasi program penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak bisa melakukan kontrak bisnis secara melembaga
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki visi jelas bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan RTM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum profesional karena keterbatasan kemampuan SDM, sistem pengelolaan maupun pengembangan. UPK masih dianggap sebagai lembaga penyalur dana bantuan

2.6. Tinjauan Tentang Penguatan UPK

Melalui kegiatan penguatan diharapkan semakin memantapkan pelaksanaan Gerdu-Taskin dari aspek kelembagaan dan usaha UPK, dan mengoptimalkan pengembangan potensi Pokmas UEP. Kegiatan penguatan juga dapat mewujudkan profesionalitas dan keberlanjutan pengelolaan program Gerdu-Taskin. Adapun tujuan dari pelaksanaan penguatan UPK adalah sebagai berikut :

2.6.1. Tujuan

1. Tujuan Umum

Kegiatan Penguatan UPK Program Gerdu Taskin bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi UPK, menyehatkan dan menyelamatkan UPK yang belum optimal dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengembangkan UPK sebagai lembaga keuangan mikro untuk diarahkan menjadi embrio BUMDes.

- b. Meningkatkan kemampuan UPK dalam mengembangkan usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil yang berbasis potensi sumberdaya lokal.
- c. Meningkatkan kemampuan Pokmas UEP dalam mengembangkan usaha RTM.
- d. Meningkatkan kemampuan UPK dalam mendukung kegiatan sosial bagi RTM Rentan.
- e. Meningkatkan kemitraan antara pihak terkait dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan.

Teknis kegiatan pada tahap pelaksanaan penguatan UPK adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan UPK

Peningkatan kapasitas kelembagaan UPK dimaksudkan untuk memperkuat peran dan fungsi UPK menjadi BUMDes. Kegiatan pelaksanaan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan UPK meliputi: pembenahan struktur organisasi dan personalia pengurus, penyempurnaan AD/ART, peningkatan kapasitas manajemen organisasi, peningkatan legalitas UPK, pengembangan jaringan kerjasama antar UPK.

2. Penanganan Aset Bermasalah

- a. Penanganan pinjaman bermasalah dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :

- Pokja melakukan rapat dengan pengurus UPK dan Pokmas untuk membahas tindak lanjut penanganan pinjaman bermasalah
- Pokja memanggil Pokmas/pemanafaat yang memiliki pinjaman bermasalah untuk membuat kesepakatan ulang tentang cara pengembalian pinjaman
- Kesepakatan cara pengembalian pinjaman dapat dilakukan dengan cara : penjadwalan ulang (*rescheduling*) dan Penyitaan aset/jaminan.
- UPK dapat menggunakan tenaga penagihan (*debt collector*) dari pihak lain dengan memberikan jasa penagihan sesuai dengan kesepakatan.

- b. Penanganan aset UPK yang masih dikuasai pihak lain dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :

- Pokja melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang diduga menguasai aset UPK dengan disaksikan pemerintah desa dan pengurus UPK
- Pokja meminta pertanggungjawaban pengembalian aset UPK dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan mengembalikan aset dalam jangka waktu yang disepakati di atas kertas bermaterai.
- Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati tidak mampu memenuhi kewajibannya, Pokja memberikan laporan secara tertulis kepada kepala Desa/Kelurahan dengan tembusan pengurus UPK.
- Apabila dipandang perlu Pokja dapat melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.

3. Peningkatan Kapasitas SDM

a. Pelatihan

- Materi pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan UPK dalam mengelola usaha sektor riil (USR) dan kemampuan RTM dalam mengelola usaha ekonomi produktif (UEP)
- Materi pelatihan dapat berupa: manajemen usaha, aplikasi teknologi tepat guna (TTG), pengembangan jaringan pemasaran, dan sebagainya.
- Pelatihan dapat dilakukan oleh masing-masing UPK atau secara kolektif difasilitasi oleh Forum UPK atau Sektap Kabupaten/Kota
- Metode pelaksanaan pelatihan berupa penyampaian materi dengan ceramah, diskusi, atau praktek.
- Peserta pelatihan adalah pengurus UPK, Pokmas, dan anggota masyarakat yang dipandang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha.

b. Magang

- Magang dapat diikuti oleh pengurus UPK atau Pokmas
- Magang dilaksanakan di: (i) UPK yang penelolaan dan kinerja kelembagaannya relatif lebih baik, dan (ii) Usaha Ekonomi yang bisa dijadikan sebagai teladan, misalnya: Lembaga Keuangan Mikro (LKM), koperasi, BMT, BPR, dan Usaha kecil Menengah (UKM)

- Materi yang diprioritaskan dalam pelaksanaan magang antara lain: (i) pengelolaan administrasi organisasi, (ii) pengelolaan usaha simpan pinjam, (iii) pengelolaan usaha sektor riil, dan (iv) pengelolaan usaha ekonomi produktif.

c. Studi Banding

- Studi banding dapat diikuti oleh pengurus UPK atau pengurus Pokmas.
- Studi banding dilaksanakan dengan melakukan kunjungan di UPK, Pokmas, atau lembaga lain yang pengelolaan dan kinerja kelembagaannya relatif lebih baik.
- Hal yang perlu diamati dan dipelajari dalam studi banding adalah : (i) pengelolaan administrasi organisasi, (ii) pengelolaan usaha simpan pinjam, (iii) pengelolaan usaha sektor riil, dan (iv) pengelolaan usaha ekonomi produktif.

4. Pengembangan Usaha UPK dan RTM

a. Usaha Simpan Pinjam

- Penambahan permodalan dapat diperoleh dari dana program, penggalangan simpanan masyarakat, dan pihak ketiga.
- Penggalangan dana pihak ketiga dilakukan dengan mengajukan usulan permohonan bantuan dana kepada Pemerintah Daerah, Perusahaan BUMN dan atau Swasta yang mempunyai komitmen dalam pemberdayaan masyarakat
- Untuk meningkatkan minat masyarakat dan pihak ketiga menyimpan dananya di UPK, dapat dilakukan melalui: (i) penentuan jasa simpanan yang kompetitif, (ii) Pemberian bonus atau hadiah, (iii) Pemberian penghargaan.
- Pembinaan prosedur dan pelayanan simpan pinjam dilakukan dengan mengevaluasi dan memperbaiki prosedur simpan pinjam sehingga lebih sederhana dan efektif
- Aspek-aspek yang perlu mendapatkan penekanan untuk dibenahi dalam prosedur simpan pinjam antara lain: (i) komitmen nasabah/pemanfaat, (ii) adanya jaminan /agunan, (iii) penilaian kelayakan, dan (iv) sistem jasa pinjaman

- Peningkatan pelayanan dilakukan dengan meningkatkan jam kerja dan kualitas pelayanan
 - Melengkapi dokumen administrasi simpan pinjam terutama surat perjanjian pinjaman dan kartu angsuran pinjaman.
- b. Usaha Sektor Riil
- Pengembangan usaha sektor riil UPK merupakan usaha ekonomi produktif yang dikelola sendiri oleh UPK
 - Pengembangan sektor riil bisa merupakan peningkatan usaha yang telah dilakukan oleh UPK atau pengembangan usaha baru, dimana pemilihan jenis usaha harus dilakukan dengan menerapkan analisa kelayakan usaha.
 - Jenis usaha yang dipilih sebaiknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Jenis usaha tersebut berbasis pelayanan kebutuhan dasar masyarakat Desa/Kelurahan, seperti misalnya pengadaan sarana prasarana pertanian, usaha peternakan, pelayanan jasa, toko, wartel, persewaan alat dan mesin pertanian, serta persewaan alat-alat pesta dan sound system.
 - Jenis usaha yang dapat memfasilitasi produk-produk yang dihasilkan oleh Pokmas UEP, seperti di bidang kerajinan, dan pengolahan hasil pertanian.
 - Penyertaan modal dengan jasa/bunga pinjaman tertentu tidak termasuk dalam kategori usaha sektor riil.
 - Administrasi dan pengelolaan usaha sektor riil harus terpisah secara tegas dengan kegiatan simpan pinjam. usaha sektor riil ini menjadi unit usaha yang otonom dari UPK.
 - Dana untuk usaha sektor riil disalurkan setelah dilakukan analisa kelayakan usaha dan persiapan yang matang.
 - Pembagian jasa kepada pengelola diberikan dalam bentuk SHU atau deviden akhir tahun. Pengelola UR (terutama bila terlibat langsung dalam pengelolaan usaha) dapat memperoleh insentif/honor bulanan.
 - Pengelolaan usaha sektor riil harus dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan.

5. Pertanggungjawaban

Kegiatan pada tahap pertanggungjawaban meliputi: musdes pertanggungjawaban UPK, pertanggungjawaban administratif, rakor evaluasi sektep kabupaten/kota, rakor evaluasi sektep propinsi.

Penyusunan Rencana Kegiatan Penguatan berdasarkan skala prioritas dengan mengacu pada ruang lingkup kegiatan Penguatan UPK Gerdu-Taskin sesuai kategori masing-masing UPK. Prioritas kegiatan secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

1. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk Pengembangan UPK SEHAT antara lain:
 - a. Aspek kelembagaan, berupa penataan AD/ART, pengembangan status hukum UPK, pengembangan struktur organisasi, pengembangan sarana prasarana UPK, dan penataan sistem dan prosedur operasional UPK.
 - b. Aspek usaha simpan pinjam UPK, berupa penambahan modal kerja, penggalangan simpanan masyarakat, pengembangan syarat dan prosedur layanan pinjaman, penerapan analisa pinjaman, dan penanganan pinjaman bermasalah.
 - c. Pengembangan Usaha Sektor Riil UPK meliputi : penambahan modal kerja, penataan administrasi dan manajemen usaha.
 - d. Penataan Tata Hubungan Kelembagaan UPK dengan Pemerintah Desa.
 - e. Pemantapan Pokmas UEP melalui pembinaan dan pelatihan.
2. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk Pengembangan UPK KURANG SEHAT antara lain:
 - a. Penataan peran dan fungsi Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan Usaha UPK
 - b. Aspek kelembagaan UPK, meliputi penataan struktur organisasi dan personalia pengurus, AD/ART, sistem dan prosedur operasional UPK, pengembangan sarana dan prasarana UPK.
 - c. Aspek usaha simpan pinjam UPK, berupa penambahan modal kerja, penggalangan simpanan masyarakat, pengembangan syarat dan prosedur

layanan pinjaman, penerapan analisa pinjaman, dan **penanganan pinjaman bermasalah.**

- d. Pengembangan Usaha Sektor Riil UPK meliputi : penambahan modal kerja, penataan administrasi dan manajemen usaha.
 - e. Penataan Tata Hubungan Kelembagaan UPK dengan Pemerintah Desa.
 - f. Pemantapan Pokmas UEP melalui pembinaan dan pelatihan termasuk restrukturisasi Pokmas.
3. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk Pengembangan UPK TIDAK SEHAT antara lain:
- a. Penataan peran dan fungsi Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan Usaha UPK
 - b. Aspek kelembagaan UPK, meliputi penataan struktur organisasi dan personalia pengurus, AD/ART, sistem dan prosedur operasional UPK, pengembangan sarana dan prasarana UPK.
 - c. Aspek usaha simpan pinjam UPK, berupa penambahan modal kerja, penggalangan simpanan masyarakat, pengembangan syarat dan prosedur layanan pinjaman, penerapan analisa pinjaman, dan **penyelamatan aset melalui penanganan pinjaman bermasalah.**
 - d. Pengembangan Usaha Sektor Riil UPK meliputi : penambahan modal kerja, penataan administrasi dan manajemen usaha.
 - e. Penataan Tata Hubungan Kelembagaan UPK dengan Pemerintah Desa.
 - f. Pemantapan Pokmas UEP melalui pembinaan dan pelatihan termasuk restrukturisasi Pokmas

Adapun penilaian kesehatan terbagi 2 penilaian baik penilaian secara “Kwantitatif” dengan bobot 75% pada Aspek “KINERJA KEUANGAN”, dan Penilaian “Kwalitatif” dengan bobot 25% pada Aspek “MANAJEMEN” hal ini dengan mengacu bahwa UPK yang sudah berdiri sejak tahun menerima program maka dapat dikategorikan 4 macam yang masing-masing mempunyai ukuran scoring

Tabel 3. Kategori Kesehatan UPK

UKURAN NILAI	PREDIKAT
0 s/ 50	Tidak Sehat
50,01 s/d 65,00	Kurang sehat
65,01 s/d 80,00	Cukup Sehat
80,01 s/d 100	Sehat

Penilaian kinerja keuangan dan aspek manajemen dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penilaian Kinerja Keuangan.

Penilaian khusus untuk kinerja keuangan ini adalah penilaian kuantitatif yang diambil dengan sumber laporan keuangan (Neraca dan Laba Rugi) dan data statistik atau buku 7, baik posisi awal sampai dengan posisi saat ini. Untuk kinerja keuangan ini bobot penilaiannya adalah 75% dari total penilaian, Aspek yang di nilai ada 4 macam antara lain terbagi sebagai berikut :

1. Aspek Perkembangan bobot penilaiannya (20%)

Aspek ini untuk melihat perkembangan Assets UPK apakah mengalami perkembangan atau tidak semenjak di berikan modal awal UPK sampai dengan posisi saat ini

2. Aspek Pemanfaatan bobot penilaiannya (20%)

Aspek ini untuk melihat atau mengukur efisiensi dan efektifitas penggunaan dana modal UPK baik sisi penggunaan atau pemanfaatan dananya dan yang memanfaatkan dana tersebut., Aspek ini di bagi dua yaitu sebagai berikut :

a. Aspek penyaluran bobot penilaiannya (10%)

Untuk mengukur apakah dana yang ada sudah dimanfaatkan secara optimal atau masih terlalu banyak yang mengendap di UPK.

b. Aspek pemanfaat bobot penilainya (10%)

Aspek ini untuk mengukur atau melihat tentang pengguna dana apakah dana yang ada sudah di gunakan secara maksimal oleh masyarakat desa utamanya RTM atau masih di manfaatkan beberapa orang saja.

3. Aspek Kualitas Pinjaman / KAP (Kualitas Aktiva Produktif)

bobot penilaiannya (20%)

Untuk melihat apakah dana yang disalurkan kepada pokmas atau masyarakat lancar atau menjadi pinjaman bermaslah (Kurang lancar, Diragukan, Macet). Karena ini sangat berpengaruh bagi perkembangan UPK kedepan.

4. Aspek Keuntungan/Rentabilitas bobot penilaiannya (15%)

Aspek ini untuk melihat atau mengukur efisiensi biaya dan pemanfaatan Assets sehingga akan berdampak terhadap Laba/Rugi kedua Aspek ini terbagi 2 hal sebagai berikut :

a. Aspek Effesiansi biaya/pendapatan (10%)

Untuk melihat atau mengukur apakah UPK menggunakan biaya secara Effesian disbanding biaya atau berlebihan sehingga UPK tidak Untung

b. Aspek SHU di banding Assets (5%)

untuk melihat kondisi UPK apakah menggunakan Assets secara maksimal sehingga dapat keuntungan apakah assets yang ada tidak produktif.

2. Penilaian Kinerja Manajemen (25%)

Khusus untuk penilaian manajemen ini ada 25 pertanyaan dan scoring ditentukan dengan jawaban ya atau tidak, bila jawabannya “YA” maka Skoringnya “1” dan bila jawabannya “TIDAK” maka skoringnya (0).

2.7. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan Mikro

2.7.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Menurut definisi yang dipakai dalam *Microcredit Summit* (1997) dalam Wijono (2004), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, “*programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families*”. Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro

merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah per tahun.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut *Asian Development Bank* (ADB), lembaga keuangan mikro (*microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa: (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.

LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), *baitul mal wattanwil* (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan *Grameen*, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan *credit union*. Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya.

2.7.2 Kaitan Lembaga Keuangan Mikro dengan Kemiskinan

Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi disini tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan

pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yang produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tak langsung. Usaha ini dapat berupa *transfer payment* dari pemerintah misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk *micro credit*.

Secara hipotesis, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang akan terentaskan karena menjadi pengusaha atau karena *trickle down effect* dari semakin banyaknya pengusaha mikro (Krisna Wijaya: 2005).

Menurut Robinson (2000), pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: *pertama*, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, *kedua*, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan *ketiga*, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku usaha menengah maupun besar.





UNIVERSITAS BRAWIJAYA



III. KERANGKA KONSEP PENELITIAN

3.1. Kerangka Pemikiran

Prioritas program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) diarahkan untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang terjadi dengan fokus kegiatan TRIDAYA meliputi : (i) pemberdayaan manusia, (ii) pemberdayaan usaha, dan (iii) pemberdayaan lingkungan. Program Gerdu-Taskin lebih diarahkan kepada pola pengembangan dan pengelolaan program yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Keterpaduan diwujudkan melalui pengembangan pola penanganan program yang dimulai dari Tahap Awal yang dilanjutkan dengan Tahap Penguatan dan Tahap Pemandirian, yang dilakukan secara selektif pada Desa/Kelurahan lokasi. Sejak dimulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 Program Gerdu-Taskin telah berhasil memfasilitasi pembentukan sebuah institusi usaha yang bergerak dalam bidang/sector jasa/pelayanan keuangan mikro kecil yang berupa Unit Pengelola Keuangan (UPK).

Dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya UPK sebagai lembaga keuangan mikro pedesaan yang mampu memberikan pelayanan permodalan yang mudah, murah, cepat maka dilakukan langkah strategis berupa penataan dan pengembangan kelembagaan UPK melalui kegiatan penguatan UPK. Penguatan UPK dialokasikan kepada UPK yang telah mendapatkan program awal dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi UPK, menyetatkan dan menyelamatkan UPK yang belum optimal dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Adapun kegiatan penguatan UPK meliputi : peningkatan kapasitas kelembagaan UPK, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan usaha UPK, pengembangan usaha RTM, pengembangan sarana prasarana usaha UPK, dan pengembangan system keterjaminan sosial melalui UPK. Dalam tahap penguatan, UPK diberikan tambahan dana yang salah satu alokasinya untuk pengembangan usaha UPK.

Dengan adanya tambahan dana tersebut, maka UPK dapat lebih banyak menyalurkan pinjaman kepada RTM sehingga mereka dapat mengembangkan

usahanya. Jika usaha yang dilakukan oleh RTM meningkat, berimplikasi pada peningkatan pendapatan RTM. Jadi, dengan adanya penguatan UPK diharapkan mampu berperan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga yang menjadi pemanfaat UPK. Sedangkan pada UPK non penguatan tidak adanya peningkatan produktivitas atau kalau ada peningkatan tidak begitu besar karena masyarakat sulit mendapat tambahan modal lagi untuk meningkatkan usahanya.

Untuk mempertahankan perputaran dana di UPK maka pengurus UPK diharuskan memantau keadaan kualitas aktiva produktif. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tingkat kolektibilitasnya. Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif sejauh ini hanya terbatas pada pinjaman yang diberikan. Ukuran utamanya adalah ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan nasabah. Keberlanjutan UPK sangatlah tergantung pada tingkat kolektibilitas yang tinggi, sehingga bila terjadinya pinjaman bermasalah pengurus harus segera tanggap dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya.

Untuk menyelesaikan adanya kolektibilitas bermasalah harus diketahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kolektibilitas. Salah satunya adalah faktor sosial ekonomi nasabah yaitu umur, pendidikan, pendapatan rumah tangga, jumlah anggota keluarga, tanggungan keluarga dan jenis usaha.

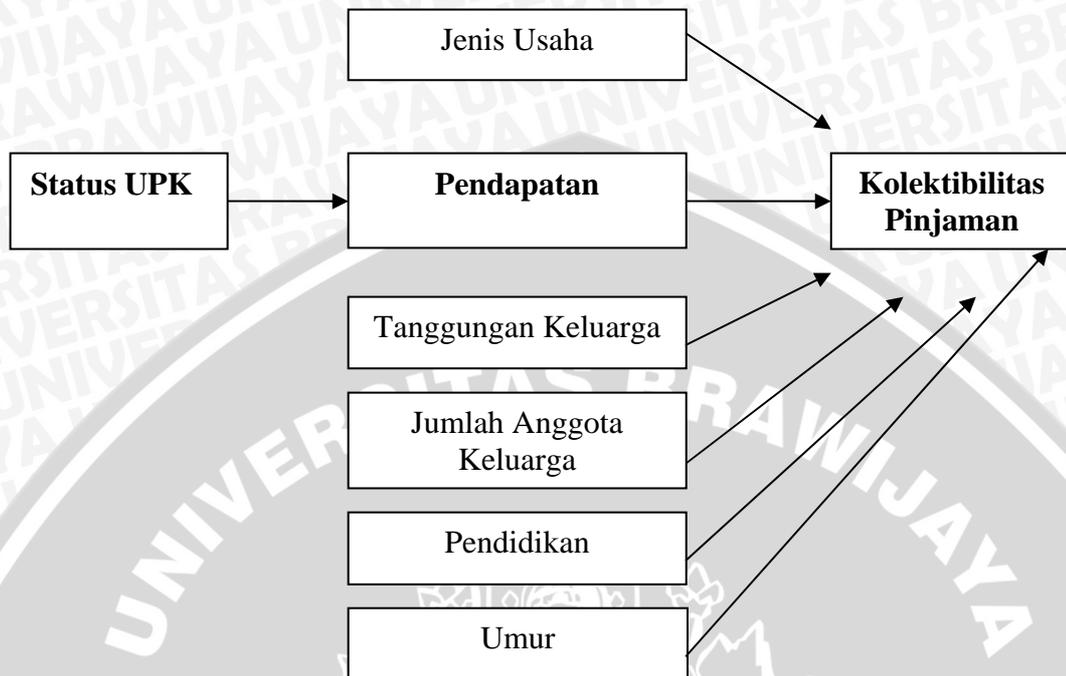
Secara teoritis oleh Rogers dan Shoumaker *dalam* Darojatun (2004) bahwa semakin dewasa seseorang maka semakin banyak pengalaman dan akan lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan sehingga mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap pengembalian pinjaman. Begitu juga dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya lebih tinggi akan mempunyai kesadaran yang tinggi akan kewajibannya sehingga tidak akan melakukan tunggakan.

Nurmanaf dan Mat Syukur dalam Christinawati (2004) menyatakan bahwa pendapatan rumah tangga umumnya tidak berasal dari satu sumber, tetapi dapat berasal dari dua atau lebih sumber pendapatan. Tingkat pendapatan yang rendah mengharuskan anggota rumah tangga untuk bekerja dan berusaha lebih giat untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga besarnya pendapatan diduga berperan dalam pengembalian pinjaman, karena kalau pendapatan rendah sedangkan kebutuhan

untuk konsumsi belum terpenuhi maka prioritas pemenuhan kebutuhan adalah untuk konsumsi dan menunda untuk membayar pinjaman.

Jumlah anggota keluarga adalah semua anggota keluarga yang menjadi tanggungan rumah tangga peminjam. Terkadang anggota keluarga dari rumah tangga miskin tidak hanya terdiri dari keluarga inti saja yaitu istri dan anak-anaknya tetapi dapat juga ayah dan ibu ataupun saudara-saudaranya. Semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin tinggi pula biaya hidup yang harus ditanggung oleh rumah tangga nasabah. Ada kecenderungan pendapatan yang diperoleh diprioritaskan untuk kebutuhan keluarganya, baru setelah kebutuhan keluarga terpenuhi maka aplikasinya untuk keperluan yang lainnya. Jika pendapatan yang diperolehnya sedikit tetapi jumlah anggota keluarganya banyak maka kebutuhan yang lain akan terabaikan seperti penundaan dalam pembayaran pinjaman.

Jenis usaha juga harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman. Karena dari jenis usaha yang dilakukan akan dapat memprediksi kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjamannya. Analisa usaha peminjam menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Peranan Penguatan UPK dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga dan Hubungan Faktor Sosial Ekonomi dengan Kolektibilitas Pinjaman.

3.2. Hipotesis

1. Diduga bahwa pendapatan rumah tangga di UPK penguatan lebih tinggi dibandingkan dengan UPK non penguatan.
2. Diduga bahwa ada hubungan antara faktor umur, pendidikan, jumlah keluarga, pendapatan, tanggungan keluarga dan jenis usaha dengan kolektibilitas pinjaman.

3.3. Batasan Masalah

1. Peranan penguatan UPK dibatasi pada perbandingan pendapatan rumah tangga di UPK penguatan dan UPK non penguatan.
2. Faktor-faktor sosial ekonomi yang diukur dalam penelitian adalah umur, pendidikan, jumlah keluarga, pendapatan, tanggungan keluarga dan jenis usaha.

3.4. Definisi Operasional

1. Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah pengelola Gerdu-Taskin yang berupa lembaga keuangan mikro yang ada di Desa/ Kelurahan.
2. Penguatan UPK adalah program yang diberikan kepada UPK yang telah mendapat program penguatan untuk meningkatkan kinerja UPK.
3. Pinjaman adalah besarnya dana yang diberikan UPK kepada rumah tangga miskin.
4. Produktivitas adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari usaha yang dilakukan masyarakat.
5. Kolektibilitas pinjaman adalah tingkat pengembalian pinjaman berupa pokok dan bunga dari rumah tangga miskin (nasabah) kepada UPK.
6. Umur adalah usia dari responden yang dihitung sejak kelahirannya sampai dengan waktu penelitian ini dilaksanakan.
7. Pendidikan adalah tingkat pendidikan responden yang dihitung berdasarkan pendidikan formal terakhir yang pernah diikuti.
8. Pendapatan adalah seluruh penghasilan rumah tangga yang diperoleh dari usaha yang dilakukan dengan modal dari pinjaman UPK.
9. Jumlah anggota keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang ditanggung oleh suatu rumah tangga pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.
10. Tanggungan keluarga adalah anggota keluarga yang belum dapat menghasilkan pendapatan sendiri bagi dirinya, dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
11. Jenis usaha adalah usaha yang dilakukan masyarakat yaitu perdagangan dan non perdagangan.
 - Usaha Perdagangan meliputi : pedagang pracangan dan pedagang mlijo
 - Usaha non perdagangan meliputi : petani, peternak ayam, dan jenis usaha lain.



IV. METODE PENELITIAN

4.1. Metode Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan daerah penelitian dilakukan secara sengaja di Kabupaten Blitar dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah penerima Program Gerdu Taskin dengan tingkat kolektibilitas pinjaman rendah. Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang diteliti adalah UPK yang mendapat program penguatan tahun 2006. Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2007.

4.2. Metode Penentuan Sampel

Responden dalam penelitian adalah rumah tangga miskin yang menerima pinjaman Program Gerdu Taskin. Penentuan sampel dilakukan secara *Multistage Stratified Random Sampling*. Dasar untuk menstratifikasikan adalah status UPK yaitu UPK non penguatan dan UPK penguatan. Selanjutnya dalam penentuan sampel dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama, penentuan sampel UPK. Populasi UPK non penguatan adalah 26 UPK dan UPK penguatan ada 12 UPK. Dari populasi tersebut dipilih sampel 3 UPK non penguatan dan 3 UPK penguatan. Tahap kedua, penentuan sampel Pokmas. Populasi pokmas adalah semua Pokmas di UPK sampel yaitu 51 pokmas di UPK non penguatan dan di UPK penguatan. Dari populasi tersebut diambil sampel 7 pokmas di UPK non penguatan dan 11 pokmas di UPK penguatan. Tahap ketiga adalah penentuan sampel, yaitu semua rumah tangga miskin yang menjadi anggota pokmas sampel. Di UPK non pengatan diperoleh sampel sebanyak 59 orang dan di UPK penguatan sebanyak 44 orang. Dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Tahap Penentuan Sampel

Keterangan	Populasi	sampel
Tahap I : menentukan UPK sampel		
UPK non penguatan	26	3
UPK penguatan	12	3
Tahap II : menentukan Pokmas sampel		
UPK non penguatan	51	7
UPK penguatan	51	11
Tahap III : menentukan sampel		
7 pokmas di UPK non penguatan	59	59
11 pokmas di UPK penguatan	44	44

Sumber : Analisis data primer, 2007

4.3. Metode Pengambilan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dengan melakukan pengisian kuisioner dan wawancara langsung kepada Rumah tangga miskin, yang merupakan anggota kelompok masyarakat (pokmas). Kuisioner berisi tentang identitas responden, pendapatan, jumlah pinjaman, tunggakan.

2. Data sekunder

Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari pengurus UPK berkaitan dengan jumlah dan identitas peminjam serta kolektibilitas pinjaman peminjam, data dari Sektap Kabupaten mengenai jumlah UPK dan BPS Kabupaten tentang deskripsi wilayah daerah penelitian.

4.4. Metode Analisis Data

Untuk menjawab tujuan dan hipotesis pertama yaitu tentang perbedaan pendapatan rumah tangga di UPK penguatan dan UPK non penguatan digunakan uji beda rata-rata. Sedangkan untuk menjawab tujuan dan hipotesis kedua tentang hubungan faktor sosial ekonomi dengan kolektibilitas pinjaman digunakan analisis korelasi Rank Spearman (r_s).

1. Uji Beda Dua Rata-Rata

Untuk menganalisis perbedaan pendapatan rumah tangga di UPK penguatan dan UPK non penguatan digunakan uji beda dua rata-rata. Analisis statistik dengan menggunakan uji beda rata-rata adalah :

Hipotesis dalam penelitian adalah :

- $H_0 : \mu_1 \leq \mu_2$ tidak terdapat perbedaan pada nilai rata-rata pendapatan rumah tangga di UPK penguatan dan UPK non penguatan.
- $H_1 : \mu_1 > \mu_2$ terdapat perbedaan pada nilai rata-rata pendapatan rumah tangga di UPK penguatan dan UPK non penguatan, yang berarti pendapatan rumah tangga di UPK penguatan lebih tinggi dibandingkan UPK non penguatan.

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan uji-t dengan rumus :

1. Bila varians berbeda nyata, digunakan uji- t dengan rumus :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

2. Bila varians sama, digunakan uji- t dengan rumus :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\left(S^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) \right)}}$$

$$S^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}$$

- Bila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka terima H_1 dan tolak H_0 , artinya terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan rumah tangga di UPK penguatan dan UPK non penguatan.
- Bila $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ maka terima H_0 dan tolak H_1 , artinya tidak terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan rumah tangga di UPK penguatan dan UPK non penguatan.

Untuk menguji apakah dua kelompok sampel mempunyai varians yang sama atau

berbeda, dilakukan uji F dengan rumus : $F_{\text{hitung}} = \frac{S_1^2}{S_2^2}$

2. Analisis Korelasi Rank Spearman (r_s)

Untuk mengetahui hubungan faktor sosial ekonomi dengan kolektibilitas pinjaman digunakan analisis korelasi Rank Spearman (r_s). Menurut Siegel (1986) untuk mengetahui tingkat hubungan dua himpunan skor yang diukur sekurang-kurangnya dalam skala ordinal dapat dilakukan dengan tes koefisien korelasi Rank Spearman. Koefisien korelasi Rank Spearman didasarkan atas jenjang yang ditulis dengan rs atau biasa disebut ρ . Untuk menghitung rs dapat dimulai dengan membuat daftar N subyek, kemudian membuat ranking untuk variabel X dan ranking variabel Y. Selanjutnya menentukan berbagai harga $di =$ perbedaan antara kedua jenjang itu dan mengkuadratkan serta menjumlahkan semua harga di

untuk mendapatkan jumlah d_i^2 lalu harga ini serta harga N (banyaknya subyek) dimasukkan kedalam rumus berikut:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{N^3 - N}$$

keterangan:

r_s = nilai hitung rank spearman

d_i^2 = disparitas (simpangan atau selisih ranking) yaitu nilai dari $(X-Y)^2$

$\sum_{i=1}^N d_i^2$ = penjumlahan $(X - Y)^2$

N = jumlah responden atau banyak observasi

Akan tetapi apabila terjadi rangking-rangking yang sama dalam variabel x maka perlu dilakukan koreksi jumlah kuadrat dan faktor koreksinya adalah T, dimana :

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

Dimana t adalah banyaknya observasi yang berangka sama pada suatu rangking tertentu sehingga r_s adalah sebagai berikut :

$$r_s = \frac{\sum X^2 + \sum Y^2 - \sum d^2}{2 \sqrt{\sum X^2 \sum Y^2}}$$

Dimana:

$$\sum X^2 = \left\{ \frac{N^3 - N}{12} \right\} - \sum T_x$$

$$\sum Y^2 = \left\{ \frac{N^3 - N}{12} \right\} - \sum T_y$$

Sedangkan untuk menguji signifikansi sehingga dapat ditentukan apakah kedua variable berasosiasi dalam populasi, jika besarnya $N \geq 10$, maka uji signifikansi terhadap nilai r_s yang diperoleh dapat diuji dengan menghitung besarnya nilai t terlebih dahulu, yaitu:

$$t = r_s \sqrt{\frac{N - 2}{1 - r_s^2}}$$

Uji t dilakukan dengan menggunakan $db = N-2$ pada selang kepercayaan $(\alpha) = 95\%$. Untuk mengetahui tingkat signifikansi maka t hit dibandingkan t tab pada taraf kepercayaan 95%. Jika $t_{hit} > t_{tab} 5\%$ maka tolak H_0 artinya terdapat hubungan antara umur, pendidikan, jumlah keluarga, pendapatan, tanggungan keluarga dan jenis usaha dengan kolektibilitas pinjaman UPK. Jika $t_{hit} \leq t_{tab} 5\%$ maka terima H_0 artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur, pendidikan, jumlah keluarga, pendapatan, tanggungan keluarga dan jenis usaha dengan kolektibilitas pinjaman UPK. Uji t yang dilakukan dengan menggunakan $db=n-2$ pada selang kepercayaan 95%.

Dan untuk hipotesis yang diuji adalah:

H_0 : Tidak ada hubungan antara umur, pendidikan, jumlah keluarga, pendapatan, tanggungan keluarga an jenis usaha dengan kolektibilitas pinjaman UPK.

H_1 : Ada hubungan antara umur, pendidikan, jumlah keluarga, pendapatan, tanggungan keluarga dan jenis usaha dengan kolektibilitas pinjaman UPK.

Dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut :

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka terima H_0

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terima H_1 .

BAB V

KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Kabupaten Blitar

5.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Blitar merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang terletak pada $111^{\circ}40'$ – $112^{\circ}10'$ bujur timur dan $7^{\circ}58'-8^{\circ}9'51''$ lintang selatan. daerah ini beriklim tropis dengan rata-rata curah hujannya 1370mm per tahun. suhu udaranya berkisar antara 26°C - 29°C .

Luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.588,79 km² dengan jumlah penduduk 1.297.335 jiwa. Sungai Brantas membelah kabupaten Blitar menjadi dua kawasan yaitu kawasan selatan dan utara. Luas kawasan Blitar selatan adalah 689,85 km² dengan ketinggian tempat antara 100-350 m di atas permukaan laut. sedangkan kawasan Blitar utara dengan luas 898,94 km² berada pada ketinggian antara 167-2800m di atas permukaan laut.

Kabupaten Blitar terdiri dari 22 kecamatan, yaitu kecamatan Bakung, kecamatan Wonotirto, kecamatan Panggungrejo, kecamatan Wates, kecamatan Binangun, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, kecamatan Talun, kecamatan Selopuro, kecamatan Kesamben, kecamatan Selopuro, kecamatan Doko, kecamatan Wlingi, kecamatan Gandusari, kecamatan Garum, kecamatan Nglegok, kecamatan Sanankulon, kecamatan Ponggok, kecamatan Srengat, kecamatan Wonodadi, kecamatan Udanawu.

Batas-batas wilayah Kabupaten Blitar :

Sebelah utara	: Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
Sebelah selatan	: Samudra Indonesia
Sebelah barat	: Kabupaten Tulung Agung dan Kabupaten Kediri
Sebelah timur	: Kabupaten Malang

5.1.2. Keadaan Umum Penduduk

Penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan memegang dua peranan penting yaitu sebagai subyek sekaligus obyek dari pembangunan. Penduduk sebagai subyek pembangunan berarti penduduk merupakan pelaksana

program-program dalam pembangunan. Sedangkan penduduk sebagai obyek pembangunan berarti penduduk sebagai tujuan dari pelaksanaan program-program pembangunan. Oleh karena itu keadaan penduduk perlu diketahui untuk menunjang program-program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Blitar tahun 2006 sebanyak 1.297.335 jiwa terdiri dari 658.099 jiwa laki-laki dan 639.236 jiwa perempuan. Dari 22 kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar, kecamatan Ponggok menempati urutan teratas yang mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu sekitar 103.600 jiwa. Sementara kecamatan lain yang juga berpenduduk cukup besar adalah Kecamatan Garum (82.571 jiwa), Gandusari (79.189 jiwa), Nglegok (77.934 jiwa), Kademangan (77.021 jiwa) dan Kanigoro (74.054 jiwa). Jumlah penduduk masing-masing kecamatan secara lengkap ditunjukkan pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5 . Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2006

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio
Bakung	14.529	14.601	29.130	99,51
Wonotirto	21.114	21.281	42.395	99,22
Panggungrejo	23.293	22.667	45.960	102,76
Wates	17.266	17.274	34.540	99,995
Binangun	24.567	23.713	48.280	103,60
Sutojayan	27.150	27.019	54.169	100,48
Kademangan	38.625	38.396	77.021	100,60
Kanigoro	37.480	36.574	74.054	102,48
Talun	32.828	32.686	65.514	100,43
Selopuro	23.874	23.171	47.045	103,03
Kesamben	29.671	29.818	59.489	99,51
Selorejo	21.586	21.456	43.042	100,61
Doko	23.774	23.916	47.690	99,41
Wlingi	30.047	29.855	59.902	100,64
Gandusari	39.631	39.558	79.189	100,18
Garum	46.534	36.037	82.571	129,13
Nglegok	39.469	38.465	77.934	102,61
Sanankulon	29.841	29.390	59.231	101,53
Ponggok	52.383	51.217	103.600	102,31
Srengat	35.142	34.348	69.490	102,31
Wonodadi	26.808	25.941	52.749	103,34
Udanawu	22.487	21.853	44.340	102,90
Jumlah	658.099	639.236	1.297.335	102,95

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2007

Dari total jumlah penduduk di Kabupaten Blitar 20,96 persen merupakan penduduk miskin yang merupakan sasaran dalam program pengentasan kemiskinan. Strategi pokok upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mencapai sasaran menurunnya populasi penduduk miskin. Penanggulangan masalah kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan kontekstual. Menyeluruh berarti menyangkut seluruh penyebab kemiskinan, sedangkan kontekstual mencakup faktor lingkungan penduduk miskin. Untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat dalam menangani kemiskinan perlu pengkajian yang mendalam tentang profil kemiskinan. Sehingga aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat sesuai dengan karakteristik masyarakat tersebut dan dapat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Berikut disajikan data jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan penduduk miskin di Kabupaten Blitar.

Tabel 6. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Penduduk Miskin Kabupaten Blitar

Kecamatan	Rumah Tangga Miskin (RTM)	Penduduk Miskin
Bakung	3.015	6.002
Wonotirto	3.605	13.831
Panggungrejo	2.812	16.030
Wates	3.728	10.108
Binangun	3.466	12.640
Sutojayan	2.556	4.782
Kademangan	4.748	14.925
Kanigoro	5.565	10.096
Talun	3.554	11.720
Selopuro	2.677	5.876
Kesamben	2.658	16.936
Selorejo	1.914	16.715
Doko	2.285	10.056
Wlingi	3.315	9.694
Gandusari	5.376	19.568
Garum	3.465	11.590
Nglegok	3.956	12.712
Sanankulon	3.744	12.906
Ponggok	7.277	19.570
Srengat	2.776	11.656
Wonodadi	2.765	11.904
Udanawu	2.924	12.556
Jumlah	78.181	271.873

Sumber : PPK Kabupaten Blitar, 2007

Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa jumlah rumah tangga miskin (RTM) di kabupaten Blitar sebanyak 78.181 rumah tangga. Sedangkan total penduduk miskin sebesar 271.873 jiwa. Dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar, kecamatan Ponggok mempunyai jumlah penduduk miskin terbesar. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di kecamatan Ponggok sebanyak 7.277 rumah tangga dengan jumlah penduduk miskin sebesar 19.570 jiwa. Selanjutnya kecamatan yang mempunyai jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) terbanyak setelah kecamatan Ponggok adalah kecamatan Gandusari mempunyai 5.376 RTM dengan 19.568 jiwa penduduk miskin dan kecamatan Kademangan mempunyai 4.748 RTM dengan 14.925 jiwa penduduk miskin. Sedangkan kecamatan di Kabupaten Blitar yang mempunyai Rumah Tangga Miskin (RTM) paling sedikit adalah kecamatan Sutajayan yang mempunyai 2.556 RTM dengan jumlah penduduk miskin 4.782 jiwa.

5.1.3. Keadaan Perekonomian

Struktur perekonomian di Kabupaten Blitar terdiri dari sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan. Pada sektor pertanian, luas sawah di kabupaten Blitar sebesar 19,98 persen dari luas wilayah. Jumlah pekerja pada sektor pertanian menduduki urutan tertinggi yaitu sebesar 59,56 persen atau 335.818 orang dari total angkatan kerja. Sektor pertanian meliputi tanaman pangan, tanaman perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Komoditas unggulan tanaman pangan yang dihasilkan meliputi padi, jagung, kedelai, nanas, rambutan, manggis, alpukat, salak dan cabe.

Sedangkan komoditas perkebunan di Kabupaten Blitar berupa tanaman perkebunan rakyat semusim yaitu tebu, tembakau lokal dan virginia, dan tanaman perkebunan rakyat tahunan yaitu kelapa dan kopi. Jumlah petani tebu masih cukup banyak yaitu 7.707 orang, sedangkan petani kelapa yaitu 34.359 orang dan petani kopi yaitu 3.909 orang. Produksi dari sektor kehutanan berupa kayu jati, kayu bakar jati dan kayu bakar rimba. Produksi peternakan yang paling besar adalah ayam ras yang mengalami kenaikan sebesar 1,34 persen dari 14.180.00 ekor di tahun 2005 menjadi 14.370.800 ekor di tahun 2006. Perikanan di Kabupaten

Blitar berupa ikan darat yaitu gurami dan ikan laut yaitu tongkol, cucut, pari, lemuru, banyar, layang, lobster dan lainnya.

Sektor industri di Kabupaten Blitar didominasi oleh industri kecil dan industri rumah tangga. Jumlah industri kecil pada tahun 2006 sebanyak 11.182 dengan jumlah tenaga kerja 31.837 orang. Dari jumlah industri kecil tersebut, hampir separonya merupakan industri gula kelapa. Berikut ini tabel jumlah industri kecil dan kerajinan rumah tangga dirinci menurut jenis industri terbanyak yang berada di Kabupaten Blitar.

Tabel 7. Jumlah Industri Kecil dan Rumah Tangga Dirinci Menurut Industri di Kabupaten Blitar Tahun 2006

No	Jenis Industri	Industri Kecil	Industri Kerajinan Rumah tangga	Jumlah
1.	Industri Gula Kelapa	6	5.360	5.366
2.	Industri Anyam-anyaman	-	630	630
3.	Industri Tempe	21	431	452
4.	Industri Perajangan Tembakau	-	445	445
5.	Industri Genteng	7	352	359
6.	Industri Mebel Kayu	76	222	298
7.	Industri Tahu	30	220	250
8.	Industri Batu Bata	-	208	208

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2006

Selain tercantum pada Tabel 7 diatas masih ada sekitar 30 jenis industri kecil lainnya yang jumlahnya di bawah 100. Seluruh industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga tersebut tersebar hampir di seluruh kecamatan.

Sedangkan pada sektor perdagangan, adanya peningkatan penguasa untuk mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah SIUP yang dikeluarkan mencapai 825 buah atau meningkat 58,65 persen dibanding tahun 2005. Mengacu pada pelaksanaan UU no.3 th.1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, pemegang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) perseorangan di Kabupaten Blitar juga berkembang menjadi 6.353, atau meningkat 9,01 persen dari tahun sebelumnya.

5.2 Gambaran Umum Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah pengelola Program Gerdu Taskin di tingkat desa/kelurahan. UPK bertanggungjawab terhadap jalannya program Gerdu Taskin. Di Kabupaten Blitar ada UPK penguatan dan UPK non Penguatan. UPK penguatan adalah UPK yang mendapat program lanjutan setelah program awal selesai. Penguatan UPK bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi UPK, menyehatkan dan menyelamatkan UPK yang belum optimal dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Ruang lingkup adanya penguatan UPK adalah peningkatan kapasitas UPK, pengendalian kegiatan dan pendampingan. Dengan adanya penguatan UPK diharapkan UPK dapat mencapai kemandirian menjadi sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sedangkan UPK non penguatan adalah UPK yang tidak atau belum mendapat program lanjutan. Setelah program awal selesai, UPK non penguatan harus menjalankan kinerja UPK sesuai dengan Pedoman umum (Pedum) Gerdu Taskin, dan pengurus UPK harus melaporkan secara rutin kondisi UPK kepada sekretariat tetap (sektap) kabupaten. Dengan adanya pelaporan tersebut instansi terkait dapat melakukan pemantauan terhadap kinerja UPK.

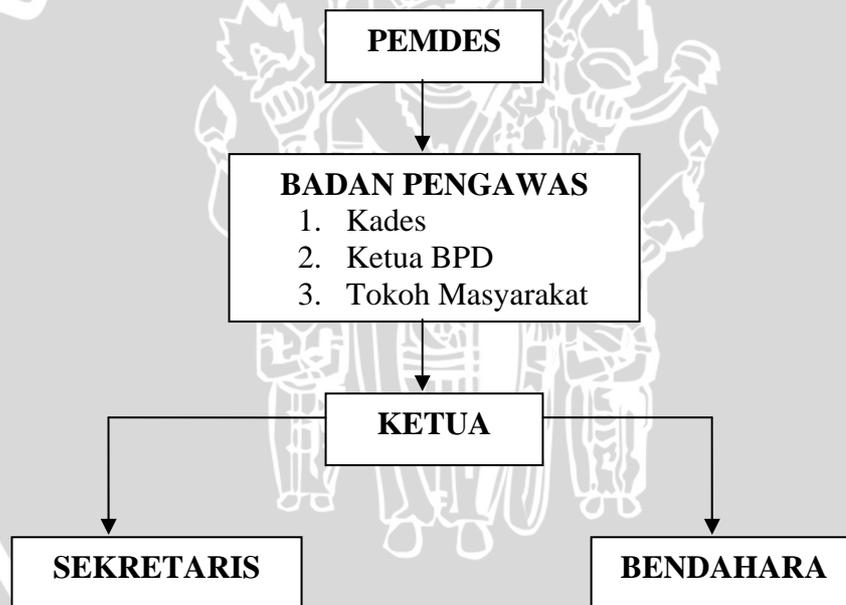
Di Kabupaten Blitar 36 UPK non penguatan yang mendapat program dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dan 12 UPK penguatan yang dimulai pada tahun 2006. Kondisi UPK penguatan saat ini lebih baik dibandingkan sebelum mendapat penguatan. Dilihat dari kelembagaan dan administrasi, kolektibilitas, permodalan, kegiatan usaha UPK dan pelayanan kepada masyarakat di UPK penguatan lebih baik dan teratur di bandingkan di UPK penguatan. Perbedaan antara kondisi UPK penguatan dan UPK non penguatan dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 8. Kondisi UPK Penguatan dan UPK non Penguatan di Kabupaten Blitar

No	Keterangan	UPK Penguatan			UPK non penguatan		
		UPK Mandiri	UPK Cipta Mandiri	UPK Mitra Usaha	UPK Papungan	UPK Artha Mulia	UPK Barokah
1	Kelembagaan dan Administrasi						
	Jumlah pengurus	3	3	4	4	2	3
	Kinerja pengurus	Aktif	Aktif	Aktif	Sebagian Aktif	Aktif	Aktif
	Honor pengurus	Berbeda	Berbeda	Berbeda	Berbeda	Berbeda	Sama
	Legalitas Pengurus UPK	SK Kades	SK Kades dan Perdes	SK Kades	SK Kades	SK Kades	SK Kades
	Job Discription pengurus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Pelaporan dan pertanggungjaban waban	Rutin	Tidak rutin	Rutin	Rutin	Tidak rutin	Rutin
2	Kondisi Kolektibilitas						
	Kolektibilitas	27,9%	50,37%	34,88%	35,27%	16,01%	71,32%
	Penanganan pinj.bermsalah	Perjanjian pelunasan	Surat peringatan	Surat peringatan	Dipanggil ke kantor desa	Tidak ada	Tidak ada
3	Modal UPK						
	Modal Awal	106.000.000	104.725.000	101.205.000	64.000.000	69.300.000	96.890.000
	Asset saat ini	121.691.304	125.670.000	106.829.000	122.190.730	78.849.181	100.155.490
	Sumber Modal	Propinsi Kabupaten	Propinsi Kabupaten	Propinsi Kabupaten	Propinsi Tabungan masyarakat	Propinsi Kabupaten	Propinsi
	Alokasi Modal	Pemberdayaan manusia, usaha, lingkungan, Hibah RTMR	Pemberdayaan manusia, usaha, lingkungan, inventari UPK	Pemberdayaan manusia, usaha, lingkungan	Disalurkan ke RTM	Pemberdayaan manusia, usaha, lingkungan	Pemberdayaan manusia, usaha, lingkungan
4	Kegiatan Usaha						
	Usaha Sektor Riil	Peternakan	Fotocopy	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Kantor UPK	Kantor Desa	Ada	Ada	Rumah pengurus	Kantor desa	Rumah pengurus
	Jadwal Pelayanan UPK	Tanggal 13	Senin- Sabtu	Senin, Rabu, Jum'at	Setiap tanggal 5	Selasa dan Kamis	Insidental
	Peminjam	Pokmas dan Perseorangan	Pokmas dan Perseorangan	Pokmas dan Perseorangan		Pokmas dan perseorangan	Pokmas dan perseorangan
	Jaminan	-	BPKB	BPKB	-	BPKB dan sertifikat tanah	BPKB

Sumber : Data Primer, 2007

Dari Tabel 8 di atas, dijelaskan kondisi UPK Penguatan dan UPK non penguatan. Dilihat dari kondisi kelembagaan dan administrasi, perbedaan UPK penguatan dan UPK non penguatan ada pada jumlah pengurus, legalitas UPK dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Jumlah pengurus di UPK penguatan dan UPK non penguatan ada 2-4 orang. Di UPK Artha Mulia pengurus UPK hanya ada 2 orang, karena salah satu pengurus merupakan perangkat desa sehingga dinon aktifkan dan sampai sekarang belum ada pengganti. Di UPK Papungan dan UPK Mitra Usaha mempunyai 4 orang pengurus yaitu ketua, sekretaris, bendahara dan karyawan. Sedangkan di UPK lainnya jumlah pengurus ada 3 orang. Selain 3 orang pengurus dan karyawan, di UPK penguatan ada badan pengawas yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD dan tokoh masyarakat. Struktur organisasi pengurus UPK di UPK penguatan dapat dilihat pada bagan berikut :



Gambar 4. Struktur Organisasi UPK Penguatan di Kabupaten Blitar

Dilihat dari legalitas pengurus UPK dan laporan pertanggungjawaban juga berbeda-beda antar UPK. Di UPK Cipta Mandiri legalitas pengurus berdasarkan SK Kepala Desa dan Peraturan Desa. Sedangkan di UPK lainnya hanya berdasarkan SK Kepala Desa. Berkaitan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban, UPK Cipta Mandiri dan UPK Artha Mulia tidak rutin

melakukan pelaporan walaupun UPK tersebut sudah membuat laporan kondisi keuangan UPK tetapi tidak dilaporkan kepada Kepala Desa maupun Bappemas. Karena UPK tidak mengetahui format laporan yang harus dilaporkan sehingga laporan yang dibuat hanya sebagai arsip UPK. Sedangkan di UPK lainnya sudah rutin melakukan pelaporan. UPK Papungan membuat laporan 3 bulan sekali dilaporkan kepada Bappemas dan Desa. UPK Mitra Usaha membuat laporan keuangan dan perkembangan satu bulan sekali hanya dilaporkan kepada kepala desa. Sedangkan UPK Mandiri dan UPK Barokah membuat laporan tiga bulan sekali dilaporkan kepada Kepala Desa.

Pengurus UPK sudah mempunyai pembagian tugas (*Job Discription*) yang jelas dan semua aktif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berkaitan dengan honor yang diterima pengurus disesuaikan dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima UPK yang besarnya tiap pengurus berbeda sesuai dengan tanggungjawab pengurus. Honor pengurus sekitar 25% dari SHU yang diterima.

Kolektibilitas pinjaman di setiap UPK berbeda-beda. Kolektibilitas pinjaman terendah sebesar 16,01% di UPK Artha Mulia. UPK Artha Mulia tidak mengirimkan surat peringatan kepada Pokmas yang menunggak untuk melunasi pinjamannya. Peminjam akan segera melunasi pinjaman jika ingin meminjam baru lagi. Sedangkan UPK yang mempunyai kolektibilitas pinjaman tertinggi adalah UPK Barokah. Walaupun UPK Barokah juga tidak memberi surat pemberitahuan pelunasan pinjaman, tetapi kolektibilitasnya tinggi karena kesadaran masyarakat untuk mengembalikan pinjaman juga tinggi. Di UPK Barokah masyarakat saling mengingatkan untuk segera mengembalikan pinjaman jika waktu jatuh tempo agar dana dapat dipinjamkan kepada yang lain.

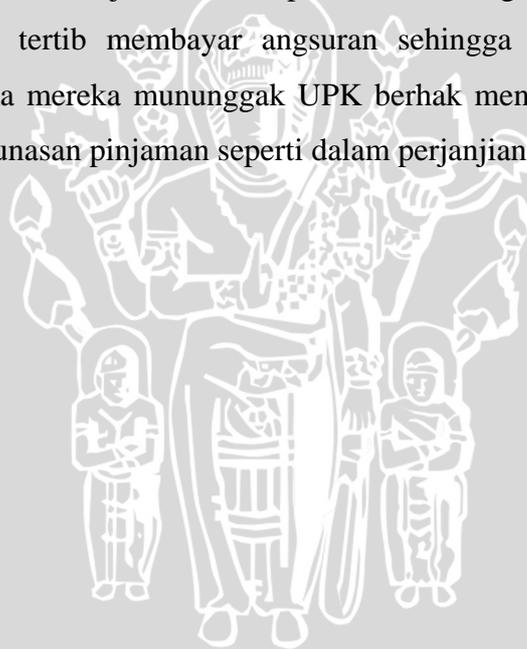
Besar modal yang dimiliki UPK berbeda-beda walaupun tahun program sama. Modal awal yang diterima UPK dari Program Gerdu Taskin berasal dari Propinsi Jawa Timur dan dari dana sharing APBD Kabupaten. Besar Modal awal di UPK penguatan lebih besar dibandingkan di UPK non penguatan. Karena di UPK penguatan setelah adanya program awal mendapat tambahan modal lagi di program penguatan. Besar modal di UPK penguatan berkisar antara Rp 101.205.000,00 sampai dengan Rp 106.000.000,00. Sedangkan di UPK non

penguatan tidak mendapat modal tambahan selain modal di awal program. Besar modal di UPK non penguatan berkisar antara Rp 64.000.000,00 sampai dengan Rp 96.890.000,00. Dana yang diterima tersebut dialokasikan sebagai pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan. Dana untuk pemberdayaan manusia digunakan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan bagi warga. Sedangkan dana pemberdayaan usaha digunakan untuk simpan pinjam pokmas dan dana pemberdayaan lingkungan digunakan untuk membuat atau memperbaiki sarana umum yang ada di desa. Selain untuk memperbaiki sarana dan prasarana umum, dana pemberdayaan lingkungan juga ada yang digunakan untuk pembelian sembako yang dibagikan kepada rumah tangga miskin rentan dan sebagai dana hibah bagi mereka. Dari modal awal yang diberikan, sampai saat ini aset yang ada di UPK terus meningkat. Di UPK Papungan perubahan aset cukup besar, dari modal awal Rp 64.000.000,00 sampai saat ini aset UPK menjadi Rp 122.190.730,00. Di UPK lainnya aset UPK juga meningkat.

Kondisi kegiatan yang dilakukan UPK, di UPK penguatan sebagian sudah mempunyai usaha sektor riil yang dikelola oleh UPK. Usaha tersebut antara lain usaha fotokopi yang ada di UPK Cipta Mandiri dan usaha peternakan di UPK Mandiri. Usaha sektor riil yang dilakukan UPK ada yang swakelola artinya usaha tersebut dikelola sendiri oleh UPK tapi juga ada yang bekerjasama dengan masyarakat. Hasil yang diperoleh dari usaha tersebut digunakan untuk menambah permodalan UPK. Sedangkan di UPK non penguatan belum ada usaha sektor riil. UPK penguatan sudah mempunyai kantor tetap untuk melakukan segala kegiatan UPK. Jadwal pelayanan juga sudah tertib dan teratur. Pelayanan di UPK ada yang dilakukan satu bulan sekali, seminggu 3 kali bahkan ada yang melayani peminjamn setiap hari kerja. Berbeda di UPK non penguatan, pelayanan dan kegiatan UPK dilakukan di rumah salah satu pengurus UPK. Pada awalnya ada UPK yang mempunyai kantor di kantor desa tetapi tidak berlanjut sehingga kegiatan simpan pinjam dialihkan disalah satu rumah pengurus UPK. Jadwal pelayanan juga lebih fleksibel. Ada UPK yang menetapkan jadwal pelayanan

tetapi peminjam kadangkala melakukan simpan pinjam diluar waktu yang telah ditetapkan.

Peminjam di UPK penguatan kebanyakan peminjam perseorangan. Bahkan setelah penguatan hampir seluruh peminjam adalah peminjam perseorangan. Kalaupun ada peminjam pokmas anggotanya tidak terlalu banyak sekitar 2-5 orang. Sedangkan di UPK non penguatan masih banyak peminjam pokmas walaupun ada juga peminjam perseorangan. Jika ada peminjam perseorangan mereka akan dikenakan jasa lebih tinggi sekitar 2-2,5% dan harus memberikan jaminan berupa BPKB. Di UPK non penguatan yang peminjamnya dalam bentuk pokmas tidak ada jaminan apapun Sedangkan peminjam di UPK penguatan harus memberikan jaminan berupa BPKB.. Dengan adanya jaminan peminjam akan lebih tertib membayar angsuran sehingga hampir tidak ada tunggakan. Karena jika mereka mununggak UPK berhak menarik jaminan yang diagunkan sebagai pelunasan pinjaman seperti dalam perjanjian pinjaman.



BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1. Karakteristik Responden

6.1.1 Umur Responden

Umur seseorang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengembalian pinjaman karena secara teoritis semakin dewasa seseorang akan semakin banyak pengalaman dan lebih bertanggung jawab. Sehingga dalam hal pengembalian pinjaman nasabah yang usianya lebih tua akan lebih bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu. Berikut ini disajikan tabel mengenai karakteristik petani sampel berdasarkan umurnya.

Tabel 9. Jumlah Responden Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	UPK Penguatan		UPK non Penguatan	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
25-40	24	54,5	21	35,6
41-55	15	34,1	28	47,5
56-70	5	11,4	10	16,9
Total	44	100	59	100

Sumber: Analisis Data Primer 2007

Tampak pada Tabel 9, bahwa responden di UPK penguatan yang berumur umur 25-40 tahun memiliki jumlah yang paling tinggi yaitu sebanyak 24 orang atau 54,5 persen. Berikutnya adalah kelompok umur 41-55 tahun yaitu sebanyak 15 orang atau 34,1 persen. dan yang paling sedikit jumlahnya adalah responden dengan kelompok umur 56-70 tahun yaitu sebanyak 5 orang atau 11,4 persen. Sedangkan responden di UPK non penguatan yang berumur antara 41-55 tahun mempunyai jumlah terbanyak yaitu 28 orang dengan persentase sebesar 47,5 persen. Selanjutnya adalah responden yang mempunyai kelompok umur 25-40 tahun yaitu 21 orang atau 35,6 persen, dan responden yang berumur 56-70 tahun sebanyak 10 orang atau 16,9 persen.

Umur 25-55 tahun, adalah umur yang tergolong produktif, dimana pada usia produktif seseorang akan mampu memberikan kontribusi cukup baik. Responden dengan usia produktif dan tingkat kedewasaan yang matang akan lebih

mudah dalam memahami sosialisasi suatu program dari pemerintah. Sehingga kesalahfahaman dalam sosialisasi program dapat dihindari.

6.1.2. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan sangat menentukan karakteristik dari seseorang. Tingkat pendidikan formal yang telah dimiliki oleh seseorang, akan mempengaruhi pola pikir dan pengetahuan dari orang tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal seseorang, maka orang tersebut juga akan cenderung lebih terbuka terhadap suatu perubahan dan suatu hal yang baru. Berkaitan dengan hal tersebut, berarti semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang ditempuh oleh responden maka kesadaran akan kewajiban juga akan semakin tinggi sehingga tidak akan melakukan tunggakan pinjaman. Berikut ini disajikan data mengenai karakteristik tingkat pendidikan formal responden berdasarkan pendidikannya:

Tabel 10. Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Pendidikan Formal	UPK Penguatan		UPK non Penguatan	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
SD/Sederajat	28	63,7	27	45,8
SMP/Sederajat	10	22,7	9	15,2
SMA/Sederajat	3	6,8	22	37,3
PT/Sederajat	3	6,8	1	1,7
Total	44	100	59	100

Sumber: Analisis Data Primer 2007

Dari Tabel 10 diatas, dapat diketahui bahwa karakteristik responden menurut tingkat pendidikannya, yang paling dominan di UPK penguatan maupun di UPK non penguatan adalah responden dengan tingkat pendidikan formal Sekolah Dasar (SD), yaitu sebanyak 28 orang atau sebesar 63,7 persen di UPK penguatan dan 27 orang atau 45,8 persen di UPK non penguatan. Sedangkan untuk responden yang telah menempuh pendidikan sampai tingkat SMP adalah sebanyak 10 orang atau sebesar 22,7 persen di UPK penguatan dan 9 orang atau 15,2 persen di UPK non penguatan. Untuk responden yang telah menempuh pendidikan formal sampai tingkat SMA dan Perguruan tinggi di UPK penguatan masing-masing sebanyak 3 orang atau sebesar 6,8 persen, dan di UPK non penguatan responden yang menempuh pendidikan formal sampai SMA sebanyak

22 orang. Sedangkan responden yang menempuh pendidikan formal sampai perguruan tinggi ada 1 orang atau 1,7 persen. Secara umum karakteristik responden menurut tingkat pendidikannya, masih tergolong rendah. Dimana ditunjukkan bahwa responden yang paling banyak hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SD saja, meskipun terdapat responden yang menempuh pendidikan sekolah lanjutan hingga SMP, SMA bahkan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden masih kurang dalam hal pentingnya pendidikan, namun demikian hal ini bisa disebabkan karena faktor budaya, yang menganggap bahwa bekerja untuk mencari nafkah lebih penting jika dibandingkan dengan bersekolah hingga jenjang yang lebih tinggi.

6.1.3. Pendapatan Responden

Besarnya pendapatan diduga berperan dalam pengembalian pinjaman, karena jika pendapatan rendah sedangkan kebutuhan untuk konsumsi belum terpenuhi maka prioritas pemenuhan kebutuhan adalah untuk konsumsi dan menunda untuk membayar pinjaman. Sehingga semakin tinggi tingkat pendapatan maka kolektibilitas pinjaman juga akan semakin lancar. Berikut disajikan data karakteristik mengenai tingkat pendapatan responden.

Tabel 11. Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendapatan

Pendapatan	UPK Penguatan		UPK non Penguatan	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
<400.000	6	13,6	23	39
400.000-600.000	13	29,6	30	50,8
>600.000	25	56,8	6	10,2
Total	44	100	59	100

Sumber: Analisis Data Primer 2007

Dari Tabel 11 diatas, diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan tingkat pendapatannya di UPK penguatan yang paling dominan adalah responden dengan pendapatan diatas Rp 600.000,00 per bulan yaitu sebanyak 25 orang dengan persentase 56,8 persen. Sedangkan responden yang pendapatan per bulannya antara Rp 400.000,00-Rp 600.000,00 sebanyak 13 orang atau sebesar 29,6 persen dan responden dengan tingkat pendapatan kurang dari Rp 400.000,00 hanya 6 orang atau sebesar 13,6 persen. Di UPK non penguatan, yang paling

dominan adalah responden dengan pendapatan antara Rp 400.000,00-Rp 600.000,00 yaitu sebanyak 30 orang atau sebesar 50,8 persen. Berikutnya responden dengan tingkat pendapatan kurang dari Rp 400.000,00 sebanyak 23 orang atau sebesar 39 persen dan responden dengan pendapatan lebih dari Rp 600.000,00 sebanyak 6 orang atau 10,2 persen.

Pendapatan rumah tangga responden rata-rata kecil karena sumber pendapatan peminjam dari usaha kecil. Usaha yang dilakukan responden kebanyakan adalah sebagai pedagang prancangan, pedagang mlijo dan petani.

6.1.4. Jumlah Anggota Keluarga Responden

Jumlah anggota keluarga adalah semua anggota keluarga yang menjadi tanggungan rumah tangga responden. Terkadang anggota keluarga dari rumah tangga miskin tidak hanya terdiri dari keluarga inti saja yaitu istri dan anak-anaknya tetapi dapat juga ayah dan ibu ataupun saudara-saudaranya. Semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin tinggi pula biaya hidup yang harus ditanggung oleh rumah tangga responden. Berikut disajikan data karakteristik responden berdasarkan jumlah anggota keluarga.

Tabel 12. Jumlah Responden Menurut Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah Anggota Keluarga	UPK Penguatan		UPK non Penguatan	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
<3	9	20,4	8	13,6
3-5	34	77,3	48	81,3
>5	1	2,3	3	5,1
Total	44	100	59	100

Sumber: Analisis Data Primer 2007

Dari Tabel 12 diatas, diketahui bahwa responden di UPK penguatan maupun di UPK non penguatan yang terbanyak adalah responden yang mempunyai jumlah anggota keluarga antara 3-5 orang yaitu masing-masing sebanyak 34 orang atau 77,3 persen dan 48 orang atau sebesar 81,3 orang. Responden yang jumlah anggota keluarganya kurang dari 3 orang, sebanyak 9 orang atau 20,4 persen di UPK penguatan dan 8 orang atau sebesar 13,6 persen di UPK non penguatan. Sedangkan responden yang mempunyai jumlah anggota keluarga lebih dari 5 orang di UPK penguatan sebanyak 1 orang atau 2,3 persen

dan di UPK non penguatan sebanyak 3 orang atau 5,1 persen. Secara umum, responden tidak mempunyai anggota keluarga terlalu banyak karena responden yang mempunyai anggota keluarga lebih dari 5 orang hanya 4 responden. Rata-rata keluarga responden hanya mempunyai 2 orang anak saja.

6.1.5. Jumlah Tanggungan Keluarga Responden

Tanggungan keluarga merupakan anggota keluarga yang belum dapat menghasilkan pendapatan sendiri bagi dirinya, dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Tanggungan keluarga yang besar mempunyai pengaruh terhadap jumlah pendapatan yang harus dikeluarkan oleh responden dalam kesehariannya yang akhirnya berdampak pula terhadap tingkat pengembalian pinjaman. Jika tanggungan keluarga tidak terlalu besar maka anggaran pendapatan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok juga tidak akan terlalu besar sehingga ada sisa pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar pinjaman. Berikut disajikan data karakteristik responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.

Tabel 13. Jumlah Responden Menurut Tanggungan Keluarga

Jumlah Tanggungan Keluarga	UPK Penguatan		UPK non Penguatan	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
0-1	17	38,6	26	44,1
2-3	23	52,3	29	49,1
4-5	4	9,1	4	6,8
Total	44	100	59	100

Sumber: Analisis Data Primer 2007

Dari Tabel 13 di atas dapat dilihat bahwa di UPK penguatan dan di UPK non penguatan jumlah tanggungan keluarga responden paling banyak adalah antara 2-3 orang orang yaitu masing-masing 23 orang atau 52,3 persen dan 29 orang atau 49,1 persen. Selanjutnya responden yang mempunyai tanggungan keluarga 0-1 orang di UPK penguatan sebanyak 17 orang atau 38,6 persen dan di UPK non penguatan sebanyak 26 orang atau 44,1 persen. Dan yang terkecil adalah responden yang mempunyai tanggungan keluarga antara 4-5 orang, di UPK penguatan ada 4 orang atau 9,1 persen sedangkan di UPK non penguatan ada 4 orang atau sebesar 6,8 persen. Jumlah tanggungan keluarga responden tidak

terlalu besar, karena sebagian besar dalam satu rumah tangga rata-rata suami istri bekerja. Sedangkan jika ada yang mempunyai anak lulus sekolah lanjutan mereka juga sudah bekerja karena tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.

6.1.6. Jenis Usaha Responden

Tujuan pemberian pinjaman dari UPK adalah sebagai modal untuk meningkatkan usaha peminjam. Jika usaha tersebut dapat meningkat maka pendapatan rumah tangga juga dapat dipastikan akan mengalami peningkatan sehingga kesejahteraan akan tercapai. Adapun jenis usaha dari responden di UPK penguatan dan di UPK non penguatan bermacam-macam. Jenis usaha tersebut dapat dibagi menjadi usaha perdagangan dan non perdagangan. Peminjam yang mempunyai usaha perdagangan diharapkan kolektibilitas pinjaman akan lancar karena disektor perdagangan perputaran modal cepat sehingga akan dapat mengangsur pinjaman setiap bulannya. Pada Tabel 14 berikut disajikan jumlah responden berdasarkan jenis usaha yang dijalankan.

Tabel 14. Jumlah Responden Menurut Jenis Usaha

Jenis Usaha	UPK Penguatan		UPK non Penguatan	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Perdagangan	9	28,1	26	61,9
Non Perdagangan	23	71,9	16	38,1
Jumlah	32	100	42	100

Sumber: Analisis Data Primer 2007

Berdasarkan Tabel 14 di atas dapat diketahui bahwa di UPK penguatan jenis usaha yang dilakukan responden paling banyak adalah dari sektor non perdagangan yaitu sebesar 23 orang atau 71,9 persen. Sedangkan dari sektor perdagangan hanya 9 orang atau sebesar 28,1 persen. Di UPK non penguatan, sektor usaha yang dijalankan responden paling banyak adalah sektor perdagangan yaitu sebanyak 26 orang atau 61,9 persen dan sektor non perdagangan sebanyak 16 orang atau 38,1 persen.

6.1.7. Kolektibilitas Pinjaman Responden

Keberlanjutan UPK sangat tergantung pada tingkat kolektibilitas pinjaman. Jika UPK mempunyai tingkat kolektibilitas tinggi maka perputaran

modal akan cepat sedangkan jika kolektibilitas pinjaman rendah maka modal yang dimiliki UPK tidak akan berkembang cepat, karena UPK tidak dapat menyalurkan dana kepada masyarakat lainnya. Ukuran kolektibilitas adalah ketepatan pembayaran kembali pokok dan jasa oleh peminjam. Berikut ini disajikan tabel tingkat kolektibilitas pinjaman responden.

Tabel 15. Jumlah Responden Menurut Kolektibilitas Pinjaman

Kolektibilitas Pinjaman	UPK Penguatan		UPK non Penguatan	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Tinggi	19	43,2	29	49,2
Rendah	25	56,8	30	50,8
Total	44	100	59	100

Sumber: Analisis Data Primer 2007

Dari Tabel 15 di atas dapat diketahui bahwa kolektibilitas pinjaman responden rendah. Di UPK penguatan maupun di UPK non penguatan responden yang mempunyai kolektibilitas rendah paling besar yaitu masing-masing 25 orang atau sebesar 56,8 persen dan 30 orang atau sebesar 50,8 persen. Sedangkan responden yang mempunyai kolektibilitas pinjaman tinggi di UPK penguatan sebanyak 19 orang atau 43,2 persen dan di UPK non penguatan sebanyak 29 orang atau sebesar 49,2 persen.

6.1.8. Besar Pinjaman

Besar pinjaman yang di berikan UPK kepada rumah tangga miskin tidak terlalu besar berkisar antara Rp 300.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000,00. Karena sasaran dari pemberian pinjaman tersebut adalah untuk pengembangan usaha mikro. Berikut ini disajikan tabel jumlah responden berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan di UPK penguatan dan di UPK non penguatan.

Tabel 16. Jumlah Responden Menurut Besar Pinjaman

Besar Pinjaman	UPK Penguatan		UPK non Penguatan	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
<500.000	24	54,5	7	11,8
500.000-1.000.000	5	11,4	26	44,1
>1.000.000	15	34,1	26	44,1
Total	44	100	59	100

Sumber: Analisis Data Primer 2007

Dari Tabel 16 di atas diketahui bahwa di UPK penguatan responden yang mempunyai besar pinjaman di bawah Rp 500.000,00 ada 24 orang atau 54,5 persen. Sedangkan responden yang besar pinjamannya di atas Rp 1.000.000,00 sebanyak 15 orang atau 34,1 persen. Responden di UPK non penguatan yang memperoleh pinjaman di bawah Rp 500.000,00 hanya ada 7 orang atau 11,8 persen sedangkan responden yang memperoleh pinjaman di atas Rp 1.000.000,00 ada 26 orang atau 44,1 persen.

6.1.9. Alokasi Penggunaan Pinjaman

Pinjaman dari UPK yang diberikan kepada rumah tangga miskin diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki rumah tangga miskin agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga miskin sehingga kemiskinan dapat dikurangi. Dengan pinjaman yang diberikan, rumah tangga miskin dapat mempergunakannya sebagai modal untuk usaha. Tetapi tidak sedikit pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Tabel 17 berikut menunjukkan alokasi penggunaan pinjaman yang telah diterima rumah tangga miskin di UPK penguatan maupun di UPK non penguatan.

Tabel 17. Alokasi Penggunaan Pinjaman di UPK Penguatan dan UPK non Penguatan

No	Alokasi Penggunaan	UPK Penguatan		UPK non Penguatan	
		Jumlah	Prosentase (%)	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Usaha	34	77,3	53	82,8
2.	Konsumsi	10	22,7	11	18,2
	Total	44	100	64	100

Sumber : Data Primer, 2007

Dari Tabel 17 di atas dapat dilihat bahwa alokasi penggunaan pinjaman terbanyak adalah digunakan untuk usaha. Dari 44 rumah tangga di UPK penguatan, rumah tangga yang menggunakan pinjaman untuk modal usaha sebanyak 34 orang atau sebesar 77,3 persen. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan pinjaman untuk kebutuhan konsumsi sebanyak 22,7 persen. Di UPK non penguatan, dari 59 rumah tangga yang menjadi responden 53 orang atau sebesar 82,8 persen pinjaman dari UPK digunakan untuk berusaha.

Sedangkan 11 orang atau sebesar 18,2 persen pinjaman digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Tabel di atas menunjukkan bahwa total di UPK non penguatan adalah 64 orang, hal ini disebabkan ada rumah tangga yang menggunakan pinjaman selain untuk usaha juga digunakan untuk kebutuhan konsumsi.

6.2. Perbandingan pendapatan rumah tangga pada UPK penguatan dan UPK non penguatan

Ada perbedaan rata-rata pendapatan rumah tangga di UPK penguatan dan UPK non penguatan. Rata-rata pendapatan rumah tangga di UPK penguatan sebesar Rp 785.522,00 dengan total pendapatan rumah tangga berkisar antara Rp 250.000,00 sampai dengan Rp 1.890.000,00. Sedangkan rata-rata pendapatan rumah tangga di UPK non penguatan sebesar Rp 432.203,00 dengan total pendapatan rumah tangga berkisar antara Rp 200.000,00 sampai dengan Rp 750.000,00. Perbedaan pendapatan rumah tangga di UPK penguatan dan UPK non penguatan disebabkan karena perbedaan jenis usaha dan skala usaha. Adapun jenis usaha yang dilakukan rumah tangga di UPK penguatan maupun di UPK non penguatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Jenis Usaha Rumah Tangga di UPK Penguatan dan UPK non Penguatan

No	Jenis Usaha	Jumlah	
		UPK Penguatan	UPK non Penguatan
1.	Pedagang Prancangan	4	14
2.	Pedagang Mlijo	5	12
3.	Petani	9	13
4.	Peternak ayam	9	2
5.	Usaha lain	5	1
Total		32	42

Sumber : Data Primer, 2007

Dari Tabel 18 di atas dapat diketahui jumlah dan jenis usaha rumah tangga yang ada di UPK penguatan dan UPK non penguatan. Pedagang prancangan, pedagang mlijo dan petani lebih banyak di UPK non penguatan daripada di UPK penguatan. Sedangkan peternak ayam dan jenis usaha lainnya lebih banyak di UPK penguatan. Jenis usaha lain yang ada di UPK penguatan adalah pengusaha mebel, bengkel, penggilingan padi dan usaha pembuatan batrek. Sedangkan di

UPK non penguatan adalah pembuat rokok. Total rumah tangga yang mempunyai usaha di UPK penguatan sebanyak 32 orang, sedangkan di UPK non penguatan sebanyak 42 orang.

Berdasarkan hasil analisis varians pada output uji t (hasil terlampir) menunjukkan bahwa F_{hitung} untuk pendapatan rumah tangga adalah 8,39 dan F_{tabel} sebesar 1,64. Dengan demikian F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yang artinya terdapat perbedaan yang nyata antara kedua varians. Dari hasil uji t diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 5,6 dengan menggunakan signifikansi (α) 0,01 t_{tabel} 2,326. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka H_0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan rumah tangga di UPK penguatan dan UPK non penguatan pada taraf signifikansi (α) 0,01. Dapat dikatakan juga pendapatan rumah tangga di UPK penguatan lebih besar dibandingkan di UPK non penguatan.

Walaupun jumlah rumah tangga yang mempunyai usaha di UPK non penguatan lebih banyak tetapi rata-rata pendapatan dari masing-masing jenis usaha di UPK penguatan lebih besar daripada rata-rata pendapatan dari masing-masing jenis usaha di UPK non penguatan. Rata-rata pendapatan dari masing-masing jenis usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Rata-rata Pendapatan dari Masing-Masing Jenis Usaha di UPK Penguatan dan UPK non Penguatan

No	Jenis Usaha	Rata-rata Pendapatan		Selisih
		UPK Penguatan	UPK non Penguatan	
1.	Pedagang Pracangan	887.500	471.428,57	416.071,43**)
2.	Pedagang Mlijo	480.000	325.000	155.000*)
3.	Petani ^{a)}	638.888,9	465.384,6	173.504,3**)
4.	Peternak ayam	1.364.000	650.000	714.000**)
5.	Usaha lain	710.000	500.000	210.000*)
	Rata-rata Pendapatan	785.522	432.203	353.319 **)

Sumber : Data Primer, 2007

Keterangan : ^{a)} per musim tanam (4bulan)

*) TS=tidak signifikan

***) Nyata pada tingkat 0,01

Rata-rata pendapatan rumah tangga pedagang pracangan di UPK penguatan sebesar Rp 887.500,00 dengan pendapatan berkisar antara

Rp700.000,00 per bulan sampai dengan Rp 1.250.000,00 per bulan. Sedangkan di UPK non penguatan rata-rata pendapatan pedagang pracangan sebesar Rp 471.428,57 dengan kisaran pendapatan antara Rp 250.000,00 sampai dengan Rp 750.000,00. Jadi selisih rata-rata pendapatan pedagang pracangan di UPK penguatan dan pedagang pracangan di UPK non penguatan sebesar Rp 416.071,43.

Pendapatan pedagang mlijo di UPK penguatan berkisar antara Rp 250.000,00 sampai dengan Rp 750.000,00 dengan rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan sebesar Rp 480.000,00. Sedangkan di UPK non penguatan pendapatan rumah tangga pedagang mlijo berkisar antara Rp 250.000,00 sampai dengan Rp 500.000,00 dengan rata-rata pendapatan per bulan sebesar Rp 325.000,00. Selisih antara rata-rata pendapatan pedagang mlijo di UPK penguatan dengan pedagang mlijo di UPK non penguatan sebesar Rp 155.000,00.

Rata-rata pendapatan rumah tangga petani di UPK penguatan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pendapatan rumah tangga petani di UPK non penguatan. Rata-rata pendapatan rumah tangga petani di UPK penguatan sebesar Rp 638.888,9, sedangkan rata-rata pendapatan rumah tangga petani di UPK non penguatan sebesar Rp 465.384,6. Pendapatan rumah tangga petani di UPK penguatan berkisar antara Rp 400.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00 dan pendapatan rumah tangga di UPK non penguatan berkisar antara Rp 300.000,00 sampai dengan Rp 700.000,00. Pendapatan petani dihitung per musim taman. Satu musim tanam adalah 4 bulan. Selisih rata-rata pendapatan petani di UPK penguatan dan UPK non penguatan sebesar Rp 173.504,30.

Pendapatan rumah tangga peternak ayam di UPK penguatan berkisar antara Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp 1.890.000,00 dengan rata-rata pendapatan per bulan Rp 1.364.000,00. Sedangkan pendapatan rumah tangga peternak ayam di UPK non penguatan berkisar antara Rp 600.000,00 sampai dengan Rp 700.000,00 dengan rata-rata pendapatan per bulan Rp 650.000,00. Jadi selisih rata-rata pendapatan peternak ayam di UPK penguatan dan peternak ayam di UPK non penguatan sebesar Rp 714.000,00.

Selain sebagai pedagang pracangan, pedagang mlijo, petani dan peternak ayam rumah tangga di UPK penguatan maupun di UPK non penguatan ada jenis usaha lain. Jenis usaha lain yang ada tersebut adalah pengusaha mebel, bengkel, penggilingan padi keliling, pembuat batrek dan pembuat rokok. Rata-rata pendapatan dari semua jenis usaha tersebut di UPK penguatan lebih besar dibandingkan di UPK non penguatan. Rata-rata pendapatan rumah tangga di UPK penguatan sebesar Rp 710.000,00, sedangkan di UPK non penguatan sebesar Rp 500.000,00. Selisih rata-rata pendapatan dari jenis usaha lain di UPK penguatan dan UPK non penguatan sebesar Rp 210.000,00.

Perbedaan pendapatan per jenis usaha di UPK penguatan dan UPK non penguatan dianalisis menggunakan uji beda dua rata-rata. Dari analisis tersebut dapat diketahui bahwa hasil uji beda dua rata-rata untuk pendapatan pedagang pracangan menghasilkan F_{hitung} sebesar 0,17 dengan F_{tabel} sebesar 3,41 maka F_{hitung} lebih kecil dibandingkan F_{tabel} . Sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata antara kedua varians. Dari hasil uji t diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 5,33 dengan menggunakan signifikansi (α) 0,01 t_{tabel} 2,583. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka H_0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan pedagang pracangan di UPK Penguatan dan UPK non Penguatan pada taraf signifikansi (α) 0,01. Dapat dikatakan juga pendapatan pedagang pracangan di UPK penguatan lebih besar dibandingkan di UPK non penguatan. Pendapatan pedagang pracangan di UPK penguatan lebih besar dibandingkan di UPK non penguatan karena skala usaha pedagang pracangan di UPK penguatan lebih besar. Kebanyakan pedagang pracangan di UPK penguatan mempunyai toko yang besar dan barang dagangan yang banyak serta perputaran uang dari berdagang cepat.

Sedangkan hasil uji beda dua rata-rata untuk pendapatan pedagang mlijo menghasilkan F_{hitung} sebesar 7,05 dengan F_{tabel} sebesar 3,36 maka F_{hitung} lebih besar dibandingkan F_{tabel} . Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara kedua varians. Dari hasil uji t diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 1,62 dengan menggunakan signifikansi (α) 0,05 t_{tabel} 1,753 . Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat

perbedaan yang nyata antara pendapatan pedagang mlijo di UPK Penguatan dan UPK non Penguatan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pendapatan pedagang mlijo di UPK penguatan sama dengan pendapatan pedagang mlijo di UPK non penguatan. Pendapatan pedagang mlijo di UPK penguatan hampir sama dengan pendapatan pedagang mlijo di UPK non penguatan. Karena skala usaha pedagang mlijo rata-rata hampir sama. Pedagang mlijo di UPK penguatan maupun di UPK penguatan kebanyakan berdagang keliling. Jenis barang dan kuantitas barang yang dijual hampir sama, sehingga pendapatannya pun tidak jauh berbeda.

Hasil uji beda dua rata-rata untuk pendapatan petani menghasilkan F_{hitung} sebesar 4,05 dengan F_{tabel} sebesar 2,85 maka F_{hitung} lebih besar dibandingkan F_{tabel} . Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara kedua varians. Dari hasil uji t diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,09 dengan menggunakan signifikansi (α) 0,01 t_{tabel} 0,08. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka H_0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan petani di UPK Penguatan dan UPK non Penguatan pada taraf signifikansi (α) 0,01. Dapat dikatakan juga pendapatan petani di UPK penguatan lebih besar dibandingkan di UPK non penguatan. Perbedaan pendapatan petani salah satunya dipengaruhi oleh luas lahan yang dimiliki. Rata-rata petani di UPK penguatan mempunyai lahan yang lebih luas dibandingkan petani di UPK non penguatan.

Sedangkan hasil uji beda dua rata-rata untuk pendapatan peternak ayam menghasilkan F_{hitung} sebesar 23,21 dengan F_{tabel} sebesar 238,9 maka F_{hitung} lebih besar dibandingkan F_{tabel} . Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara kedua varians. Dari hasil uji t diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,86 dengan menggunakan signifikansi (α) 0,01 t_{tabel} 2,82. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka H_0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan peternak ayam di UPK Penguatan dan UPK non Penguatan pada taraf signifikansi (α) 0,01. Dapat dikatakan juga pendapatan peternak ayam di UPK penguatan lebih besar dibandingkan di UPK non penguatan. Perbedaan pendapatan peternak ayam di UPK penguatan dan di UPK non penguatan disebabkan karena skala usahanya berbeda. Hal ini dapat dilihat

dari jumlah ternak yang dimiliki peternak. Peternak di UPK penguatan mempunyai ternak berkisar antara 1.500 ekor sampai dengan 3.000 ekor. Sedangkan peternak di UPK non penguatan berkisar antara 300 ekor sampai dengan 750 ekor.

Hasil uji beda dua rata-rata untuk jenis usaha lain didapatkan t_{hitung} sebesar 0,62 dengan signifikansi (α) 0,05 t_{tabel} 2,132. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil dibandingkan t_{tabel} maka H_0 diterima artinya tidak ada perbedaan pendapatan di UPK penguatan dan UPK non penguatan. Jenis usaha lain di UPK penguatan lebih banyak dibandingkan di UPK non penguatan tetapi skala usaha di UPK non penguatan lebih besar sehingga pendapatan dari jenis usaha lain di UPK penguatan hampir sama dengan pendapatan di UPK non penguatan.

Dari hasil analisis pendapatan tersebut di atas bahwa dari pendapatan masing-masing jenis usaha di UPK Penguatan dan di UPK non Penguatan berbeda nyata. Hal ini disebabkan karena skala usaha rumah tangga di UPK Penguatan lebih besar sehingga pendapatan rumah tangga lebih besar dibandingkan di UPK non Penguatan.

6.3. Hubungan faktor sosial ekonomi dengan kolektibilitas pinjaman

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berbeda akan memperlihatkan respon terhadap suatu program yang berbeda pula. Pada suatu masyarakat tertentu kesadaran untuk mengembalikan pinjaman sangat tinggi, tetapi pada masyarakat atau sistem sosial yang lain dapat terjadi hal yang sebaliknya. Kondisi sosial ekonomi yang ada pada masyarakat miskin seperti umur, pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, tanggungan keluarga dan jenis usaha akan mempengaruhi dalam mengembalikan pinjaman. Dengan demikian, faktor sosial ekonomi perlu diperhatikan untuk mengurangi terjadinya penunggakan. Berikut ini dijelaskan hubungan faktor sosial ekonomi dengan kolektibilitas pinjaman.

6.3.1 Hubungan umur dengan kolektibilitas pinjaman

Secara teoritis semakin dewasa seseorang semakin banyak pengalaman dan akan lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan (Rogers dan Shoumaker *dalam* Darojatun, 2004) sehingga mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap pengembalian pinjaman. Seseorang yang telah berusia diatas 30

tahun, secara psikologis telah lebih dewasa dalam berpikir sehingga lebih dapat bijaksana dalam bermasyarakat. Mereka dijadikan tokoh yang menjadi rujukan terhadap persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan begitu diharapkan mereka lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Dalam hal pengembalian pinjaman, masyarakat yang telah tua akan lebih lancar kolektibilitas pinjamannya. Karena masyarakat yang mempunyai usia tua seharusnya mempunyai tanggung jawab lebih dalam hal pengembalian pinjaman.

Dari masing-masing kelompok umur akan menunjukkan tingkat kolektibilitas pinjaman yang berbeda. Berikut ini disajikan tingkat kolektibilitas pinjaman berdasarkan kelompok umur.

Tabel 20. Kolektibilitas Pinjaman Berdasar Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Kolektibilitas Pinjaman
1.	25-40	55,55
2.	41-55	41,54
3.	56-70	49,95

Sumber : Analisis Data Primer, 2007

Dari Tabel 20 di atas dapat diketahui bahwa tingkat kolektibilitas pinjaman tertinggi terdapat pada kelompok umur muda yaitu kelompok umur 25-40 tahun sebesar 55,55 persen dan yang paling rendah adalah pada kelompok umur 41-55 tahun dengan kolektibilitas pinjaman sebesar 41,54 persen.

Berkaitan dengan kolektibilitas pinjaman dalam hubungannya dengan umur dan status UPK dapat diketahui persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen pada Tabel 21.

Tabel 21. Persentase Responden dengan Kolektibilitas Pinjaman di atas 50 persen Menurut Umur dan Status UPK

No	Uraian	Persentase (%)
1.	Status UPK	
a.	UPK Penguatan	43,2
b.	UPK non Penguatan	49,2
2.	Umur Responden	
a.	25-40	53,3
b.	41-55	44,2
c.	56-70	33,3
3.	Interaksi status UPK dengan umur responden	
a.	UPK Penguatan – 25-40	54,2
b.	UPK Penguatan – 41-55	33,3
c.	UPK Penguatan – 56-70	20
d.	UPK non Penguatan – 25-40	52,4
e.	UPK non Penguatan – 41-55	50
f.	UPK non Penguatan – 56-70	40

Sumber : Analisis data primer, 2007

Dari Tabel 21 di atas tampak bahwa berdasar status UPK kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen di UPK Penguatan dan UPK non penguatan tidak berbeda nyata. Kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen di UPK penguatan sebesar 43,2 persen dan di UPK non penguatan sebesar 49,2 persen. Berdasarkan status UPK maka kolektibilitas pinjaman tergolong kolektibilitas pinjaman rendah. Sedangkan berdasarkan kelompok umur, semakin tua umur responden semakin rendah yang mempunyai kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen. Kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen pada kelompok umur 25-40 tahun sebesar 53,3 persen sedangkan pada kelompok umur 56-70 sebesar 33,3 persen. Berdasarkan interaksi antara status UPK dengan umur, di UPK penguatan antara kelompok umur muda dan kelompok umur tua dengan kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen berbeda nyata. Kelompok umur 25-40 tahun responden dengan kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen sebesar 54,2 persen sedangkan pada kelompok umur 41-55 tahun sebesar 33,3 persen dan pada kelompok umur 56-70 tahun sebesar 20 persen. Sedangkan di UPK non penguatan responden dengan kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen antara kelompok umur muda dan kelompok umur tua tidak berbeda nyata. Pada kelompok umur 25-40 tahun responden dengan kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen sebesar 52,4 persen sedangkan pada kelompok umur

41-55 tahun sebesar 50 persen dan pada kelompok umur 56-70 tahun sebesar 40 persen.

Persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen berdasarkan interaksi status UPK dengan umur dapat gambarkan pada diagram berikut:

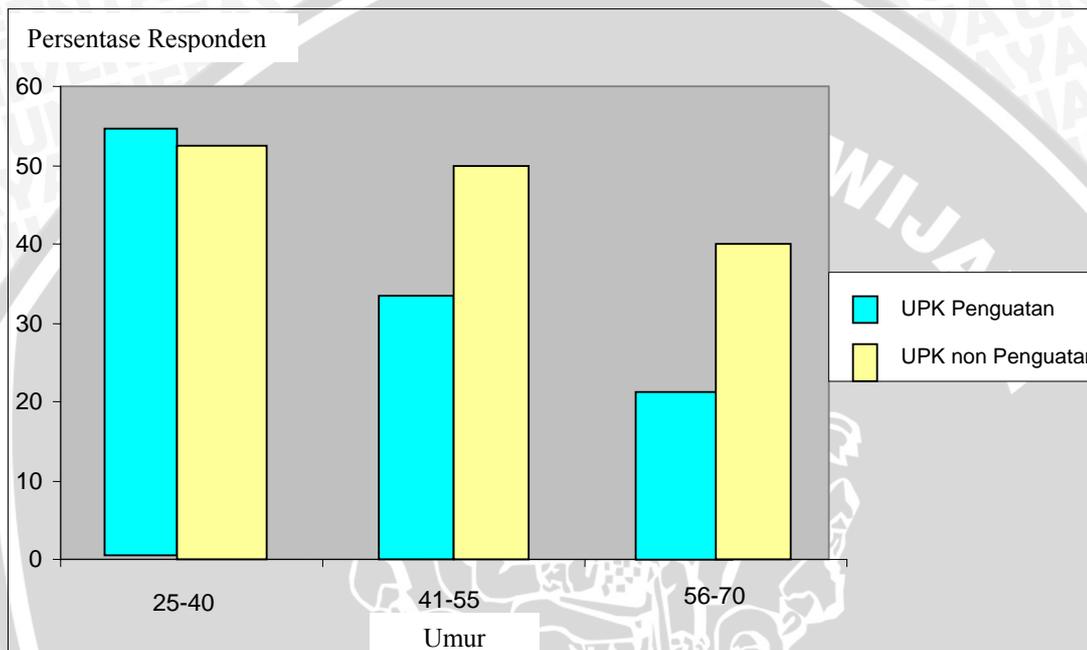


Diagram 1. Persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen berdasarkan interaksi status UPK dengan umur

Berkaitan dengan kolektibilitas pinjaman dalam hubungannya dengan faktor umur berdasarkan Diagram 1, umur berhubungan dengan kolektibilitas pinjaman, semakin tua umur responden semakin rendah kolektibilitas pinjamannya. Tetapi setelah diuji statistika menggunakan Rank Spearman ternyata umur tidak berhubungan dengan kolektibilitas pinjaman. Berdasarkan perhitungan analisis korelasi Rank Spearman (Lampiran 4.) telah diketahui bahwa dengan Koefisien Korelasi (r_s) sebesar -0,073 dan $t_{hitung} = -0,74$ pada tingkat kepercayaan sebesar 95%, dengan $db = 101$ dan $t_{tabel} = 1,645$. Telah diperoleh bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$, yang berarti bahwa terima H_0 dan Tolak H_1 . Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara faktor umur dengan kolektibilitas pinjaman.

Menurut hasil penelitian setelah diuji statistika menggunakan Rank Spearman, ternyata umur seseorang tidak ada hubungan dengan kolektibilitas pinjaman. Berdasarkan kondisi dilapang, menunjukkan bahwa semakin tua seseorang yang mempunyai kolektibilitas pinjaman tinggi semakin rendah. Kolektibilitas pinjaman tinggi lebih banyak pada kelompok usia muda Jadi, semakin tua umur seseorang tidak menyebabkan semakin tinggi kolektibilitas pinjamannya.

6.3.2 Hubungan pendidikan dengan kolektibilitas pinjaman

Masyarakat yang tingkat pendidikannya lebih tinggi akan mempunyai kesadaran yang tinggi akan kewajibannya dalam pengembalian pinjaman sehingga tidak akan melakukan tunggakan. Karena tingkat pengetahuan yang lebih tinggi maka akan mudah menerima sosialisasi dari suatu program dan kecil kemungkinan terjadi kesalahpahaman. Tingkat pendidikan tinggi akan membentuk jiwa yang bertanggung jawab dan lebih paham terhadap tujuan dari program-program pemerintah. Sehingga masyarakat yang mempunyai pendidikan lebih tinggi diharapkan akan mendukung dan melaksanakan suatu program sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi maka kolektibilitas pinjaman juga akan lebih tinggi dibandingkan kolektibilitas pinjaman masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Berikut ini disajikan tabel kolektibilitas pinjaman berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 22. Kolektibilitas Pinjaman Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Kolektibilitas Pinjaman
1.	SD	39,08
2.	SMP	55,3
3.	SMA	59,73
4.	SI	41,05

Sumber : Analisis Data Primer, 2007

Dari Tabel 22 di atas diketahui bahwa tingkat kolektibilitas pinjaman tertinggi adalah pada kelompok responden yang mempunyai tingkat pendidikan SMA yaitu sebesar 59,73 persen dan yang terendah adalah pada kelompok responden yang mempunyai tingkat pendidikan SD yaitu sebesar 39,08 persen.

Berkaitan dengan kolektibilitas pinjaman dalam hubungannya dengan tingkat pendidikan dan status UPK dapat diketahui persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen pada Tabel 23.

Tabel 23. Persentase Responden dengan Kolektibilitas Pinjaman di atas 50 persen Menurut Tingkat Pendidikan dan Status UPK

No	Uraian	Persentase (%)
1.	Status UPK	
a.	UPK Penguatan	43,2
b.	UPK non Penguatan	49,2
2.	Pendidikan Responden	
a.	SD	35,9
b.	SMP	63,2
c.	SMA	60
d.	S1	25
3.	Interaksi Status UPK dengan Pendidikan Responden	
a.	UPK Penguatan – SD	35,7
b.	UPK Penguatan – SMP	70
c.	UPK Penguatan – SMA	66,7
d.	UPK Penguatan – S1	0
e.	UPK non Penguatan – SD	34,6
f.	UPK non Penguatan – SMP	55,6
g.	UPK non Penguatan – SMA	59,1
h.	UPK non Penguatan – S1	100

Sumber : Analisis data primer, 2007

Dari Tabel 23 di atas tampak bahwa berdasar status UPK kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen di UPK Penguatan dan UPK non penguatan tidak berbeda nyata. Kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen di UPK penguatan sebesar 43,2 persen dan di UPK non penguatan sebesar 49,2 persen. Berdasarkan status UPK maka kolektibilitas pinjaman tergolong kolektibilitas pinjaman rendah. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, responden dengan kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen terbesar adalah responden dengan tingkat pendidikan SMP yaitu sebesar 63,2 persen selanjutnya responden dengan pendidikan SMA sebesar 60 persen. Kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen pada tingkat pendidikan SD sebesar 35,9 persen sedangkan pada tingkat pendidikan S1 sebesar 25 persen. Berdasarkan interaksi status UPK dengan tingkat pendidikan, di UPK penguatan antara responden dengan tingkat pendidikan menengah mempunyai

kolektibilitas pinjaman lebih tinggi dibanding responden dengan tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan tinggi. Responden dengan tingkat pendidikan SD persentase dengan kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen sebesar 35,7 persen. Responden dengan tingkat pendidikan SMP dan SMA masing-masing 70 persen dan 66,7 persen dan responden dengan tingkat pendidikan S1 tidak ada yang mempunyai kolektibilitas diatas 50 persen. Sedangkan di UPK non penguatan responden semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar responden dengan kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen. Responden dengan tingkat pendidikan SD persentase kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen sebesar 34,6 persen, responden dengan tingkat pendidikan SMP sebesar 55,6 persen dan responden dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 59,1 persen serta responden dengan tingkat pendidikan S1 sebesar 100 persen.

Persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen berdasarkan interaksi status UPK dengan tingkat pendidikan dapat gambarkan pada diagram berikut:

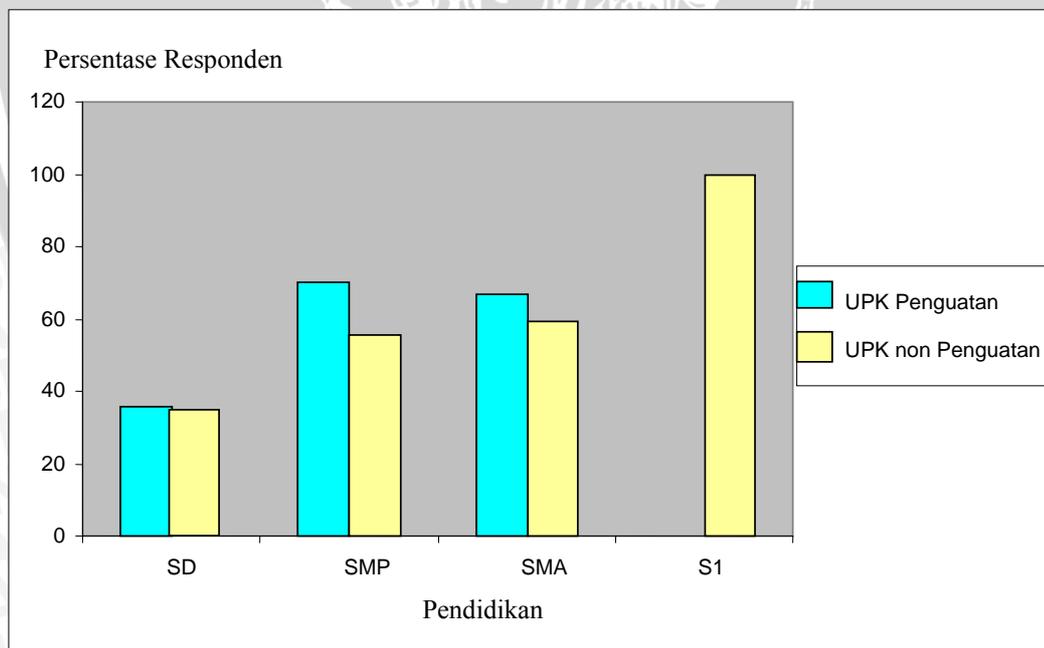


Diagram 2. Persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen berdasarkan interaksi status UPK dengan tingkat pendidikan

Berkaitan dengan kolektibilitas pinjaman dalam hubungannya dengan faktor tingkat pendidikan berdasarkan Diagram 2, pendidikan berhubungan

dengan kolektibilitas pinjaman. Semakin tinggi tingkat pendidikan responden semakin tinggi kolektibilitas pinjamannya. Hal ini didukung dengan uji statistika menggunakan Rank Spearman bahwa tingkat pendidikan berhubungan dengan kolektibilitas pinjaman. Berdasarkan perhitungan analisis korelasi Rank Spearman (Lampiran 5.) telah diketahui bahwa dengan Koefisien Korelasi (r_s) sebesar 0,18 dan $t_{hitung} = 1,84$ pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, dengan $db = 101$ dan $t_{tabel} = 1,645$. Telah diperoleh bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yang berarti bahwa terima H_1 dan Tolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara faktor tingkat pendidikan dengan kolektibilitas pinjaman.

Menurut kondisi di lapang hasil dari penelitian, pendidikan masyarakat yang paling banyak adalah Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Masyarakat yang berpendidikan strata I (S1) sangat sedikit. Masyarakat yang melakukan tunggakan salah satunya karena salah persepsi terhadap Program Gerdu Taskin yang menganggap bantuan yang disalurkan berupa hibah dan tidak wajib mengembalikan.

6.3.3 Hubungan pendapatan dengan kolektibilitas pinjaman

Pendapatan merupakan salah satu faktor terjadinya penunggakan kredit. Karena jika pendapatan rumah tangga rendah dan hanya cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari maka peminjam akan cenderung melakukan penundaan dalam pengembalian pinjaman karena alokasi pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu. Sehingga masyarakat dengan pendapatan rendah, pengembalian pinjaman menjadi kurang lancar. Sedangkan pada masyarakat dengan pendapatan tinggi cenderung kolektibilitas pinjaman lebih tinggi karena ada alokasi pendapatan untuk mengembalikan pinjaman. Masyarakat dengan pendapatan yang lebih tinggi akan tercukupi kebutuhan pokoknya bahkan ada kelebihan pendapatan untuk mengembalikan pinjaman. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang akan menyebabkan semakin lancar pengembalian pinjaman sehingga kolektibilitas pinjaman tinggi. Berikut ini disajikan tabel kolektibilitas pinjaman berdasarkan pendapatan.

Tabel 24. Kolektibilitas Pinjaman Berdasarkan Pendapatan

No.	Pendapatan	Kolektibilitas Pinjaman
1.	< 400.000	34,06
2.	400.000-600.000	41,99
3.	> 600.000	69,82

Sumber : Analisis Data Primer, 2007

Dari Tabel 24 di atas dapat diketahui bahwa semakin besar tingkat pendapatan semakin besar kolektibilitas pinjaman. Kolektibilitas pinjaman pada kelompok responden dengan pendapatan kurang dari Rp 400.000,00 sebesar 34,06 persen dan kolektibilitas pinjaman pada kelompok responden dengan pendapatan lebih dari Rp 600.000,00 sebesar 69,82 persen.

Berkaitan dengan kolektibilitas pinjaman dalam hubungannya dengan pendapatan dan status UPK dapat diketahui persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen pada Tabel 25.

Tabel 25. Persentase Responden dengan Kolektibilitas Pinjaman di atas 50 persen Menurut Pendapatan dan Status UPK

No	Uraian	Persentase (%)
1. Status UPK		
a.	UPK Penguatan	43,2
b.	UPK non Penguatan	49,2
2. Pendapatan Responden		
a.	Kurang dari Rp 400.000,00	31
b.	Antara Rp 400.000,00-Rp 600.000,00	54,5
c.	Lebih dari Rp 600.000,00	70
3. Interaksi Status UPK dengan Pendapatan Responden		
a.	UPK Penguatan – Kurang dari Rp 400.000,00	16,7
b.	UPK Penguatan – Antara Rp 400.000,00-Rp 600.000,00	15,4
c.	UPK Penguatan – Lebih dari Rp 600.000,00	64
d.	UPK non Penguatan – Kurang dari Rp 400.000,00	34,8
e.	UPK non Penguatan – Antara Rp 400.000,00-Rp 600.000,00	53,3
f.	UPK non Penguatan – Lebih dari Rp 600.000,00	83,3

Sumber : Analisis data primer, 2007

Dari Tabel 25 di atas tampak bahwa berdasar status UPK kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen di UPK Penguatan dan UPK non penguatan tidak berbeda nyata. Kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen di UPK penguatan sebesar

43,2 persen dan di UPK non penguatan sebesar 49,2 persen. Sedangkan berdasarkan tingkat pendapatan, semakin besar pendapatan semakin besar persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen. Persentase responden dengan tingkat pendapatan kurang dari Rp 400.000,00 sebesar 31 persen, sedangkan responden dengan tingkat pendapatan antara Rp 400.000,00 – Rp 600.000,00 sebesar 54,5 persen dan responden dengan tingkat pendapatan lebih dari Rp 600.000,00 sebesar 70 persen. Berdasarkan interaksi status UPK dengan tingkat pendapatan, di UPK penguatan dan UPK non penguatan responden dengan tingkat pendapatan rendah dan responden dengan tingkat pendapatan tinggi yang mempunyai kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen berbeda nyata.

Persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen berdasarkan interaksi status UPK dengan tingkat pendapatan dapat gambarkan pada diagram berikut:

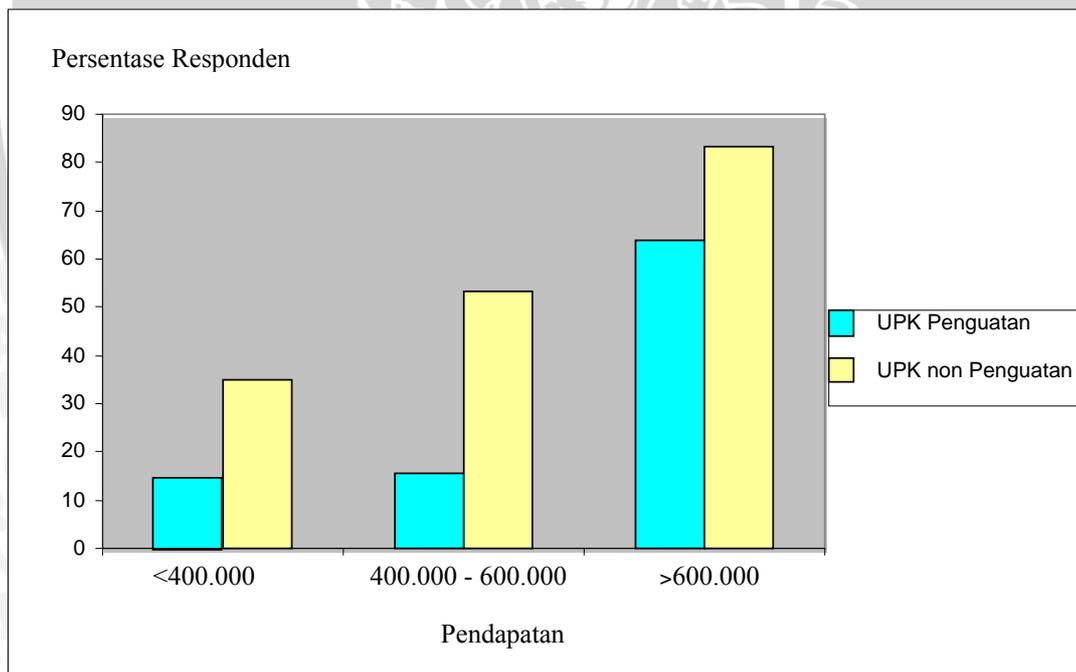


Diagram 3. Persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen berdasarkan interaksi status UPK dengan tingkat pendapatan

Berkaitan dengan kolektibilitas pinjaman dalam hubungannya dengan faktor pendapatan, telah diketahui bahwa berdasarkan perhitungan analisis korelasi Rank Spearman (Lampiran 6.) dengan Koefisien Korelasi (r_s) sebesar

0,32 dan $t_{hitung} = 3,39$ pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, dengan $db = 101$ dan $t_{tabel} = 1,645$. Telah diperoleh bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yang berarti bahwa terima H_1 dan Tolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara faktor pendapatan dengan kolektibilitas pinjaman.

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa peminjam yang mempunyai pendapatan rumah tangga besar kolektibilitas pinjaman tinggi. Sedangkan peminjam yang pendapatan rumah tangganya kecil kolektibilitas pinjaman juga cenderung rendah. Dengan pendapatan yang besar maka kebutuhan pokok keluarga dapat terpenuhi sehingga ada alokasi untuk mengembalikan pinjaman.

6.3.4 Hubungan jumlah anggota keluarga dengan kolektibilitas pinjaman

Jumlah anggota yang besar pada keluarga miskin mempunyai pengaruh yang besar pula terhadap kebutuhan sehari-hari, karena biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mengalami kesulitan dan hambatan (Susanti,2006). Jika rumah tangga mempunyai anggota keluarga yang besar sedangkan pendapatan kecil maka alokasi pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dahulu sehingga kewajiban untuk mengembalikan pinjaman akan tertunda. Jadi, jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi kolektibilitas pinjaman. Berikut ini disajikan tabel kolektibilitas pinjaman berdasarkan jumlah anggota keluarga.

Tabel 26. Kolektibilitas Pinjaman Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga

No.	Σ Anggota Keluarga	Kolektibilitas Pinjaman
1.	< 3	50,19
2.	3-5	48,21
3.	> 5	40,19

Sumber : Analisis Data Primer, 2007

Dari Tabel 26 di atas dapat diketahui bahwa semakin kecil jumlah anggota keluarga, semakin besar kolektibilitas pinjaman. Responden dengan jumlah anggota keluarga kurang dari 3 orang mempunyai kolektibilitas pinjaman tertinggi yaitu sebesar 50,19 persen dan responden yang mempunyai jumlah anggota keluarga lebih dari 5 orang mempunyai kolektibilitas pinjaman terendah yaitu sebesar 40,19 persen.

Berkaitan dengan kolektibilitas pinjaman dalam hubungannya dengan jumlah anggota keluarga dan status UPK dapat diketahui persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen pada Tabel 27.

Tabel 27. Persentase Responden dengan Kolektibilitas Pinjaman di atas 50 persen Menurut Jumlah Anggota Keluarga dan Status UPK

No	Uraian	Persentase (%)
1.	Status UPK	
a.	UPK Penguatan	43,2
b.	UPK non Penguatan	49,2
2.	Jumlah anggota keluarga responden	
a.	Kurang dari 3 orang	47,1
b.	Antara 3-5 orang	46,3
c.	Lebih dari 5 orang	50
3.	Interaksi status UPK dengan jumlah anggota keluarga responden	
a.	UPK Penguatan – Kurang dari 3 orang	22,2
b.	UPK Penguatan – Antara 3-5 orang	47,1
c.	UPK Penguatan – Lebih dari 5 orang	100
d.	UPK non Penguatan – Kurang dari 3 orang	75
e.	UPK non Penguatan – Antara 3-5 orang	45,8
f.	UPK non Penguatan – Lebih dari 5 orang	33,3

Sumber : Analisis data primer, 2007

Dari Tabel 27 di atas tampak bahwa berdasar status UPK kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen di UPK Penguatan dan UPK non penguatan tidak berbeda nyata. Kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen di UPK penguatan sebesar 43,2 persen dan di UPK non penguatan sebesar 49,2 persen. Sedangkan berdasarkan jumlah anggota keluarga kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen juga tidak berbeda rata. Responden dengan jumlah anggota keluarga kurang dari 3 orang sebesar 47,1 persen, sedangkan responden dengan jumlah anggota antara 3-5 orang sebesar 46,3 persen dan responden dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 5 orang sebesar 50 persen. Berdasarkan interaksi status UPK dengan jumlah anggota keluarga, di UPK penguatan responden dengan kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen berbeda nyata. Semakin banyak jumlah anggota keluarga semakin tinggi kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen. Sedangkan di UPK non penguatan semakin banyak jumlah anggota keluarga semakin rendah kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen.

Persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen berdasarkan interaksi status UPK dengan jumlah anggota keluarga dapat gambarkan pada diagram berikut:

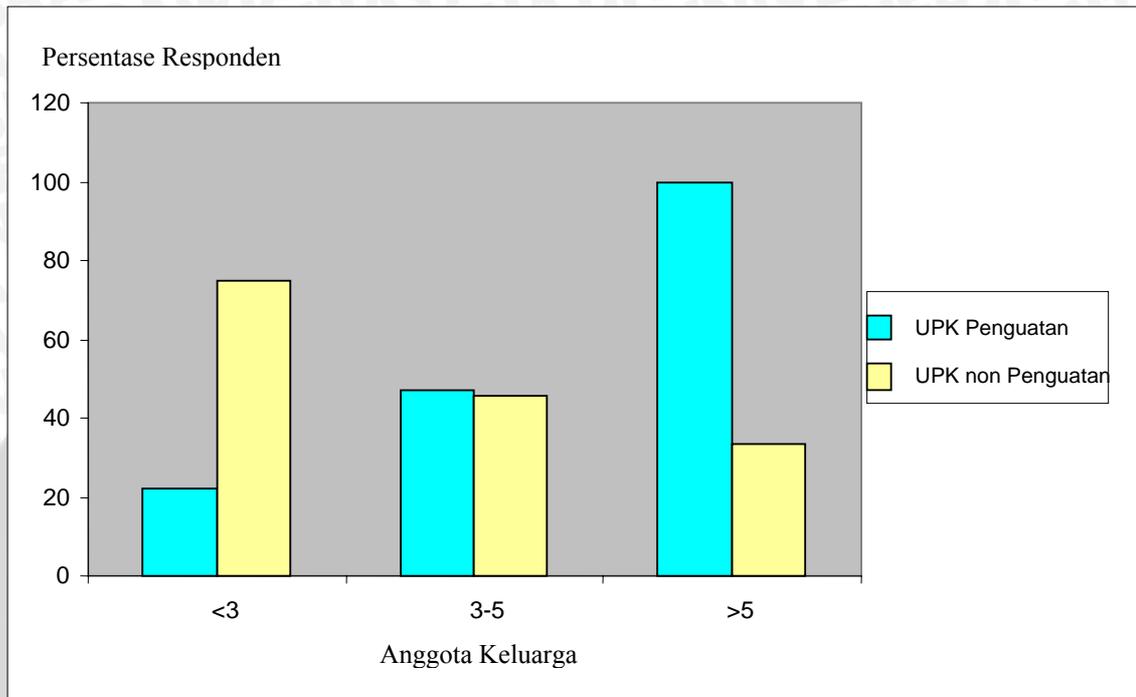


Diagram 4. Persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen berdasarkan interaksi status UPK dengan jumlah anggota keluarga

Berdasarkan Diagram 4, bahwa dilihat dari status UPK ada hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan kolektibilitas pinjaman. Tetapi setelah diuji statistika menggunakan Rank Spearman tidak ada hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan kolektibilitas pinjaman. Berdasarkan perhitungan analisis korelasi Rank Spearman (Lampiran 7) telah diketahui bahwa dengan Koefisien Korelasi (r_s) sebesar -0,11 dan $t_{hitung} = -1,11$ pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, dengan db = 101 dan $t_{tabel} = 1,645$. Telah diperoleh bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$, yang berarti bahwa terima H_0 dan Tolak H_1 . Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara faktor jumlah anggota keluarga dengan kolektibilitas pinjaman.

Melihat kondisi di lapang bahwa rumah tangga yang jumlah anggota keluarganya besar maka jumlah anggota keluarga yang bekerja juga besar sehingga kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi dan pengembalian pinjaman

lancar. Tetapi ada juga rumah tangga peminjam yang anggota keluarganya kecil tetapi tidak mau mengembalikan pinjaman dengan alasan bahwa peminjam lain tidak mau mengembalikan. Jadi jumlah anggota keluarga tidak ada hubungan dengan kolektibilitas pinjaman UPK Gerdu Taskin di Kabupaten Blitar.

6.3.5 Hubungan tanggungan keluarga dengan kolektibilitas pinjaman

Tanggungan keluarga yang besar mempunyai pengaruh terhadap jumlah pendapatan yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga peminjam dalam kesehariannya yang akhirnya berdampak pula terhadap tingkat pengembalian pinjaman. Jika tanggungan keluarga besar maka kebutuhan pokok rumah tangga besar sehingga porsi dari pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokok juga besar. Hal ini menyebabkan tingkat pengembalian pinjaman rendah, karena alokasi pendapatan rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu. Baru setelah ada sisa dari pendapatan digunakan untuk kebutuhan yang lain termasuk untuk mengembalikan pinjaman. Jadi jika tanggungan keluarga besar sedangkan pendapatan rumah tangga kecil maka cenderung akan menunda pengembalian pinjaman. Tetapi jika pendapatan rumah tangga besar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh anggota keluarga maka tanggungan keluarga tidak berpengaruh terhadap pengembalian pinjaman. Berikut ini disajikan tabel kolektibilitas pinjaman berdasarkan tanggungan keluarga.

Tabel 28. Kolektibilitas Pinjaman Berdasarkan Tanggungan Keluarga

No	Tanggungan Keluarga	Kolektibilitas Pinjaman
1.	0-1	43,61
2.	2-3	49,21
3.	4-5	65,46

Sumber : Analisis Data Primer, 2007

Dari Tabel 28 di atas dapat diketahui bahwa semakin besar tanggungan keluarga tingkat kolektibilitas pinjaman semakin besar. Responden dengan tanggungan keluarga 4-5 orang mempunyai kolektibilitas pinjaman tertinggi yaitu sebesar 65,46 persen dan responden dengan tanggungan keluarga 0-1 orang mempunyai kolektibilitas pinjaman terendah yaitu sebesar 43,61 persen.

Berkaitan dengan kolektibilitas pinjaman dalam hubungannya dengan tanggungan keluarga dan status UPK dapat diketahui persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen pada Tabel 29.

Tabel 29. Persentase Responden dengan Kolektibilitas Pinjaman di atas 50 persen Menurut Tanggungan Keluarga dan Status UPK

No	Uraian	Persentase (%)
1.	Status UPK	
a.	UPK Penguatan	43,2
b.	UPK non Penguatan	49,2
2.	Tanggungan keluarga responden	
a.	0-1 orang	41,9
b.	2-3 orang	46,2
c.	4-5 orang	75
3.	Interaksi status UPK dengan tanggungan keluarga responden	
a.	UPK Penguatan – 0-1 orang	17,6
b.	UPK Penguatan – 2-3 orang	52,2
c.	UPK Penguatan – 4-5 orang	100
d.	UPK non Penguatan – 0-1 orang	57,7
e.	UPK non Penguatan – 2-3 orang	41,4
f.	UPK non Penguatan – 4-5 orang	50

Sumber : Analisis data primer, 2007

Dari Tabel 29 di atas tampak bahwa berdasar status UPK kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen di UPK Penguatan dan UPK non penguatan tidak berbeda nyata. Kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen di UPK penguatan sebesar 43,2 persen dan di UPK non penguatan sebesar 49,2 persen. Sedangkan berdasarkan tanggungan anggota keluarga kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen antara tanggungan keluarga sedikit dengan tanggungan keluarga banyak berbeda rata. Responden dengan tanggungan keluarga antara 0-1 orang sebesar 41,9 persen, sedangkan responden dengan tanggungan antara 2-3 orang sebesar 46,2 persen dan responden dengan tanggungan keluarga antara 4-5 orang sebesar 75 persen. Berdasarkan interaksi status UPK dengan tanggungan keluarga, di UPK penguatan responden dengan kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen berbeda nyata. Semakin banyak tanggungan keluarga semakin tinggi kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen. Sedangkan di UPK non penguatan kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen tidak berbeda nyata. Responden dengan tanggungan

keluarga antara 0-1 orang mempunyai persentase tertinggi yaitu sebesar 57,7 persen kemudian responden dengan tanggunga keluarga 4-5 orang sebesar 50 persen dan yang terendah adalah responden dengan tanggungan keluarga 2-4 orang yaitu sebesar 41,4 persen.

Persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen berdasarkan interaksi status UPK dengan tanggungan keluarga dapat gambarkan pada diagram berikut:

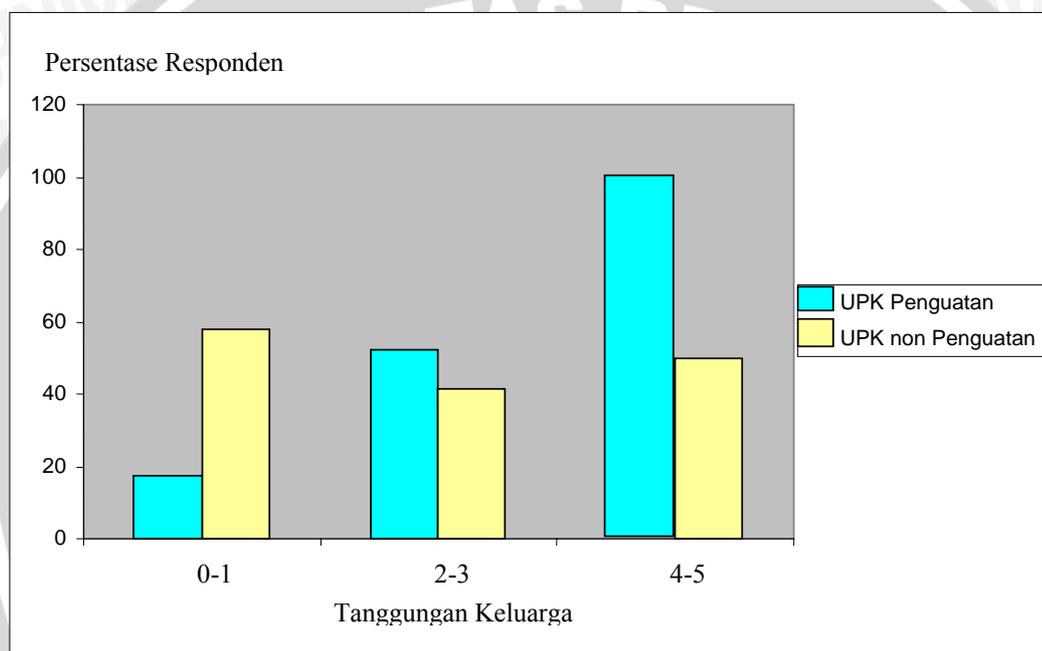


Diagram 5. Persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen berdasarkan interaksi status UPK dengan tanggungan keluarga

Berkaitan dengan kolektibilitas pinjaman dalam hubungannya dengan faktor tanggungan keluarga, telah diketahui bahwa berdasarkan perhitungan analisis korelasi Rank Spearman (Lampiran 8.) dengan Koefisien Korelasi (r_s) sebesar -0,11 dan $t_{hitung} = -1,11$ pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, dengan $db = 101$ dan $t_{tabel} = 1,645$. Telah diperoleh bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$, yang berarti bahwa terima H_0 dan Tolak H_1 . Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tanggungan keluarga dengan kolektibilitas pinjaman.

Kondisi di lapang menunjukkan bahwa tanggungan keluarga yang besar tidak mempengaruhi pengembalian pinjaman. Karena keluarga yang tanggungan keluarganya besar pendapatan rumah tangga kebanyakan juga lebih besar

sehingga dapat mengembalikan pinjaman. Hal lain juga disebabkan bahwa responden tidak banyak mempunyai tanggungan keluarga. Rata-rata tanggungan keluarga responden kurang dari 3 orang. Sehingga tidak ada hubungan tanggungan keluarga dengan kolektibilitas pinjaman UPK Gerdu-Taskin Kabupaten Blitar.

6.3.6. Hubungan jenis usaha dengan kolektibilitas pinjaman

Jenis usaha yang dilakukan seseorang akan berkaitan erat dengan pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut. Jika seseorang mempunyai bidang usaha yang melakukan transaksi tunai setiap hari maka perputaran uang pada usaha tersebut akan cepat sehingga pendapatan akan tinggi. Tapi jika usaha yang dimiliki memerlukan waktu untuk memperoleh uang tunai maka mereka tidak dapat memperoleh hasil atau pendapatan dari usahanya dengan cepat.

Jenis usaha disini dibagi dalam dua kelompok, yaitu usaha perdagangan dan usaha non perdagangan. Usaha perdagangan meliputi pedagang praccangan dan pedagang mlijo. Sedangkan usaha non perdagangan meliputi petani, peternak ayam, pengusaha mebel, penggilingan padi, pembuat batrek dan pembuat rokok.

Jenis usaha yang perputaran uang cepat adalah sektor perdagangan. Hampir setiap hari para pedagang melakukan transaksi jual beli, keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut merupakan pendapatan dari pedagang. Lain halnya dengan jenis usaha non perdagangan, misalkan petani. Petani akan memperoleh hasil dari berusaha taninya setelah panen. Jangka waktu panen dari usaha tani minimal sekitar 3-4 bulan.

Jenis usaha akan mempengaruhi pengembalian pinjaman. Pemilik usaha yang perputaran uang cepat, maka pengembalian pinjaman juga akan lancar karena mereka lebih cepat memperoleh hasil dari usahanya. Namun sebaliknya, pemilik usaha yang perputaran uang lambat maka tidak dapat dengan cepat memperoleh hasil usahanya sehingga untuk mengembalikan pinjaman harus menunggu memperoleh hasil usaha. Jadi, jenis usaha akan mempengaruhi kolektibilitas pinjaman. Berikut ini disajikan tabel kolektibilitas pinjaman berdasarkan jenis usaha.

Tabel 30. Kolektibilitas Pinjaman Berdasarkan Jenis Usaha.

No.	Jenis Usaha	Kolektibilitas Pinjaman
1.	Perdagangan	58,86
2.	Non Perdagangan	37,68

Sumber : Analisis Data Primer, 2007

Dari Tabel 30 di atas diketahui bahwa kolektibilitas pinjaman dari responden yang mempunyai jenis usaha perdagangan lebih besar daripada responden yang mempunyai jenis usaha non perdagangan. Responden dengan jenis usaha perdagangan mempunyai kolektibilitas pinjaman sebesar 58,86 persen sedangkan responden dengan jenis usaha non perdagangan mempunyai kolektibilitas pinjaman sebesar 37,68 persen.

Berkaitan dengan kolektibilitas pinjaman dalam hubungannya dengan jenis usaha dan status UPK dapat diketahui persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen pada Tabel 31.

Tabel 31. Persentase Responden dengan Kolektibilitas Pinjaman di atas 50 persen Menurut Jenis Usaha dan Status UPK

No	Uraian	Persentase (%)
1.	Status UPK	
	a. UPK Penguatan	43,2
	b. UPK non Penguatan	49,2
2.	Jenis usaha responden	
	a. Perdagangan	60
	b. Non Perdagangan	30,8
3.	Interaksi status UPK dengan jenis usaha responden	
	a. UPK Penguatan – Perdagangan	66,7
	b. UPK Penguatan – Non Perdagangan	30,4
	c. UPK non Penguatan – Perdagangan	57,7
	d. UPK non Penguatan – Non Perdagangan	31,3

Sumber : Analisis data primer, 2007

Dari Tabel 31, bahwa berdasar status UPK kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen di UPK Penguatan dan UPK non penguatan tidak berbeda nyata. Kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen di UPK penguatan sebesar 43,2 persen dan di UPK non penguatan sebesar 49,2 persen. Sedangkan berdasarkan jenis usaha, antara responden yang mempunyai usaha perdagangan dan responden yang

mempunyai usaha non perdagangan dengan kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen berbeda nyata. Responden yang mempunyai usaha perdagangan persentase kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen lebih tinggi dibandingkan responden yang mempunyai usaha non perdagangan. Berdasarkan interaksi antara status UPK dengan jenis usaha, persentase responden yang mempunyai usaha perdagangan dengan kolektibilitas pinjaman diatas 50 persen lebih besar dibandingkan responden yang mempunyai jenis usaha non perdagangan di UPK penguatan maupun di UPK non penguatan.

Persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen berdasarkan interaksi status UPK dengan jenis usaha dapat gambarkan pada diagram berikut:

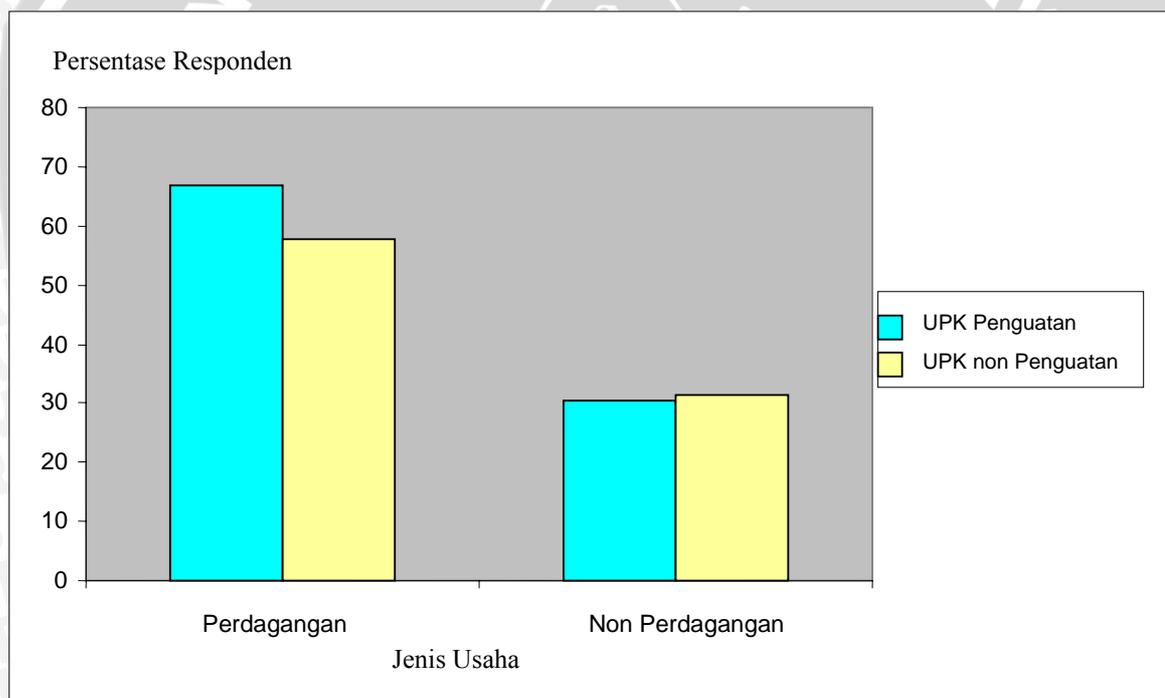


Diagram 6. Persentase responden dengan kolektibilitas pinjaman di atas 50 persen berdasarkan interaksi status UPK dengan jenis usaha

Bedasarkan Diagram 6 di atas bahwa ada hubungan antara jenis usaha dengan kolektibilitas pinjaman. Dengan uji statistika, telah diketahui bahwa berdasarkan perhitungan Khi Kuadrat (Lampiran 9) didapat $x^2_{hitung} = 6,37$ pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, dengan $db = 1$ dan $x_{tabel} = 3,841$. Telah diperoleh bahwa $x^2_{hitung} > x_{tabel}$, yang berarti bahwa terima H_1 dan tolak H_0 . Hal ini

menunjukkan bahwa ada hubungan antara jenis usaha dengan kolektibilitas pinjaman.

Berdasarkan kondisi dilapang, bahwa responden yang mempunyai usaha perdagangan mempunyai kolektibilitas pinjaman lebih tinggi karena perputaran uang dari perdagangan lebih cepat daripada dari non perdagangan sehingga responden dapat membayar pinjaman tepat waktu.

Adapun hubungan faktor sosial ekonomi dengan kolektibilitas pinjaman secara keseluruhan dengan uji statistika menggunakan analisa Rank Spearman dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Hubungan Faktor Sosial Ekonomi dengan Kolektibilitas Pinjaman

No.	Faktor Sosial Ekonomi	r_s	t_{hitung}
1	Umur	-0,073	-0,74
2	Tingkat Pendidikan	0,18	1,84*)
3	Pendapatan	0,32	3,39*)
4	Jumlah anggota keluarga	-0,11	-1,11
5	Tanggungan Keluarga	-0,08	-0,81

Sumber: Analisis Data Primer 2007

Catatan: 1. Perhitungan r_s dapat dilihat pada lampiran

2. $t_{tabel} \alpha 0,05; db 101 = 1,645$

3. *) nyata pada taraf $\alpha=0,05$

Berdasarkan data pada Tabel 32, dapat diketahui bahwa tidak semua faktor sosial ekonomi berhubungan dengan kolektibilitas pinjaman. Dari kelima faktor sosial ekonomi di atas yang berhubungan dengan kolektibilitas pinjaman hanya ada dua faktor yaitu tingkat pendidikan dan pendapatan. Sedangkan umur, jumlah anggota keluarga dan tanggungan keluarga tidak ada hubungan dengan kolektibilitas pinjaman. Selain kelima faktor sosial ekonomi di atas ada satu faktor yang menggunakan uji statistika Khi Kuadrat juga berhubungan dengan kolektibilitas pinjaman yaitu jenis usaha. Jadi, dari keenam faktor sosial ekonomi yang dianalisis menggunakan uji statistika ada tiga faktor sosial ekonomi yang berhubungan dengan kolektibilitas pinjaman, yaitu pendidikan, pendapatan dan jenis usaha. Sedangkan ketiga faktor sosial ekonomi lainnya yaitu umur, jumlah anggota keluarga dan tanggungan keluarga tidak berhubungan dengan kolektibilitas pinjaman.

6.4. Alasan Responden Menunggak

1. Terpengaruh perangkat desa dan tokoh desa

Para perangkat desa dan tokoh desa yang ikut menggunakan dana program mempengaruhi masyarakat untuk tidak mengembalikan pinjaman. Mereka memprovokasi masyarakat bahwa dana tersebut merupakan hibah dari pemerintah sehingga tidak wajib mengembalikannya. Dengan adanya isu tersebut sudah berkembang dimasyarakat bahwa mereka memang tidak perlu mengembalikan karena dana yang dibagikan merupakan dana hibah.

2. Terpengaruh dari anggota pokmas

Jika ada anggota pokmas tidak mengembalikan pinjaman maka yang lain akan ikut tidak mau mengembalikan pinjaman. Jadi akhirnya tidak ada kesadaran seluruh anggota pokmas bahkan dari pokmas lain untuk mengembalikan pinjaman.

3. Tidak ada sosok yang disegani ataupun aturan yang membuat mereka takut sehingga mereka tidak menganggap penunggakan yang dilakukan menjadi suatu beban.

4. Terpengaruh dari program lain

Adanya program lain yang serupa dengan program Gerdu-Taskin tetapi tidak ada berkesinambungan membuat sebagian masyarakat menganggap program Gerdu-Taskin juga sama dengan program-program sebelumnya yang tidak ada follow up sehingga hanya bersifat insidental saja. Setelah program berakhir mereka tidak ada tuntutan untuk mengembalikan pinjaman.

5. Karakter masyarakat

Ada masyarakat yang sebenarnya mampu mengembalikan dan tahu bahwa harus mengembalikan pinjaman tersebut tetapi tidak mau mengembalikan karena tidak adanya kesadaran untuk mengembalikan. Di lingkungan masyarakat orang tersebut dikenal orang yang kolot.

6.5. Implikasi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pendapatan rumah tangga di UPK penguatan berbeda nyata dengan pendapatan rumah tangga di UPK non penguatan, dengan kata lain pendapatan rumah tangga di UPK penguatan lebih besar daripada di UPK non penguatan. Pendapatan berhubungan dengan kolektibilitas pinjaman. Semakin tinggi pendapatan maka kolektibilitas pinjaman juga akan semakin tinggi. Sehingga kolektibilitas pinjaman di UPK penguatan berbeda nyata dengan kolektibilitas pinjaman di UPK non penguatan, yang artinya kolektibilitas pinjaman di UPK penguatan akan lebih tinggi daripada di UPK non penguatan. Tetapi dari hasil penelitian kolektibilitas pinjaman di UPK penguatan tidak berbeda nyata dengan kolektibilitas pinjaman di UPK non penguatan. Jadi dalam penelitian ini terjadi inkonsistensi yang disebabkan karena ada beberapa kesalahan penelitian. Kesalahan tersebut antara lain:

1. Bias dalam pengambilan sampel

Sampel yang diambil dalam penelitian adalah hanya peminjam pokmas. Sedangkan di UPK penguatan ada peminjam perorangan yang kolektibilitas pinjaman tinggi. Kebanyakan dari peminjam pokmas yang dijadikan sampel mempunyai kolektibilitas pinjaman rendah. Kemungkinan dari hal tersebut menyebabkan kolektibilitas pinjaman di UPK penguatan tidak berbeda nyata dengan kolektibilitas pinjaman di UPK non penguatan.

2. Bias dalam wawancara

Dalam wawancara dengan responden, banyak responden menggunakan perkiraan berkaitan dengan pendapatan yang diterimanya. Mereka tidak memberikan jawaban pasti terhadap pertanyaan dari variabel-variabel pendapatan. Kemungkinan disebabkan hal tersebut maka terjadi inkonsistensi antara hubungan pendapatan dengan kolektibilitas pinjaman.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

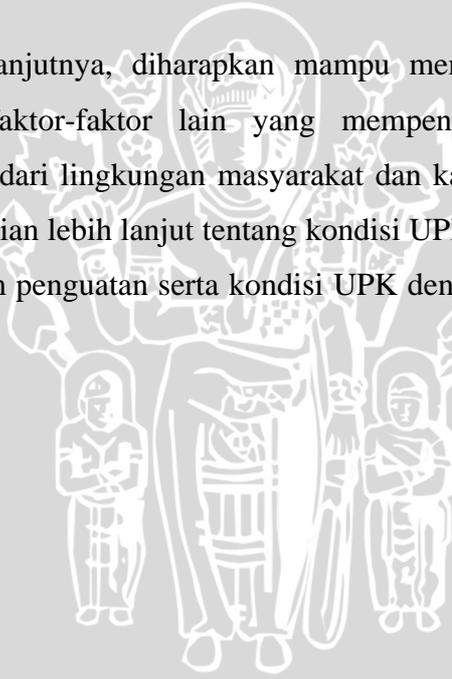
7.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat perbedaan antara pendapatan rumah tangga di UPK penguatan dan UPK non penguatan. Pendapatan rata-rata rumah tangga di UPK penguatan sebesar Rp 785.522,00 sedangkan pendapatan rata-rata rumah tangga di UPK non penguatan sebesar Rp 432.203,00. Jadi rata-rata pendapatan rumah tangga di UPK penguatan lebih besar daripada di UPK non penguatan. Perbedaan pendapatan di UPK penguatan dan UPK non penguatan dikarenakan jenis usaha dan skala usaha rumah tangga berbeda. di UPK penguatan dan UPK non penguatan ada lima jenis usaha yaitu pedagang pracangan, pedagang mlijo, petani, peternak ayam dan jenis usaha lainnya. Dari kelima jenis usaha tersebut, tiga jenis usaha yaitu pedagang pracangan, petani, dan peternak ayam di UPK penguatan mempunyai rata-rata pendapatan lebih tinggi daripada di UPK non penguatan. Sedangkan rata-rata pendapatan dari pedagang mlijo dan jenis usaha lainnya tidak berbeda nyata antara UPK penguatan dan UPK non penguatan.
2. Pendapatan, pendidikan dan jenis usaha berhubungan dengan kolektibilitas pinjaman UPK Gerdu-Taskin. Semakin tinggi pendapatan dan tingkat pendidikan responden kolektibilitas pinjaman juga semakin tinggi sedangkan dilihat dari jenis usaha, responden yang mempunyai usaha perdagangan mempunyai kolektibilitas pinjaman lebih tinggi dibandingkan responden yang mempunyai usaha non perdagangan Sedangkan umur, jumlah anggota keluarga dan tanggungan keluarga tidak berhubungan dengan kolektibilitas pinjaman UPK Gerdu-Taskin di Kabupaten Blitar. Semakin tua umur responden, semakin sedikit jumlah anggota keluarga dan tanggungan keluarga tidak menyebabkan kolektibilitas pinjaman tinggi

7.2 Saran

1. Bagi pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) harus lebih selektif dalam memberikan pinjaman dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan melakukan analisis usaha peminjam untuk menentukan besarnya pinjaman serta harus tegas dalam menangani pinjaman bermasalah sehingga kolektibilitas pinjaman akan lancar.
2. Bagi instansi terkait dengan Program Gerdu-Taskin ini diharapkan selalu melakukan monitoring yang intensif dan memberikan program penguatan bagi UPK yang belum mendapatkan penguatan karena dengan adanya penguatan UPK berpengaruh pada tingkat pendapatan rumah tangga penduduk miskin.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menggali informasi lebih dalam tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi kolektibilitas pinjaman dilihat dari lingkungan masyarakat dan karakter masyarakat dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang kondisi UPK sebelum dan sesudah mendapat program penguatan serta kondisi UPK dengan dan tanpa program penguatan.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemberdayaan Masyarakat.2006. *Pedoman Umum Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Propinsi Jawa Timur 2006*. Sekretariat Tetap Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Propinsi Jawa Timur. Surabaya.

_____.2006. *Petunjuk Teknis Operasional Penguatan Unit Pengelola Keuangan*. Sekretariat Tetap Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Propinsi Jawa Timur. Surabaya.

Bank Rakyat Indonesia.1988. *Petunjuk Pemberantasan Tunggakan*. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah. Surabaya.

_____. 1995. *Produk Kredit*. Urdiklat Bank Rakyat Indonesia. Jakarta.

_____. 2002. *Analisis Kredit*. Devisi Bisnis Ritel. Jakarta.

Christinawati, Memie.2004.*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tunggakan Kredit P4K (Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil)*. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Malang.

Gujarati, Damodar. 2002. *Ekonometrika Dasar*. Erlangga. Jakarta.

Hasyim, Djamhuri,SE.1992. *Pengaruh Kredit Usaha Tani (KUT) terhadap Tingkat Produktivitas dan Pendapatan Petani Apel*. Penelitian Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.Malang.

Hidayat, Hamid.1989. *Metode Penelitian Sosial*. Diktat Kuliah Fakultas Pertanian Unibraw. Malang.

Hussein, Ananda, Sabil.2004. *Pengaruh Jumlah Dana yang Dihimpun. Modal Sendiri dan Kolektibilitas Kredit Terhadap Jumlah Kredit yang Disalurkan pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi Unibersitas Brawijaya. Malang.

Makmur , Muchamad,Drs, MS.1988. *Tunggakan Kredit pada Nelayan*. Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya. Malang.

Krisna, Wijaya. *Kredit Mikro bukan Hibah*. Harian Kompas, Selasa 1 Maret 2005.

Robinson, M.S. 2000. *The Microfinance Revolution : Lesson from Indonesia*. The Word Bank and Open Society Institute. Washington, DC.

- Siegel, Sidney.1986. *Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Gramedia. Jakarta
- Simamora, Bilson.2004. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Simatupang, Widyastuty, Endang.2004. *Analisis Usahatani Sayuran dan Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang Menyebabkan Terjadinya Tunggakan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) di Kecamatan Bumiaji Kota Batu*. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Malang.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian.1989. *Metode Penelitian Survai*. LP3ES. Jakarta
- Sinungan, M.1983. *Dasar-dasar Teknik Manajemen Kredit*. Bina Aksara. Jakarta.
- _____.1989. *Dasar-dasar Teknik Manajemen Kredit*. Bina Aksara. Jakarta.
- _____.1995. *Dasar-dasar Teknik Manajemen Kredit*. Bina Aksara. Jakarta.
- Soekartawi.1986. *Ilmu Asahatani dan Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Susanti, Dwi. 2006. *Analisis Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Terjadinya Tunggakan Kredit Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K) Fase III-RIGP di PT. Bank Rakyat Indoesia (Persero) Cabang Magetan*. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Malang.
- Suyatno, Thomas.1990. *Dasar-dasar Perkreditan*. PT. Gramedia. Jakarta.
- _____.1991. *Dasar-dasar Perkreditan*. PT. Gramedia. Jakarta.
- _____.2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Syamsulbahri,Ir,MS.1992.*Pengaruh Perhutanan Sosial terhadap Kelestarian Hutan dan Pendapatan Masyarakat di PPH Kedungrejo,BKPH Pujon,KPH Malang*.Penelitian Fakultas Pertanian.Universitas Brawijaya. Malang.
- Wijono, W. 2004. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Konkrit Memutus Rantai Kemiskinan*. Kajian Ekonomi dan Keuangan (Edisi Khusus). Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional. Departemen Keuangan.

Wilopo.1996.*Dampak Dana Bantuan IDT pada Pendapatan Masyarakat Penerima Dana di Desa Tertinggal*.Penelitian Fakultas Ilmu Administrasi.Universitas Brawijaya.Malang.

Yusuf, Chalim CH, Drs.1984. *Antara Usaha Meningkatkan Pendapatan Petani Peternak dan Tunggakan Kredit Panca Usaha Ternak Potong*. Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya. Malang.



Lampiran 1. Tahap Penentuan Sampel

	Populasi	Sampel
Tahap I : menentukan UPK sampel		
UPK non penguatan	26	3
UPK penguatan	12	3
Tahap II : menentukan Pokmas sampel		
UPK non penguatan		
1. UPK Papungan	3	1
2. UPK Barokah	23	3
3. UPK Artha Mulia	25	3
UPK penguatan		
1. UPK Mandiri	20	3
2. UPK Mitra Usaha	25	3
3. UPK Cipta Mandiri	6	5
Tahap III : menentukan sampel		
UPK non penguatan		
1. UPK Papungan		
a. Pokmas Barokah	21	21
2. UPK Barokah		
a. Pokmas Melati II	5	5
b. Pokmas Berkah Jaya	5	5
c. Pokmas Margi Lancar	5	5
3. UPK Artha Mulia		
a. Jeruk	6	6
b. Dahlia	7	7
c. Kantil	10	10
UPK penguatan		
1. UPK Mandiri		
a. Dahlia	4	4
b. Seruni	7	7
c. Kenanga	5	5
2. UPK Mitra Usaha		
a. Pokmas I	6	6
b. Pokmas II	8	8
c. Pokmas VI	4	4
3. UPK Cipta Mandiri		
a. Jambu	2	2
b. Durian	2	2
c. Pisang	2	2
d. Mangga	2	2
e. Jeruk	2	2
Total Anggota Pokmas untuk Sampel		103

Lampiran 2. Daftar UPK Penguatan dan UPK non Penguatan di Kabupaten Blitar

UPK NON PENGUATAN

Nama UPK	Alamat	Pokmas
Maju Makmur	Ds. Kedungbanteng, Kec. Bakung	8
Bululawang Makmur	Ds. Bululawang, Kec. Bakung	6
UPK Panggungduwet	Ds. Panggungduwet, Kec. Kademangan	2
Artha Mulia	Ds. Bakung, Kec. Bakung	9
Sumber Rejeki	Ds. Kaligrenjeng, Kec. Wonotirto	7
Sumber Rejeki	Ds. Sumberjo, Kec. Sutojayan	6
Sumber Makmur	Ds. Pakisaji, Kec. Kademangan	0
UPK Plandirejo	Ds. Plandirejo, Kec. Bakung	3
Barokah	Ds. Tegalrejo	12
Mitra Karya	Desa Sukorejo	5
Rukun Makmur	Ds. Tugurejo	23
utama jaya	ds jeding kec. sanankulon kab. blitar	9
jaya mulya	Ds binangun kec sambigede kab blitar	9
artha mulia	ds tuliskriyo kec sanankulon kab blitar	5
kaligambir	Ds Kaligambir Kec Panggungrejo Kab Blitar	9
Ngudi mulyo	Ds Slemanan Kec Udanawu Kab Blitar	7
Ngudi Rahayu	Ds Sumberjo Kec Kademangan Kab Blitar	12
mitra mandiri	Ds Tawangrejo kec binangun Kab blitar	14
sido makmur	Ds Sumbersari kec Udanawu Kab Blitar	13
sido makmur	Ds. Gogodeso, Kec. Kanogoro Kab Blitar	7
Papungan	Ds. Papungan Kec. Kanigoro. Kab. Blitar	3
UPK "Balerejo"	Ds. Balerejo Kec. Wlingi Kab. Blitar	14
Langgeng	Ds. Tulungrejo Kec. Gandusari	6
UPK Karang Sono	Ds. Karangsono	2
Maju makmur	Ds. Minggirsari	16
Arto Agung	Ds. Sumber Agung Kec Gandusari Blitar	6

UPK PENGUATAN

Nama	Alamat	Pokmas
Lestari	Ds. Kebonsari Kec. Kademangan	10
Sejahtera	Ds. Dawuhan Kec. Juruh	6
Cipta Mandiri	Ds. Suruhwadang Kec. Kademangan	2
Mandiri	Ds. Sawentar Kec. Kanigoro	20
Sidomakmur	Ds. Sidomulyo Kec. Bakung	10
Makmuro	Ds. Tumpak Kepuh Kec. Bakung	2
Lestari	Ds. Sumberasri Kec. Nglegok	11
Mitra Usaha	Ds. Bendorejo Kec. Udanawu	25
Jati Makmur	Ds. Jati Kec. Udanawu	2
Bumi Asri	Ds. Tegalasri Kec. Wlingi	24
Rukun Makmur San.	Ds. Purworejo Kec. Wates	5
Ngudi Makmur	Ds. Mojorejo Kec. Wates	17

Lampiran 3. Daftar Nama Sampel

NAMA ANGGOTA	ALAMAT	PEKERJAAN
Nursamsi	Dsn.Tegalrejo RT03/RW11	Pedagang mlijo
Mariyoto	Dsn.Tegalrejo RT03/RW13	Pedagang mlijo
Laminten	Dsn.Tegalrejo RT03/RW13	Petani
Alpiyah	Dsn.Tegalrejo RT03/RW13	buruh tani
Suparni	Dsn.Tegalrejo RT04/RW13	Peg.Puskesmas
Mujiwarti	Dsn.Tegalrejo RT04/RW13	Guru
Muntamah	Dsn.Tegalrejo RT04/RW13	Pedagang mrcang
Muhaimin	Dsn.Tegalrejo RT04/RW13	Bengkel
Sunarto	Dsn.Sambong RT01/RW16	Buruh Pabrik
Mariyam	Dsn.Sambong RT03/RW15	Pedagang mlijo
Nanik	Dsn.Sambong RT01/RW15	Guru TK
Mursidi	Dsn.Sambong RT01/RW16	Pedagang Mrcang
Imam Fadlai	Dsn.Sambong RT01/RW16	Pedagang es pleret
Bambang S	Dsn.Sambong RT01/RW16	usaha batrek
Riadi	Dsn.Sambong RT01/RW16	tukang kayu
Sugeng	Dsn.Mulyorejo RT03/RW02	Petani
Priyono	Dsn.Mulyorejo RT03/RW02	Buruh tani
Miswan	Dsn.Mulyorejo RT03/RW02	Pedagang kain
Pani	Dsn.Mulyorejo RT03/RW02	giling padi keliling
Kartini	Dsn.Mulyorejo RT03/RW02	Petani
B.Wiji	Dsn.Mulyorejo RT02/RW02	Pedagang makanan
Purwanto	Dsn.Mulyorejo RT03/RW02	Petani
Suparni	Dsn.Mulyorejo RT02/RW02	tukang kayu
Mujiamah	Dsn.Mulyorejo RT02/RW02	Buruh tani
Minoto	Dsn.Mulyorejo RT02/RW02	Buruh tani
Misgiran	Dsn.Mulyorejo RT02/RW02	Buruh tani
Sripat	Dsn.Mulyorejo RT02/RW02	Petani
Suparti	Dsn.Mulyorejo RT02/RW02	Petani
Katimah	Dsn.Mulyorejo RT02/RW02	Petani
Purwanto	Dsn.Mulyorejo RT02/RW02	Buruh tani
Suparmi	Dsn.Mulyorejo RT04/RW01	Pedagang makanan
Ponidi	Dsn.Mulyorejo RT04/RW01	Buruh tani
Wahono	Dsn.Mulyorejo RT04/RW01	Petani
Mahmudah	Dsn.Mulyorejo RT04/RW01	Buruh tani
Suyadi	Dsn.Suruhwadang RT04/RW06	Peternak ayam
Djiasri	Dsn.Suruhwadang RT01/RW05	Petani
Sugrahito	Dsn.Suruhwadang RT04/RW01	Pedagang kelontong
Heksi Rudi R	Dsn.Suruhwadang RT01/RW03	Peternak ayam
Yatiman	Dsn.Suruhwadang RT01/RW05	Peternak ayam
Suyani	Dsn.Suruhwadang RT01/RW05	Peternak ayam
Sudirman	Dsn.Suruhwadang RT02/RW07	Peternak ayam
Kusnanto	Dsn.Suruhwadang RT02/RW07	Peternak ayam
Sumantri	Dsn.Suruhwadang RT01/RW02	Peternak ayam
Ayemi	Dsn.Suruhwadang RT03/RW02	Peternak ayam
Misih	Dsn.Papungan RT01/RW05	Pedagang mrcang

Lampiran 3. Lanjutan

NAMA ANGGOTA	ALAMAT	PEKERJAAN
Khususiyah	Dsn.Papungan RT04/RW07	Ibu Rmh tangga
Rukayah	Dsn.Papungan RT01/RW08	Pedagang mlijo
Dariyah	Dsn.Papungan RT01/RW09	Guru TK
Siti Masithoh	Dsn.Papungan RT01/RW09	Pedagang mrncang
Makrus	Dsn.Papungan RT01/RW03	Pedagang mrncang
Sulastri	Dsn.Papungan RT03/RW06	Ibu Rmh Tangga
Farit	Dsn.Papungan RT01/RW04	Pedagang tahu
Muslihah	Dsn.Papungan RT01/RW08	Pedagang mlijo
Purwanto	Dsn.Papungan RT03/RW05	Swasta
Peni Suwarno	Dsn.Papungan RT03/RW06	Pedagang mrncang
Leni Martini	Dsn.Papungan RT03/RW06	Ibu Rmh Tangga
Sugiyanti	Dsn.Papungan RT02/RW07	Penjahit
Suwarti	Dsn.Papungan RT02/RW05	Pedagang mrncang
Sukarni	Dsn.Papungan RT02/RW07	Pedagang mlijo
Sumiati	Dsn.Papungan RT01/RW05	Penjahit
Erni Hastuti	Dsn.Papungan RT02/RW05	Pedagang mrncang
Arbaatun	Dsn.Papungan RT01/RW06	Pedagang mlijo
Prayitno	Dsn.Papungan RT01/RW05	Swasta
Pakis	Dsn.Papungan RT03/RW05	Pedagang mlijo
Suparmi	Dsn.Papungan RT03/RW06	Pedagang mlijo
Sutaji	Dsn.Ngandengan RT01/RW01	Pedagang mlijo
Masrokah	Dsn.Ngandengan RT01/RW01	Petani
M.Dachlan	Dsn.Ngandengan RT01/RW01	Pembuat rokok
Wijiati	Dsn.Ngandengan RT01/RW01	Pedagang gabah
Soepini Istikaromah	Dsn.Ngandengan RT01/RW01	Pedagang ikan
Sigit Sudarsono	Dsn.Tegalrejo RT03/RW03	Peternak
Purwanto	Dsn.Tegalrejo RT04/RW03	Sopir
Tutik Purwanti	Dsn.Tegalrejo RT04/RW03	Pedagang mainan anak
Purnomo	Dsn.Tegalrejo RT04/RW03	Tukang bangunan
Suwito	Dsn.Tegalrejo RT04/RW03	Pedagang tempe
Sukari	Dsn. Ngandengan RT06/RW02	Petani
Teguh Santoso	Dsn. Ngandengan RT06/RW02	Tukang bangunan
Poniman	Dsn. Ngandengan RT06/RW02	Petani
Yusuf Riyanto	Dsn. Ngandengan RT06/RW02	Petani
Mujianto	Dsn. Ngandengan RT06/RW02	Petani
Widad Diana	Dsn.Sukowilangan RT01/RW04	Peternak
Siti Mutmainah	Dsn.Sukowilangan RT01/RW04	Pedagang mrncang
Wijiati	Dsn.Sukowilangan RT01/RW04	Petani
Moh. Yasin	Dsn.Sukowilangan RT01/RW04	Pedagang kain
Siti Muslimah	Dsn.Sukowilangan RT01/RW04	Buruh peternakan
Nurhasim	Dsn.Sukowilangan RT01/RW04	Pedagang ayam
Sri Hartatik	Dsn.Tuliskriyo RT02/RW02	Pedagang Kelontong
Suciati	Dsn.Tuliskriyo RT02/RW02	Pedagang elektronik
Mia Setyawati	Dsn.Tuliskriyo RT02/RW02	ibu rumah tangga
Mu'alim	Dsn.Tuliskriyo RT02/RW02	Petani

Lampiran3. Lanjutan

NAMA ANGGOTA	ALAMAT	PEKERJAAN
Wahyu Ratnawati	Dsn.Tuliskriyo RT02/RW02	ibu rumah tangga
Arifis Shodiq	Dsn.Tuliskriyo RT02/RW02	Pedagang Kelontong
Suhartini	Dsn.Tuliskriyo RT02/RW02	Pedagang mrencang
Ashari Anwar	Dsn.Tuliskriyo RT04/RW02	Petani
Zaenal Abidin	Dsn.Tuliskriyo RT04/RW02	Tukang bangunan
Asrori	Dsn.Tuliskriyo RT04/RW02	Pedagang kelontong
Maji	Dsn.Tuliskriyo RT04/RW02	sopir
Tukimin	Dsn.Tuliskriyo RT04/RW02	petani
Siti Fatimah	Dsn.Tuliskriyo RT04/RW02	Petani
Ahmad Taji	Dsn.Tuliskriyo RT04/RW02	Petani
Mashudi	Dsn.Tuliskriyo RT04/RW02	Petani
H.Musuki	Dsn.Tuliskriyo RT04/RW02	Petani
Hartini	Dsn.Tuliskriyo RT04/RW02	Pedagang mrencang



Lampiran 4. Hubungan Umur dengan Kolektibilitas Pinjaman

No	Nama	X ₁	Y	Rank X ₁	Rank Y	di	di ²
1	Nursamsi	35	100	24,5	88	-63,5	4032,25
2	Mariyoto	40	100	43	88	-45	2025
3	Laminten	52	100	77	88	-11	121
4	Alpiyah	40	100	43	88	-45	2025
5	Suparni	38	100	35,5	88	-52,5	2756,25
6	Mujiwarti	43	100	49,5	88	-38,5	1482,25
7	Muntamah	50	100	70	88	-18	324
8	Muhaimin	38	100	35,5	88	-52,5	2756,25
9	Sunarto	35	100	24,5	88	-63,5	4032,25
10	Mariyam	48	0	64,5	18,5	46	2116
11	Nanik	38	0	35,5	18,5	17	289
12	Mursidi	43	67	49,5	60,5	-11	121
13	Imam Fadlai	40	83	43	70,5	-27,5	756,25
14	Bambang S	35	11	24,5	41	-16,5	272,25
15	Riadi	35	51	24,5	56	-31,5	992,25
16	Sugeng	53	0	82	18,5	63,5	4032,25
17	Priyono	56	0	90,5	18,5	72	5184
18	Miswan	28	0	4	18,5	-14,5	210,25
19	Pani	28	0	4	18,5	-14,5	210,25
20	Kartini	45	0	54,5	18,5	36	1296
21	B.Wiji	70	0	103	18,5	84,5	7140,25
22	Purwanto	28	0	4	18,5	-14,5	210,25
23	Suparni	50	4	70	37	33	1089
24	Mujiamah	45	0	54,5	18,5	36	1296
25	Minoto	30	98	10,5	72	-61,5	3782,25
26	Misgiran	60	0	96,5	18,5	78	6084
27	Sripat	35	0	24,5	18,5	6	36
28	Suparti	55	6	87	38,5	48,5	2352,25
29	Katimah	60	6	96,5	38,5	58	3364
30	Purwanto	30	0	10,5	18,5	-8	64
31	Suparmi	55	100	87	88	-1	1
32	Ponidi	47	0	60,5	18,5	42	1764
33	Wahono	47	0	60,5	18,5	42	1764
34	Mahmudah	35	100	24,5	88	-63,5	4032,25
35	Suyadi	46	42	57	48,5	8,5	72,25
36	Djiasri	48	42	64,5	48,5	16	256
37	Sugrahito	37	42	32,5	48,5	-16	256
38	Heksi Rudi R	33	42	14,5	48,5	-34	1156
39	Yatiman	57	100	93	88	5	25
40	Suyani	37	100	32,5	88	-55,5	3080,25
41	Sudirman	39	100	39	88	-49	2401
42	Kusnanto	34	100	17,5	88	-70,5	4970,25
43	Sumantri	39	42	39	48,5	-9,5	90,25
44	Ayemi	36	42	30,5	48,5	-18	324
45	Misih	51	47	74	53	21	441
46	Khususiyah	40	81	43	69	-26	676

Lampiran 4. Lanjutan

No	Nama	X ₁	Y	Rank X ₁	Rank Y	di	di ²
47	Rukayah	45	0	54,5	18,5	36	1296
48	Dariyah	47	0	60,5	18,5	42	1764
49	Siti Masithoh	50	61	70	58	12	144
50	Makrus	36	0	30,5	18,5	12	144
51	Sulastri	28	36	4	45	-41	1681
52	Farit	29	0	7,5	18,5	-11	121
53	Muslihah	33	0	14,5	18,5	-4	16
54	Purwanto	34	0	17,5	18,5	-1	1
55	Peni Suwarno	50	64	70	59	11	121
56	Leni Martini	27	33	1	44	-43	1849
57	Sugiyanti	35	75	24,5	62	-37,5	1406,25
58	Suwarti	43	50	49,5	54,5	-5	25
59	Sukarni	56	10	90,5	40	50,5	2550,25
60	Sumiati	53	20	82	42,5	39,5	1560,25
61	Erni Hastuti	29	20	7,5	42,5	-35	1225
62	Arbaatun	35	60	24,5	57	-32,5	1056,25
63	Prayitno	44	83	52	70,5	-18,5	342,25
64	Pakis	55	50	87	54,5	32,5	1056,25
65	Suparmi	50	67	70	60,5	9,5	90,25
66	Sutaji	50	100	70	88	-18	324
67	Masrokah	30	100	10,5	88	-77,5	6006,25
68	M.Dachlan	60	100	96,5	88	8,5	72,25
69	Wijiati	60	100	96,5	88	8,5	72,25
70	Soepini Istikaromah	65	100	102	88	14	196
71	Sigit Sudarsono	30	45	10,5	52	-41,5	1722,25
72	Purwanto	53	100	82	88	-6	36
73	Tutik Purwanti	45	100	54,5	88	-33,5	1122,25
74	Purnomo	40	100	43	88	-45	2025
75	Suwito	60	100	96,5	88	8,5	72,25
76	Sukari	54	0	85	18,5	66,5	4422,25
77	Teguh Santoso	52	0	77	18,5	58,5	3422,25
78	Poniman	52	0	77	18,5	58,5	3422,25
79	Yusuf Riyanto	52	0	77	18,5	58,5	3422,25
80	Mujianto	56	0	90,5	18,5	72	5184
81	Widad Diana	42	80	46,5	65,5	-19	361
82	Siti Mutmainah	38	80	35,5	65,5	-30	900
83	Wijiati	50	80	70	65,5	4,5	20,25
84	Moh.Yasin	31	80	13	65,5	-52,5	2756,25
85	Siti Muslimah	47	80	60,5	65,5	-5	25
86	Nurhasim	34	80	17,5	65,5	-48	2304
87	Sri Hartatik	49	100	66	88	-22	484
88	Suciati	35	100	24,4	88	-63,6	4044,96
89	Mia Setyawati	35	100	24,4	88	-63,6	4044,96
90	Mu'alim	47	100	60,5	88	-27,5	756,25
91	Wahyu Ratnawati	28	100	4	88	-84	7056
92	Arifis Shodiq	47	100	60,5	88	-27,5	756,25

Lampiran 4. Lanjutan

No	Nama	X_1	Y	Rank X_1	Rank Y	d_i	d_i^2
93	Suhartini	52	100	77	88	-11	121
94	Ashari Anwar	56	0	90,5	18,5	72	5184
95	Zaenal Abidin	39	0	39	18,5	20,5	420,25
96	Asrori	42	0	46,5	18,5	28	784
97	Maji	53	0	82	18,5	63,5	4032,25
98	Tukimin	53	0	82	18,5	63,5	4032,25
99	Siti Fatimah	62	0	100,5	18,5	82	6724
100	Ahmad Taji	43	0	49,5	18,5	31	961
101	Mashudi	60	0	96,5	18,5	78	6084
102	H.Musuki	62	0	100,5	18,5	82	6724
103	Hartini	34	0	17,5	18,5	-1	1
Total						-	188307,9

Sumber: Analisis Data Primer, 2007

Keterangan :

X_1 : Umur

Y : Kolektibilitas Pinjaman

d_i : Disparitas



Perhitungan Analisis Rank Spearman

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\begin{aligned} \sum T_{x_1} &= \frac{5^3 - 5}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{10^3 - 10}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{4^4 - 4}{12} + \\ &\frac{3^3 - 3}{12} + \frac{5^5 - 5}{12} + \frac{2^2 - 2}{12} + \frac{4^4 - 4}{12} + \frac{4^4 - 4}{12} + \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{7^3 - 7}{12} + \frac{5^3 - 5}{12} + \frac{5^3 - 5}{12} + \\ &\frac{3^3 - 3}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} \\ \sum T_{x_1} &= 10 + 0,5 + 5 + 0,5 + 5 + 82,5 + 0,5 + 0,5 + 5 + 2 + 10 + 0,5 + 5 + 5 + 17,5 + 0,5 + \\ &28 + 2 + 5 + 17,5 + 0,5 = 223 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum T_y &= \frac{36^3 - 36}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{31^3 - 31}{12} \\ \sum T_y &= 3.885 + 0,5 + 0,5 + 17,5 + 0,5 + 0,5 + 17,5 + 0,5 + 2.480 = 6.402,5 \end{aligned}$$

$$\sum X_1^2 = \left[\frac{N^3 - N}{12} \right] - \sum T_{x_1} = \left[\frac{103^3 - 103}{12} \right] - 223 = 91.052 - 223 = 90.829$$

$$\sum Y^2 = \left[\frac{N^3 - N}{12} \right] - \sum T_y = \left[\frac{103^3 - 103}{12} \right] - 6.402,5 = 91.052 - 6.402,5 = 84.649,5$$

$$r_s = \frac{\sum X_1^2 + \sum Y^2 - \sum d_i^2}{2 \sqrt{\sum X_1^2 \sum Y^2}}$$

$$r_s = \frac{90.829 + 84.649,5 - 188.307,9}{2 \sqrt{(90.829) (84.649,5)}} = \frac{-12.829,4}{175.369,7} = -0,073$$

Kemudian dilakukan uji signifikansi nilai r_s terhadap nilai t .

$$t_{hitung} = r_s \sqrt{\frac{N - 2}{1 - r_s^2}} = -0,073 \sqrt{\frac{103 - 2}{1 - (-0,073)^2}} = -0,74$$

$$t_{tabel} = 1,645$$

$$t_{hitung} = -0,74 < t_{tabel} = 1,645$$

Terima H_0 dan tolak H_1 artinya tidak ada hubungan antara umur dengan kolektibilitas pinjaman.

Lampiran 5. Hubungan Pendidikan dengan Kolektibilitas Pinjaman

No	Nama	X ₂	Y	Rank X ₂	Rank Y	di	di ²
1	Nursamsi	6	100	28	88	-60	3600
2	Mariyoto	6	100	28	88	-60	3600
3	Laminten	6	100	28	88	-60	3600
4	Alpiyah	9	100	65	88	-23	529
5	Suparni	6	100	28	88	-60	3600
6	Mujiwarti	12	100	87	88	-1	1
7	Muntamah	6	100	28	88	-60	3600
8	Muhaimin	12	100	87	88	-1	1
9	Sunarto	9	100	65	88	-23	529
10	Mariyam	6	0	28	18,5	9,5	90,25
11	Nanik	16	0	101,5	18,5	83	6889
12	Mursidi	6	67	28	60,5	-32,5	1056,25
13	Imam Fadlai	6	83	28	70,5	-42,5	1806,25
14	Bambang S	12	11	87	41	46	2116
15	Riadi	9	51	65	56	9	81
16	Sugeng	6	0	28	18,5	9,5	90,25
17	Priyono	6	0	28	18,5	9,5	90,25
18	Miswan	9	0	65	18,5	46,5	2162,25
19	Pani	9	0	65	18,5	46,5	2162,25
20	Kartini	6	0	28	18,5	9,5	90,25
21	B.Wiji	6	0	28	18,5	9,5	90,25
22	Purwanto	6	0	28	18,5	9,5	90,25
23	Suparni	6	4	28	37	-9	81
24	Mujiamah	6	0	28	18,5	9,5	90,25
25	Minoto	9	98	65	72	-7	49
26	Misgiran	6	0	28	18,5	9,5	90,25
27	Sripat	6	0	28	18,5	9,5	90,25
28	Suparti	6	6	28	38,5	-10,5	110,25
29	Katimah	6	6	28	38,5	-10,5	110,25
30	Purwanto	6	0	28	18,5	9,5	90,25
31	Suparmi	6	100	28	88	-60	3600
32	Ponidi	6	0	28	18,5	9,5	90,25
33	Wahono	6	0	28	18,5	9,5	90,25
34	Mahmudah	6	100	28	88	-60	3600
35	Suyadi	6	42	28	48,5	-20,5	420,25
36	Djiasri	6	42	28	48,5	-20,5	420,25
37	Sugrahito	16	42	101,5	48,5	53	2809
38	Heksi Rudi R	16	42	101,5	48,5	53	2809
39	Yatiman	6	100	28	88	-60	3600
40	Suyani	9	100	65	88	-23	529
41	Sudirman	9	100	65	88	-23	529
42	Kusnanto	9	100	65	88	-23	529
43	Sumantri	6	42	28	48,5	-20,5	420,25
44	Ayemi	9	42	65	48,5	16,5	272,25
45	Misih	6	47	28	53	-25	625
46	Khususiyah	16	81	101,5	69	32,5	1056,25

Lampiran 5. Lanjutan

No	Nama	X ₂	Y	Rank X ₂	Rank Y	di	di ²
47	Rukayah	6	0	28	18,5	9,5	90,25
48	Dariyah	9	0	65	18,5	46,5	2162,25
49	Siti Masithoh	6	61	28	58	-30	900
50	Makrus	12	0	87	18,5	68,5	4692,25
51	Sulastri	12	36	87	45	42	1764
52	Farit	12	0	87	18,5	68,5	4692,25
53	Muslihah	6	0	28	18,5	9,5	90,25
54	Purwanto	6	0	28	18,5	9,5	90,25
55	Peni Suwarno	12	64	87	59	28	784
56	Leni Martini	12	33	87	44	43	1849
57	Sugiyanti	6	75	28	62	-34	1156
58	Suwarti	6	50	28	54,5	-26,5	702,25
59	Sukarni	6	10	28	40	-12	144
60	Sumiati	12	20	87	42,5	44,5	1980,25
61	Erni Hastuti	12	20	87	42,5	44,5	1980,25
62	Arbaatun	12	60	87	57	30	900
63	Prayitno	12	83	87	70,5	16,5	272,25
64	Pakis	6	50	28	54,5	-26,5	702,25
65	Suparmi	6	67	28	60,5	-32,5	1056,25
66	Sutaji	6	100	28	88	-60	3600
67	Masrokah	6	100	28	88	-60	3600
68	M.Dachlan	6	100	28	88	-60	3600
69	Wijiati	6	100	28	88	-60	3600
70	Soepini Istikaromah	6	100	28	88	-60	3600
71	Sigit Sudarsono	12	45	87	52	35	1225
72	Purwanto	9	100	65	88	-23	529
73	Tutik Purwanti	12	100	87	88	-1	1
74	Purnomo	6	100	28	88	-60	3600
75	Suwito	6	100	28	88	-60	3600
76	Sukari	6	0	28	18,5	9,5	90,25
77	Teguh Santoso	6	0	28	18,5	9,5	90,25
78	Poniman	6	0	28	18,5	9,5	90,25
79	Yusuf Riyanto	6	0	28	18,5	9,5	90,25
80	Mujiyanto	6	0	28	18,5	9,5	90,25
81	Widad Diana	12	80	87	65,5	21,5	462,25
82	Siti Mutmainah	12	80	87	65,5	21,5	462,25
83	Wijiati	12	80	87	65,5	21,5	462,25
84	Moh.Yasin	9	80	65	65,5	-0,5	0,25
85	Siti Muslimah	12	80	87	65,5	21,5	462,25
86	Nurhasim	9	80	65	65,5	-0,5	0,25
87	Sri Hartatik	12	100	87	88	-1	1
88	Suciati	12	100	87	88	-1	1
89	Mia Setyawati	12	100	87	88	-1	1
90	Mu'alim	12	100	87	88	-1	1
91	Wahyu Ratnawati	12	100	87	88	-1	1
92	Arifis Shodiq	9	100	65	88	-23	529

Lampiran 5. Lanjutan

No	Nama	X ₂	Y	Rank X ₂	Rank Y	d _i	d _i ²
93	Suhartini	9	100	65	88	-23	529
94	Ashari Anwar	12	0	87	18,5	68,5	4692,25
95	Zaenal Abidin	9	0	65	18,5	46,5	2162,25
96	Asrori	9	0	65	18,5	46,5	2162,25
97	Maji	6	0	28	18,5	9,5	90,25
98	Tukimin	6	0	28	18,5	9,5	90,25
99	Siti Fatimah	6	0	28	18,5	9,5	90,25
100	Ahmad Taji	9	0	65	18,5	46,5	2162,25
101	Mashudi	6	0	28	18,5	9,5	90,25
102	H.Musuki	6	0	28	18,5	9,5	90,25
103	Hartini	12	0	87	18,5	68,5	4692,25
Total		-	-	-	-	-	130.635

Sumber: Analisis Data Primer, 2007

Keterangan :

X₂ : Pendidikan

Y : Kolektibilitas Pinjaman

d_i : Disparitas



Perhitungan Analisis Rank Spearman

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\sum T_{x_1} = \frac{54^3 - 54}{12} + \frac{19^3 - 19}{12} + \frac{25^3 - 25}{12} + \frac{4^3 - 4}{12}$$

$$\sum T_{x_1} = 13.860 + 570 + 1.300 + 5 = 15.735$$

$$\sum T_y = \frac{36^3 - 36}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{31^3 - 31}{12}$$

$$\sum T_y = 3.885 + 0,5 + 0,5 + 17,5 + 0,5 + 0,5 + 17,5 + 0,5 + 2.480 = 6.402,5$$

$$\sum X_1^2 = \left[\frac{N^3 - N}{12} \right] - \sum T_{x_1} = \left[\frac{103^3 - 103}{12} \right] - 15.735 = 91.052 - 15.735 = 75.317$$

$$\sum Y^2 = \left[\frac{N^3 - N}{12} \right] - \sum T_y = \left[\frac{103^3 - 103}{12} \right] - 6.402,5 = 91.052 - 6.402,5 = 84.649,5$$

$$r_s = \frac{\sum X_1^2 + \sum Y^2 - \sum d_i^2}{2 \sqrt{\sum X_1^2 \sum Y^2}}$$

$$r_s = \frac{75.317 + 84.649,5 - 130.635}{2 \sqrt{(75.317) (84.649,5)}} = \frac{29.331,5}{159.694,03} = 0,18$$

Kemudian dilakukan uji signifikasi nilai r_s terhadap nilai t .

$$t_{hitung} = r_s \sqrt{\frac{N - 2}{1 - r_s^2}} = 0,18 \sqrt{\frac{103 - 2}{1 - (0,18)^2}} = 1,839$$

$$t_{tabel} = 1,645$$

$$t_{hitung} = 1,839 > t_{tabel} = 1,645$$

Tolak H_0 dan terima H_1 artinya ada hubungan antara pendidikan dengan kolektibilitas pinjaman.

Lampiran 6. Hubungan Pendapatan dengan Kolektibilitas Pinjaman

No	Nama	X ₃	Y	Rank X ₃	Rank Y	di	di ²
1	Nursamsi	750.000	100	81	88	-7	49
2	Mariyoto	900.000	100	88	88	0	0
3	Laminten	500.000	100	57	88	-31	961
4	Alpiyah	337.000	100	18	88	-70	4900
5	Suparni	600.000	100	70	88	-18	324
6	Mujiwarti	1.000.000	100	92,5	88	5	20,25
7	Muntamah	850.000	100	85,5	88	-3	6,25
8	Muhaimin	750.000	100	81	88	-7	49
9	Sunarto	900.000	100	88	88	0	0
10	Mariyam	250.000	0	4,5	18,5	-14	196
11	Nanik	600.000	0	70	18,5	52	2652,25
12	Mursidi	750.000	67	81	60,5	21	420,25
13	Imam Fadlai	1.250.000	83	98	70,5	28	756,25
14	Bambang S	1.000.000	11	92,5	41	52	2652,25
15	Riadi	1.000.000	51	92,5	56	37	1332,25
16	Sugeng	1.000.000	0	92,5	18,5	74	5476
17	Priyono	350.000	0	24	18,5	6	30,25
18	Miswan	700.000	0	75,5	18,5	57	3249
19	Pani	450.000	0	46,5	18,5	28	784
20	Kartini	400.000	0	35,5	18,5	17	289
21	B.Wiji	300.000	0	12,5	18,5	-6	36
22	Purwanto	500.000	0	57	18,5	39	1482,25
23	Suparni	350.000	4	24	37	-13	169
24	Mujiamah	400.000	0	35,5	18,5	17	289
25	Minoto	650.000	98	73	72	1	1
26	Misgiran	350.000	0	24	18,5	6	30,25
27	Sripat	600.000	0	70	18,5	52	2652,25
28	Suparti	550.000	6	65	38,5	27	702,25
29	Katimah	450.000	6	46,5	38,5	8	64
30	Purwanto	450.000	0	46,5	18,5	28	784
31	Suparmi	750.000	100	81	88	-7	49
32	Ponidi	400.000	0	35,5	18,5	17	289
33	Wahono	450.000	0	46,5	18,5	28	784
34	Mahmudah	850.000	100	85,5	88	-3	6,25
35	Suyadi	1.050.000	42	96	48,5	48	2256,25
36	Djiasri	900.000	42	88	48,5	40	1560,25
37	Sugrahito	1.890.000	42	103	48,5	55	2970,25
38	Heksi Rudi R	1.500.000	42	100	48,5	52	2652,25
39	Yatiman	1.000.000	100	92,5	88	5	20,25
40	Suyani	1.550.000	100	101	88	13	169
41	Sudirman	1.450.000	100	99	88	11	121
42	Kusnanto	1.000.000	100	92,5	88	5	20,25
43	Sumantri	1.085.000	42	97	48,5	49	2352,25
44	Ayemi	1.751.000	42	102	48,5	54	2862,25
45	Misih	300.000	47	12,5	53	-41	1640,25
46	Khususiyah	700.000	81	75,5	69	7	42,25
47	Rukayah	250.000	0	4,5	18,5	-14	196

Lampiran 6. Lanjutan

No	Nama	X ₃	Y	Rank X ₃	Rank Y	di	di ²
48	Dariyah	250.000	0	4,5	18,5	-14	196
49	Siti Masithoh	550.000	61	65	58	7	49
50	Makrus	400.000	0	35,5	18,5	17	289
51	Sulastri	300.000	36	12,5	45	-33	1056,25
52	Farit	300.000	0	12,5	18,5	-6	36
53	Muslihah	300.000	0	12,5	18,5	-6	36
54	Purwanto	450.000	0	46,5	18,5	28	784
55	Peni Suwarno	750.000	64	81	59	22	484
56	Leni Martini	350.000	33	24	44	-20	400
57	Sugiyanti	400.000	75	35,5	62	-27	702,25
58	Suwarti	400.000	50	35,5	54,5	-19	361
59	Sukarni	250.000	10	4,5	40	-36	1260,25
60	Sumiati	350.000	20	24	42,5	-19	342,25
61	Erni Hastuti	300.000	20	12,5	42,5	-30	900
62	Arbaatun	300.000	60	12,5	57	-45	1980,25
63	Prayitno	400.000	83	35,5	70,5	-35	1225
64	Pakis	250.000	50	4,5	54,5	-50	2500
65	Suparmi	300.000	67	12,5	60,5	-48	2304
66	Sutaji	450.000	100	46,5	88	-42	1722,25
67	Masrokah	300.000	100	12,5	88	-76	5700,25
68	M.Dachlan	750.000	100	81	88	-7	49
69	Wijiati	500.000	100	57	88	-31	961
70	Soepini Istikaromah	350.000	100	24	88	-64	4096
71	Sigit Sudarsono	600.000	45	70	52	18	324
72	Purwanto	550.000	100	65	88	-23	529
73	Tutik Purwanti	450.000	100	46,5	88	-42	1722,25
74	Purnomo	500.000	100	57	88	-31	961
75	Suwito	350.000	100	24	88	-64	4096
76	Sukari	550.000	0	65	18,5	47	2162,25
77	Teguh Santoso	400.000	0	35,5	18,5	17	289
78	Poniman	500.000	0	57	18,5	39	1482,25
79	Yusuf Riyanto	500.000	0	57	18,5	39	1482,25
80	Mujianto	500.000	0	57	18,5	39	1482,25
81	Widad Diana	700.000	80	75,5	65,5	10	100
82	Siti Mutmainah	250.000	80	4,5	65,5	-61	3721
83	Wijiati	450.000	80	46,5	65,5	-19	361
84	Moh.Yasin	750.000	80	81	65,5	16	240,25
85	Siti Muslimah	200.000	80	1	65,5	-65	4160,25
86	Nurhasim	300.000	80	12,5	65,5	-53	2809
87	Sri Hartatik	500.000	100	57	88	-31	961
88	Suciati	500.000	100	57	88	-31	961
89	Mia Setyawati	400.000	100	35,5	88	-53	2756,25
90	Mu'alim	600.000	100	70	88	-18	324
91	Wahyu Ratnawati	450.000	100	46,5	88	-42	1722,25
92	Arifis Shodiq	550.000	100	65	88	-23	529
93	Suhartini	400.000	100	35,5	88	-53	2756,25

Lampiran 6. Lanjutan

No	Nama	X_3	Y	Rank X_3	Rank Y	d_i	d_i^2
94	Ashari Anwar	350.000	0	24	18,5	6	30,25
95	Zaenal Abidin	400.000	0	35,5	18,5	17	289
96	Asrori	500.000	0	57	18,5	39	1482,25
97	Maji	450.000	0	46,5	18,5	28	784
98	Tukimin	350.000	0	24	18,5	6	30,25
99	Siti Fatimah	350.000	0	24	18,5	6	30,25
100	Ahmad Taji	400.000	0	35,5	18,5	17	289
101	Mashudi	500.000	0	57	18,5	39	1482,25
102	H.Musuki	700.000	0	75,5	18,5	57	3249
103	Hartini	350.000	0	24	18,5	6	30,25
Total							119.409,5

Sumber: Analisis Data Primer, 2007

Keterangan :

X_3 : Pendapatan

Y : Kolektibilitas Pinjaman

d_i : Disparitas



Perhitungan Analisis Rank Spearman

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\sum T_{x_1} = \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{10^3 - 10}{12} + \frac{11^3 - 11}{12} + \frac{12^3 - 12}{12} + \frac{10^3 - 10}{12} + \frac{11^3 - 11}{12} + \frac{5^3 - 5}{12} + \frac{5^3 - 5}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{7^3 - 7}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{6^3 - 6}{12}$$

$$\sum T_{x_1} = 17,5 + 82,5 + 110 + 143 + 82,5 + 110 + 10 + 10 + 5 + 28 + 0,5 + 2 + 17,5 = 618,5$$

$$\sum T_y = \frac{36^3 - 36}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{31^3 - 31}{12}$$

$$\sum T_y = 3.885 + 0,5 + 0,5 + 17,5 + 0,5 + 0,5 + 17,5 + 0,5 + 2.480 = 6.402,5$$

$$\sum X_1^2 = \left[\frac{N^3 - N}{12} \right] - \sum T_{x_1} = \left[\frac{103^3 - 103}{12} \right] - 618,5 = 91.052 - 618,5 = 90.433,5$$

$$\sum Y^2 = \left[\frac{N^3 - N}{12} \right] - \sum T_y = \left[\frac{103^3 - 103}{12} \right] - 6.402,5 = 91.052 - 6.402,5 = 84.649,5$$

$$r_s = \frac{\sum X_1^2 + \sum Y^2 - \sum d_i^2}{2 \sqrt{\sum X_1^2 \sum Y^2}}$$

$$r_s = \frac{90.433,5 + 84.649,5 - 119.409,5}{2 \sqrt{(90.433,5)(84.649,5)}} = \frac{55.673,5}{174.987,4} = 0,32$$

Kemudian dilakukan uji signifikansi nilai r_s terhadap nilai t .

$$t_{hitung} = r_s \sqrt{\frac{N - 2}{1 - r_s^2}} = 0,32 \sqrt{\frac{103 - 2}{1 - (0,17)^2}} = 3,39$$

$$t_{tabel} = 1,645$$

$$t_{hitung} = 3,39 > t_{tabel} = 1,645$$

Tolak H_0 dan terima H_1 artinya terdapat hubungan antara pendapatan dengan kolektibilitas pinjaman.

Lampiran 7. Hubungan Jumlah Anggota Keluarga dengan Kolektibilitas Pinjaman

No	Nama	X ₄	Y	Rank X ₄	Rank Y	di	di ²
1	Nursamsi	4	100	76	88	-12	144
2	Mariyoto	5	100	13,5	88	-74,5	5550,25
3	Laminten	5	100	13,5	88	-74,5	5550,25
4	Alpiyah	3	100	70	88	-18	324
5	Suparni	4	100	76	88	-12	144
6	Mujiwarti	6	100	3,5	88	-84,5	7140,25
7	Muntamah	5	100	13,5	88	-74,5	5550,25
8	Muhaimin	5	100	13,5	88	-74,5	5550,25
9	Sunarto	3	100	70	88	-18	324
10	Mariyam	3	0	70	18,5	51,5	2652,25
11	Nanik	4	0	76	18,5	57,5	3306,25
12	Mursidi	4	67	76	60,5	15,5	240,25
13	Imam Fadlai	5	83	13,5	70,5	-57	3249
14	Bambang S	2	11	94,5	41	53,5	2862,25
15	Riadi	4	51	76	56	20	400
16	Sugeng	3	0	70	18,5	51,5	2652,25
17	Priyono	3	0	70	18,5	51,5	2652,25
18	Miswan	2	0	94,5	18,5	76	5776
19	Pani	5	0	13,5	18,5	-5	25
20	Kartini	3	0	70	18,5	51,5	2652,25
21	B.Wiji	3	0	70	18,5	51,5	2652,25
22	Purwanto	3	0	70	18,5	51,5	2652,25
23	Suparni	3	4	70	37	33	1089
24	Mujiamah	4	0	76	18,5	57,5	3306,25
25	Minoto	4	98	76	72	4	16
26	Misgiran	2	0	94,5	18,5	76	5776
27	Sripat	2	0	94,5	18,5	76	5776
28	Suparti	2	6	94,5	38,5	56	3136
29	Katimah	2	6	94,5	38,5	56	3136
30	Purwanto	4	0	76	18,5	57,5	3306,25
31	Suparmi	1	100	103	88	15	225
32	Ponidi	4	0	76	18,5	57,5	3306,25
33	Wahono	3	0	70	18,5	51,5	2652,25
34	Mahmudah	2	100	94,5	88	6,5	42,25
35	Suyadi	4	42	76	48,5	27,5	756,25
36	Djiasri	2	42	94,5	48,5	46	2116
37	Sugrahito	4	42	76	48,5	27,5	756,25
38	Heksi Rudi R	3	42	70	48,5	21,5	462,25
39	Yatiman	3	100	70	88	-18	324
40	Suyani	3	100	70	88	-18	324
41	Sudirman	4	100	76	88	-12	144
42	Kusnanto	4	100	76	88	-12	144
43	Sumantri	4	42	76	48,5	27,5	756,25
44	Ayemi	4	42	76	48,5	27,5	756,25
45	Misih	5	47	13,5	53	-39,5	1560,25
46	Khususiyah	5	81	13,5	69	-55,5	3080,25
47	Rukayah	7	0	1,5	18,5	-17	289

Lampiran 7. Lanjutan

No	Nama	X ₄	Y	Rank X ₄	Rank Y	di	di ²
48	Dariyah	4	0	76	18,5	57,5	3306,25
49	Siti Masithoh	6	61	3,5	58	-54,5	2970,25
50	Makrus	3	0	70	18,5	51,5	2652,25
51	Sulastri	3	36	70	45	25	625
52	Farit	3	0	70	18,5	51,5	2652,25
53	Muslihah	4	0	76	18,5	57,5	3306,25
54	Purwanto	3	0	70	18,5	51,5	2652,25
55	Peni Suwarno	5	64	13,5	59	-45,5	2070,25
56	Leni Martini	3	33	70	44	26	676
57	Sugiyanti	4	75	76	62	14	196
58	Suwarti	5	50	13,5	54,5	-41	1681
59	Sukarni	2	10	94,5	40	54,5	2970,25
60	Sumiati	5	20	13,5	42,5	-29	841
61	Erni Hastuti	4	20	76	42,5	33,5	1122,25
62	Arbaatun	3	60	70	57	13	169
63	Prayitno	5	83	13,5	70,5	-57	3249
64	Pakis	3	50	70	54,5	15,5	240,25
65	Suparmi	3	67	70	60,5	9,5	90,25
66	Sutaji	3	100	70	88	-18	324
67	Masroka	4	100	76	88	-12	144
68	M.Dachlan	2	100	94,5	88	6,5	42,25
69	Wijiati	2	100	94,5	88	6,5	42,25
70	Soepini Istikaromah	2	100	94,5	88	6,5	42,25
71	Sigit Sudarsono	4	45	76	52	24	576
72	Purwanto	3	100	70	88	-18	324
73	Tutik Purwanti	3	100	70	88	-18	324
74	Purnomo	2	100	94,5	88	6,5	42,25
75	Suwito	2	100	94,5	88	6,5	42,25
76	Sukari	7	0	1,5	18,5	-17	289
77	Teguh Santoso	5	0	13,5	18,5	-5	25
78	Poniman	3	0	70	18,5	51,5	2652,25
79	Yusuf Riyanto	3	0	70	18,5	51,5	2652,25
80	Mujianto	4	0	76	18,5	57,5	3306,25
81	Widad Diana	5	80	13,5	65,5	-52	2704
82	Siti Mutmainah	3	80	70	65,5	4,5	20,25
83	Wijiati	2	80	94,5	65,5	29	841
84	Moh.Yasin	3	80	70	65,5	4,5	20,25
85	Siti Muslimah	3	80	70	65,5	4,5	20,25
86	Nurhasim	5	80	13,5	65,5	-52	2704
87	Sri Hartatik	4	100	76	88	-12	144
88	Suciati	4	100	76	88	-12	144
89	Mia Setyawati	3	100	70	88	-18	324
90	Mu'alim	4	100	76	88	-12	144
91	Wahyu Ratnawati	3	100	70	88	-18	324
92	Arifis Shodiq	5	100	13,5	88	-74,5	5550,25
93	Suhartini	4	100	76	88	-12	144

Lampiran 7. Lanjutan

No	Nama	X_4	Y	Rank X_4	Rank Y	d_i	d_i^2
94	Ashari Anwar	2	0	94,5	18,5	76	5776
95	Zaenal Abidin	4	0	76	18,5	57,5	3306,25
		5					
96	Asrori		0	13,5	18,5	-5	25
97	Maji	4	0	76	18,5	57,5	3306,25
98	Tukimin	3	0	70	18,5	51,5	2652,25
99	Siti Fatimah	4	0	76	18,5	57,5	3306,25
100	Ahmad Taji	4	0	76	18,5	57,5	3306,25
101	Mashudi	3	0	70	18,5	51,5	2652,25
102	H.Musuki	5	0	13,5	18,5	-5	25
103	Hartini	4	0	76	18,5	57,5	3306,25
Total		-	-	-	-	-	188.329

Sumber: Analisis Data Primer, 2007

Keterangan :

X_4 : Jumlah Anggota Keluarga

Y : Kolektibilitas Pinjaman

d_i : Disparitas



Perhitungan Analisis Rank Spearman

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\sum T_{x_1} = \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{18^3 - 18}{12} + \frac{31^3 - 31}{12} + \frac{33^3 - 33}{12} + \frac{16^3 - 16}{12}$$

$$\sum T_{x_1} = 0,5 + 0,5 + 484,5 + 2.480 + 2.992 + 340 = 6.297,5$$

$$\sum T_y = \frac{36^3 - 36}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{31^3 - 31}{12}$$

$$\sum T_y = 3.885 + 0,5 + 0,5 + 17,5 + 0,5 + 0,5 + 17,5 + 0,5 + 2.480 = 6.402,5$$

$$\sum X_1^2 = \left[\frac{N^3 - N}{12} \right] - \sum T_{x_1} = \left[\frac{103^3 - 103}{12} \right] - 6.297,5 = 91.052 - 6.297,5 = 84.754,5$$

$$\sum Y^2 = \left[\frac{N^3 - N}{12} \right] - \sum T_y = \left[\frac{103^3 - 103}{12} \right] - 6.402,5 = 91.052 - 6.402,5 = 84.649,5$$

$$r_s = \frac{\sum X_1^2 + \sum Y^2 - \sum d_i^2}{2 \sqrt{\sum X_1^2 \sum Y^2}}$$

$$r_s = \frac{84.754,5 + 84.649,5 - 188.329}{2 \sqrt{(84.754,5) (84.649,5)}} = \frac{-18.925}{169.403,97} = -0,11$$

Kemudian dilakukan uji signifikansi nilai r_s terhadap nilai t .

$$t_{hitung} = r_s \sqrt{\frac{N - 2}{1 - r_s^2}} = -0,11 \sqrt{\frac{103 - 2}{1 - (-0,11)^2}} = -1,11$$

$$t_{tabel} = 1,645$$

$$t_{hitung} = -1,11 < t_{tabel} = 1,645$$

Terima H_0 dan tolak H_1 artinya tidak terdapat hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan kolektibilitas pinjaman.

Lampiran 8. Hubungan Tanggungan Keluarga dengan Kolektibilitas Pinjaman

No	Nama	X ₅	Y	Rank X ₅	Rank Y	di	di ²
1	Nursamsi	3	100	21,5	88	-66,5	4422,25
2	Mariyoto	4	100	5,5	88	-82,5	6806,25
3	Laminten	3	100	21,5	88	-66,5	4422,25
4	Alpiyah	2	100	47,5	88	-40,5	1640,25
5	Suparni	3	100	21,5	88	-66,5	4422,25
6	Mujiwarti	4	100	5,5	88	-82,5	6806,25
7	Muntamah	3	100	21,5	88	-66,5	4422,25
8	Muhaimin	4	100	5,5	88	-82,5	6806,25
9	Sunarto	1	100	76,5	88	-11,5	132,25
10	Mariyam	2	0	47,5	18,5	29	841
11	Nanik	2	0	47,5	18,5	29	841
12	Mursidi	3	67	21,5	60,5	-39	1521
13	Imam Fadlai	4	83	5,5	70,5	-65	4225
14	Bambang S	1	11	76,5	41	35,5	1260,25
15	Riadi	3	51	21,5	56	-34,5	1190,25
16	Sugeng	1	0	76,5	18,5	58	3364
17	Priyono	1	0	76,5	18,5	58	3364
18	Miswan	0	0	98	18,5	79,5	6320,25
19	Pani	3	0	21,5	18,5	3	9
20	Kartini	0	0	98	18,5	79,5	6320,25
21	B.Wiji	0	0	98	18,5	79,5	6320,25
22	Purwanto	1	0	76,5	18,5	58	3364
23	Suparni	1	4	5,5	37	-31,5	992,25
24	Mujiamah	2	0	47,5	18,5	29	841
25	Minoto	2	98	47,5	72	-24,5	600,25
26	Misgiran	0	0	98	18,5	79,5	6320,25
27	Sripat	1	0	76,5	18,5	58	3364
28	Suparti	1	6	76,5	38,5	38	1444
29	Katimah	1	6	76,5	38,5	38	1444
30	Purwanto	3	0	21,5	18,5	3	9
31	Suparmi	0	100	98	88	10	100
32	Ponidi	2	0	47,5	18,5	29	841
33	Wahono	2	0	47,5	18,5	29	841
34	Mahmudah	1	100	76,5	88	-11,5	132,25
35	Suyadi	3	42	21,5	48,5	-27	729
36	Djiasri	1	42	76,5	48,5	28	784
37	Sugrahito	2	42	47,5	48,5	-1	1
38	Heksi Rudi R	1	42	76,5	48,5	28	784
39	Yatiman	2	100	47,5	88	-40,5	1640,25
40	Suyani	2	100	47,5	88	-40,5	1640,25
41	Sudirman	3	100	21,5	88	-66,5	4422,25
42	Kusnanto	3	100	21,5	88	-66,5	4422,25
43	Sumantri	3	42	21,5	48,5	-27	729
44	Ayemi	3	42	21,5	48,5	-27	729
45	Misih	3	47	21,5	53	-31,5	992,25
46	Khususiyah	3	81	21,5	69	-47,5	2256,25
47	Rukayah	5	0	1,5	18,5	-17	289

Lampiran 8. Lanjutan

No	Nama	X_5	Y	Rank X_5	Rank Y	di	di ²
48	Dariyah	3	0	21,5	18,5	3	9
49	Siti Masithoh	4	61	5,5	58	-52,5	2756,25
50	Makrus	1	0	76,5	18,5	58	3364
51	Sulastri	1	36	76,5	45	31,5	992,25
52	Farit	2	0	47,5	18,5	29	841
53	Muslihah	3	0	21,5	18,5	3	9
54	Purwanto	1	0	76,5	18,5	58	3364
55	Peni Suwarno	2	64	47,5	59	-11,5	132,25
56	Leni Martini	1	33	76,5	44	32,5	1056,25
57	Sugiyanti	2	75	47,5	62	-14,5	210,25
58	Suwarti	3	50	21,5	54,5	-33	1089
59	Sukarni	1	10	76,5	40	36,5	1332,25
60	Sumiati	3	20	21,5	42,5	-21	441
61	Erni Hastuti	2	20	47,5	42,5	5	25
62	Arbaatun	2	60	47,5	57	-9,5	90,25
63	Prayitno	3	83	21,5	70,5	-49	2401
64	Pakis	2	50	47,5	54,5	-7	49
65	Suparmi	1	67	76,5	60,5	16	256
66	Sutaji	1	100	76,5	88	-11,5	132,25
67	Masrokah	2	100	47,5	88	-40,5	1640,25
68	M.Dachlan	1	100	76,5	88	-11,5	132,25
69	Wijiati	0	100	98	88	10	100
70	Soepini Istikaromah	0	100	98	88	10	100
71	Sigit Sudarsono	2	45	47,5	52	-4,5	20,25
72	Purwanto	1	100	76,5	88	-11,5	132,25
73	Tutik Purwanti	1	100	76,5	88	-11,5	132,25
74	Purnomo	0	100	98	88	10	100
75	Suwito	1	100	76,5	88	-11,5	132,25
76	Sukari	5	0	1,5	18,5	-17	289
77	Teguh Santoso	3	0	21,5	18,5	3	9
78	Poniman	1	0	76,5	18,5	58	3364
79	Yusuf Riyanto	1	0	76,5	18,5	58	3364
80	Mujianto	0	0	98	18,5	79,5	6320,25
81	Widad Diana	3	80	21,5	65,5	-44	1936
82	Siti Mutmainah	1	80	76,5	65,5	11	121
83	Wijiati	0	80	98	65,5	32,5	1056,25
84	Moh.Yasin	1	80	76,5	65,5	11	121
85	Siti Muslimah	1	80	76,5	65,5	11	121
86	Nurhasim	4	80	5,5	65,5	-60	3600
87	Sri Hartatik	2	100	47,5	88	-40,5	1640,25
88	Suciati	2	100	47,5	88	-40,5	1640,25
89	Mia Setyawati	1	100	76,5	88	-11,5	132,25
90	Mu'alim	2	100	47,5	88	-40,5	1640,25
91	Wahyu Ratnawati	1	100	76,5	88	-11,5	132,25
92	Arifis Shodiq	3	100	21,5	88	-66,5	4422,25

Lampiran 8. Lanjutan

No	Nama	X_5	Y	Rank X_5	Rank Y	d_i	d_i^2
93	Suhartini	2	100	47,5	88	-40,5	1640,25
94	Ashari Anwar	0	0	98	18,5	79,5	6320,25
95	Zaenal Abidin	2	0	47,5	18,5	29	841
96	Asrori	3	0	21,5	18,5	3	9
97	Maji	3	0	21,5	18,5	3	9
98	Tukimin	1	0	76,5	18,5	58	3364
99	Siti Fatimah	2	0	47,5	18,5	29	841
100	Ahmad Taji	2	0	47,5	18,5	29	841
101	Mashudi	1	0	76,5	18,5	58	3364
102	H.Musuki	3	0	21,5	18,5	3	9
103	Hartini	2	0	47,5	18,5	29	841
Total		-	-	-	-		184.196

Sumber: Analisis Data Primer, 2007

Keterangan :

X_5 : Tanggungan Keluarga

Y : Kolektibilitas Pinjaman

d_i : Disparitas



Perhitungan Analisis Rank Spearman

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\sum T_{x_1} = \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{26^3 - 26}{12} + \frac{26^3 - 26}{12} + \frac{32^3 - 32}{12} + \frac{11^3 - 11}{12}$$

$$\sum T_{x_1} = 0,5 + 17,5 + 1.462,5 + 1.462,5 + 2.728 + 110 = 5.781$$

$$\sum T_y = \frac{36^3 - 36}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{31^3 - 31}{12}$$

$$\sum T_y = 3.885 + 0,5 + 0,5 + 17,5 + 0,5 + 0,5 + 17,5 + 0,5 + 2.480 = 6.402,5$$

$$\sum X_1^2 = \left[\frac{N^3 - N}{12} \right] - \sum T_{x_1} = \left[\frac{103^3 - 103}{12} \right] - 5.781 = 91.052 - 5.781 = 85.271$$

$$\sum Y^2 = \left[\frac{N^3 - N}{12} \right] - \sum T_y = \left[\frac{103^3 - 103}{12} \right] - 6.402,5 = 91.052 - 6.402,5 = 84.649,5$$

$$r_s = \frac{\sum X_1^2 + \sum Y^2 - \sum d_i^2}{2 \sqrt{\sum X_1^2 \sum Y^2}}$$

$$r_s = \frac{85.271 + 84.649,5 - 184.196}{2 \sqrt{(85.271) (84.649,5)}} = \frac{-14.275,5}{169.919,4} = -0,08$$

Kemudian dilakukan uji signifikansi nilai r_s terhadap nilai t .

$$t_{hitung} = r_s \sqrt{\frac{N - 2}{1 - r_s^2}} = -0,08 \sqrt{\frac{103 - 2}{1 - (-0,08)^2}} = -0,81$$

$$t_{tabel} = 1,645$$

$$t_{hitung} = -0,81 < t_{tabel} = 1,645$$

Terima H_0 dan tolak H_1 artinya tidak terdapat hubungan antara tanggungan keluarga dengan kolektibilitas pinjaman.

Lampiran 9. Hubungan Jenis Usaha dengan Kolektibilitas Pinjaman

Jumlah responden menurut jenis usaha dan kolektibilitas pinjaman

Kolektibilitas Pinjaman	Jenis Usaha		Total
	Perdagangan	Non Perdagangan	
>50	21	12	33
0-50	14	27	41
Total	35	39	74

Analisa Khi-Kuadrat

Jenis Usaha	Kategori Kolektibilitas Pinjaman	fo	fh	fo-fh	(fo-fh) ²	(fo-fh) ² /fh
Perdagangan	>50	21	15,61	5,39	29,0521	1,861121076
	0-50	14	19,39	-5,39	29,0521	1,498303249
non perdagangan	>50	12	17,39	-5,39	29,0521	1,670621047
	0-50	27	21,61	5,39	29,0521	1,34438223
Σ						6,374427602

$$f_h : - \text{Kolektibilitas } >50 - \text{Perdagangan} = \frac{(33)(35)}{74} = 15,61$$

$$f_h : - \text{Kolektibilitas } >50 - \text{non Perdagangan} = \frac{(33)(39)}{74} = 17,39$$

$$f_h : - \text{Kolektibilitas } 0-50 - \text{Perdagangan} = \frac{(41)(35)}{74} = 19,39$$

$$f_h : - \text{Kolektibilitas } 0-50 - \text{non Perdagangan} = \frac{(41)(39)}{74} = 21,61$$

$$X^2_{\text{hitung}} = 6,37$$

$$X^2_{\text{tabel}} (\alpha = 0,05 \text{ dan } db=1) = 3,841$$

$X^2_{\text{hitung}} > X^2_{\text{tabel}}$, kesimpulannya tolak H_0 dan terima H_1 artinya ada hubungan antara jenis usaha dengan kolektibilitas pinjaman.

Lampiran 10. Perhitungan Analisis Uji Dua Beda Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga pada UPK Penguatan dan UPK non Penguatan

1. Mengetahui Varian atau Ragam

$$S_1^2 = \frac{\sum (x_1 - \bar{x}_1)^2}{n_1 - 1} = \frac{6,92887E + 12}{43} = 1,61137E + 11$$

$$S_2^2 = \frac{\sum (x_2 - \bar{x}_2)^2}{n_2 - 1} = \frac{1,11381E + 12}{58} = 19203682057$$

2. Mengetahui F hitung

$$F_{hit} = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{1,61137E + 11}{19203682057} = 8,39 \quad F_{tab0.05(43,58)} = 1,64$$

Karena $F_{hit} > F_{tab}$, maka ragam pendapatan pemijam pada UPK Penguatan berbeda nyata dengan ragam pendapatan pemijam pada UPK non Penguatan.

3. Perhitungan Uji t

$$t_{hit} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{353319,3375}{63148,09} = 5,6$$

Keterangan:

Nyata pada taraf signifikansi 5% dan 1%.

$$db = (n_1 - 1), (n_2 - 1) \quad n_1 = 44$$

$$t_{tab0,05(101)} = 1,645 \quad n_2 = 59$$

$$t_{tab0,01(101)} = 2,326$$

Dari hasil perhitungan uji t diperoleh bahwa nilai $t_{hit} > t_{tab}$ maka H_0 ditolak sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan rumah tangga di UPK Penguatan berbeda nyata dengan pendapatan rumah tangga di UPK non Penguatan. Jadi, dapat dikatakan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga di UPK Penguatan lebih besar daripada rata-rata pendapatan rumah tangga di UPK non Penguatan.

Lampiran 11. Perhitungan Analisis Uji Dua Beda Rata-Rata Pendapatan Pedagang Prancangan di UPK Penguatan dan UPK non Penguatan

1. Mengetahui Varian atau Ragam

$$S_1^2 = \frac{\sum (x_1 - \bar{x}_1)^2}{n_1 - 1} = \frac{11666666667}{3} = 3888888889$$

$$S_2^2 = \frac{\sum (x_2 - \bar{x}_2)^2}{n_2 - 1} = \frac{2,93571E + 11}{13} = 22582417582$$

2. Mengetahui F hitung

$$F_{hit} = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{3888888889}{22582417582} = 0,17 \quad F_{tab(3,13)} = 3,41$$

Karena $F_{hit} < F_{tab}$, maka ragam pendapatan pedagang prancangan di UPK Penguatan tidak berbeda nyata dengan ragam pendapatan pedagang prancangan di UPK non Penguatan. Maka menggunakan :

$$S^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)} = 19077380952$$

3. Perhitungan Uji t

$$t_{hitung} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{s^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{416071,43}{78132,98} = 5,33$$

Keterangan:

Nyata pada taraf signifikansi 5% dan 1%.

$$db = (n_1 - 1), (n_2 - 1) \quad n_1 = 4 \quad n_2 = 14$$

$$t_{tab0,05(16)} = 1,746 \quad t_{tab0,025(16)} = 2,120$$

Dari hasil perhitungan uji t diperoleh bahwa nilai $t_{hit} > t_{tab}$ maka H_0 ditolak sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan pedagang prancangan di UPK Penguatan berbeda nyata dengan pendapatan pedagang prancangan di UPK non Penguatan. Jadi, dapat dikatakan bahwa rata-rata pendapatan pedagang prancangan di UPK Penguatan lebih besar daripada rata-rata pendapatan pedagang prancangan di UPK non Penguatan.

Lampiran 12. Perhitungan Analisis Uji Dua Beda Rata-Rata Pendapatan Pedagang mlijo di UPK Penguatan dan UPK non Penguatan

1. Mengetahui Varian atau Ragam

$$S_1^2 = \frac{\sum (x_1 - \bar{x}_1)^2}{n_1 - 1} = \frac{1,73E + 11}{4} = 43250000000$$

$$S_2^2 = \frac{\sum (x_2 - \bar{x}_2)^2}{n_2 - 1} = \frac{67500000000}{11} = 6136363636$$

2. Mengetahui F hitung

$$F_{hit} = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{43250000000}{6136363636} = 7,05 \quad F_{tab(4,11)} = 3,36$$

Karena $F_{hit} > F_{tab}$, maka ragam pendapatan pedagang mlijo di UPK Penguatan berbeda nyata dengan ragam pendapatan pedagang mlijo di UPK non Penguatan.

3. Perhitungan Uji t

$$t_{hit} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{155000}{95715,01} = 1,62$$

Keterangan:

Nyata pada taraf signifikansi 5%.

$$db = (n_1 - 1), (n_2 - 1) \quad n_1 = 5 \quad n_2 = 12$$

$$t_{tab0,05(15)} = 1,753$$

Dari hasil perhitungan uji t diperoleh bahwa nilai $t_{hit} < t_{tab}$ maka H_0 diterima sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan pedagang mlijo di UPK Penguatan tidak berbeda nyata atau sama dengan pendapatan pedagang mlijo di UPK non Penguatan.

Lampiran 13. Perhitungan Analisis Uji Dua Beda Rata-Rata Pendapatan petani di
UPK Penguatan dan UPK non Penguatan

1. Mengetahui Varian atau Ragam

$$S_1^2 = \frac{\sum (x_1 - \bar{x}_1)^2}{n_1 - 1} = \frac{4,23889E + 11}{8} = 52986111111$$

$$S_2^2 = \frac{\sum (x_2 - \bar{x}_2)^2}{n_2 - 1} = \frac{1,56923E + 11}{12} = 13076923077$$

2. Mengetahui F hitung

$$F_{hit} = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{52986111111}{13076923077} = 4,05 \quad F_{tab0.05(8,12)} = 2,85$$

Karena $F_{hit} > F_{tab}$, maka ragam pendapatan petani di UPK Penguatan berbeda nyata dengan ragam pendapatan petani di UPK non Penguatan.

3. Perhitungan Uji t

$$t_{hit} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{173504,27}{83025,68} = 2,09$$

Keterangan:

Nyata pada taraf signifikansi 5% dan 1%.

$$db = (n_1 - 1), (n_2 - 1) \quad n_1 = 9 \quad n_2 = 13$$

$$t_{tab0,05(20)} = 1,725 \quad t_{tab0,01(20)} = 2,08$$

Dari hasil perhitungan uji t diperoleh bahwa nilai $t_{hit} > t_{tab}$ maka H_0 ditolak sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan petani di UPK Penguatan berbeda nyata dengan pendapatan petani di UPK non Penguatan. Jadi, dapat dikatakan bahwa rata-rata pendapatan petani di UPK Penguatan lebih besar daripada rata-rata pendapatan petani di UPK non Penguatan.

Lampiran 14. Perhitungan Analisis Uji Dua Beda Rata-Rata Pendapatan Peternak ayam di UPK Penguatan dan UPK non Penguatan

1. Mengetahui Varian atau Ragam

$$S_1^2 = \frac{\sum (x_1 - \bar{x}_1)^2}{n_1 - 1} = \frac{9,28362E + 11}{8} = 1,16045E + 11$$

$$S_2^2 = \frac{\sum (x_2 - \bar{x}_2)^2}{n_2 - 1} = \frac{5000000000}{1} = 5000000000$$

2. Mengetahui F hitung

$$F_{hit} = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{1,16045E + 11}{5000000000} = 23,21 \quad F_{tab(8,1)} = 238,9$$

Karena $F_{hit} < F_{tab}$, maka ragam pendapatan peternak ayam di UPK Penguatan tidak berbeda nyata dengan ragam pendapatan peternak ayam di UPK non Penguatan. Maka menggunakan :

$$S^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)} = 1,03707E + 11$$

3. Perhitungan Uji t

$$t_{hitung} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{s^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{714000}{249447,66} = 2,86$$

Keterangan:

Nyata pada taraf signifikansi 5% dan 1%.

$$db = (n_1 - 1), (n_2 - 1) \quad n_1 = 9 \quad n_2 = 2$$

$$t_{tab0,05(9)} = 1,833 \quad t_{tab0,025(9)} = 2,262$$

Dari hasil perhitungan uji t diperoleh bahwa nilai $t_{hit} > t_{tab}$ maka H_0 ditolak sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan peternak ayam di UPK Penguatan berbeda nyata dengan pendapatan peternak ayam di UPK non Penguatan. Jadi, dapat dikatakan bahwa rata-rata pendapatan peternak ayam di UPK Penguatan lebih besar daripada rata-rata pendapatan peternak ayam di UPK non Penguatan.

Lampiran 15. Perhitungan Analisis Uji Dua Beda Rata-Rata Pendapatan dari jenis usaha lain di UPK Penguatan dan UPK non Penguatan

1. Mengetahui Varian atau Ragam

$$S_1^2 = \frac{\sum (x_1 - \bar{x}_1)^2}{n_1 - 1} = \frac{3,67E+11}{4} = 91750000000$$

$$S_2^2 = \frac{\sum (x_2 - \bar{x}_2)^2}{n_2 - 1} = 0$$

2. Perhitungan Uji t

$$S^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)} = 91750000000$$

$$t_{hitung} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{210000}{331813,2} = 0,63$$

Keterangan:

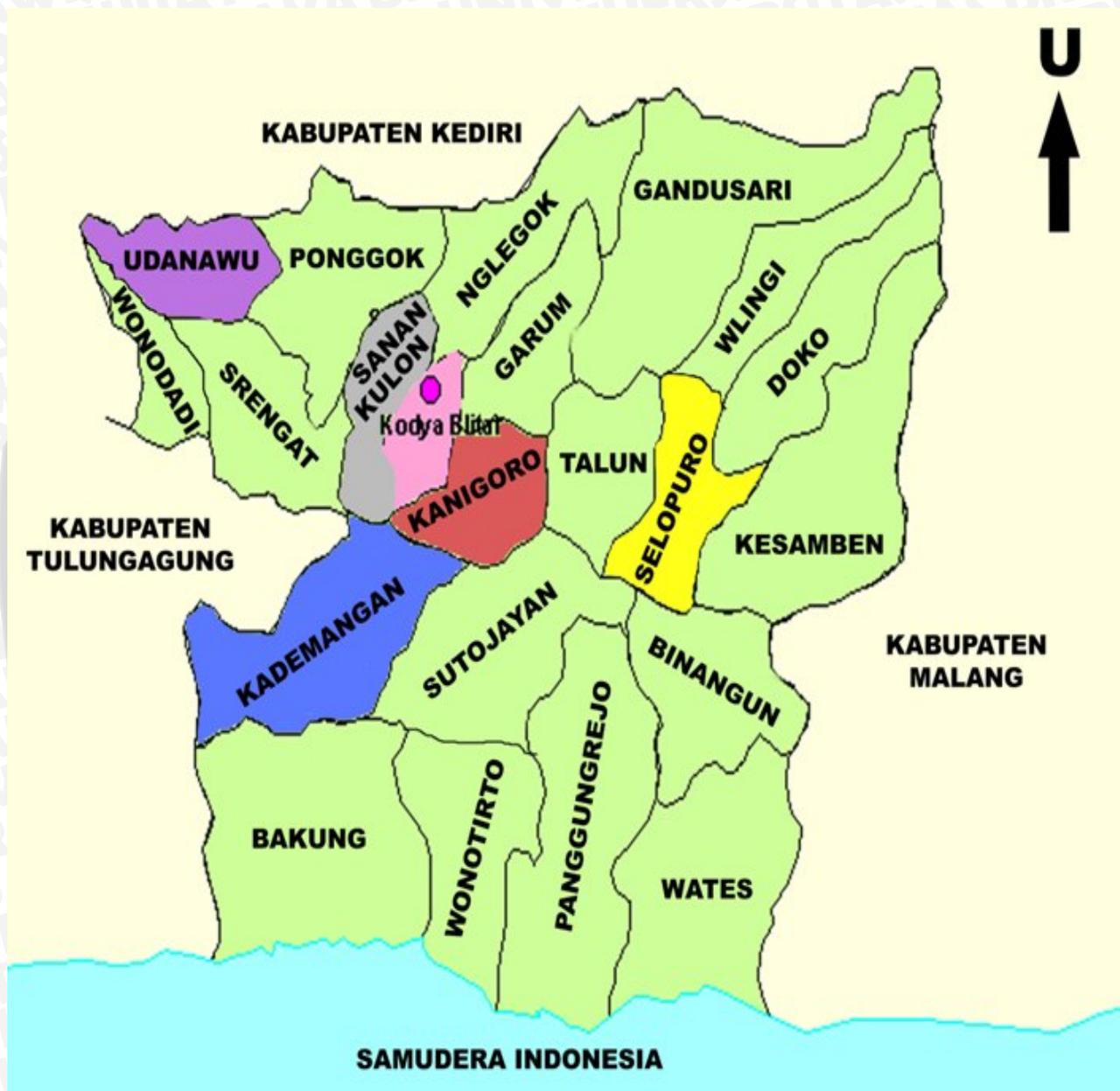
Nyata pada taraf signifikansi 5% dan 1%.

$$db = (n_1 - 1) + (n_2 - 1) \quad n_1 = 5 \quad n_2 = 1$$

$$t_{tab0,05}(4) = 2,132$$

Dari hasil perhitungan uji t diperoleh bahwa nilai $t_{hit} < t_{tab}$ maka H_0 diterima sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan dari jenis usaha lain di UPK Penguatan sama dengan pendapatan dari jenis usaha lain di UPK non Penguatan.

Lampiran 16. Peta Kabupaten Blitar



Keterangan :

- : Lokasi UPK Mitra Usaha
- : Lokasi UPK Cipta Mandiri
- : Lokasi UPK Mandiri dan UPK Gerdu-Taskin Papungan
- : Lokasi UPK Artha Mulia
- : Lokasi UPK Barokah